



LKj

Laporan Kinerja Laporan Kinerja Tahun 2025

POS PENGADUAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat RahmatNya jualah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2025 ini merupakan dokumen yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang ada.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentu belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kepada semua pihak/pengguna Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di tahun yang akan datang.

Akhir kata dengan senantiasa selalu mengharap ridho dari Allah SWT, selanjutnya kami berharap pula Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 ini, akan menjadi pendorong dan motivasi dalam rangka pelaksanaan percepatan peningkatan kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kedepan.

Pelaihari, 19 Februari 2026
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Laut,



Gusti Dwi Efrandi Kasuma, S.T., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790709 200701 1 022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia- Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahun 2025, ada 15 sasaran strategis dan ada 25 Indikator kinerja utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup , 25 indikator ini dicapai melalui 16 program dan 30 kegiatan.

Pada tahun anggaran 2025 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 124.912.385.742,23 (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp 50.089.766.301,15,- dan Belanja Modal sebesar Rp 74.822.619.441,08,-

Capaian kinerja keuangan secara keseluruhan terealisasi sebesar 84,20%. Hal ini dapat tercapai karena kesungguhan dan komitmen bersama antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Stakeholder (pemangku kepentingan) dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Cascading Kinerja.....	4
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Stuktur Organisasi	4
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	13
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	32
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	36
I. Sistematika Penyajian	38
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	40
A. Visi RPJMD	40
B. Misi RPJMD	41
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	41
D. Strategi dan Arah Kebijakan	48
E. Perjanjian Kinerja.....	55
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	58
A. Akuntabilitas Kinerja	59
1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	59
2 Analisa Capaian Kinerja DPRKPLH.....	60
B. Akuntabilitas Keuangan	167
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2025	168
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkualitas	175
3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun 2024 dan 2025.....	177
BAB IV PENUTUP	188
A. Kesimpulan	188
B. Strategi Peningkatan Kinerja	188

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.
- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut dalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja

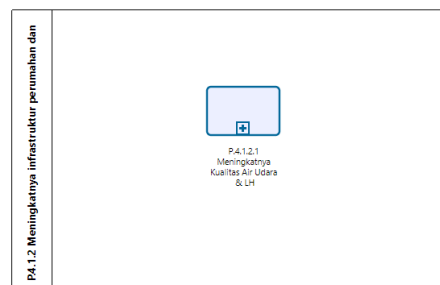
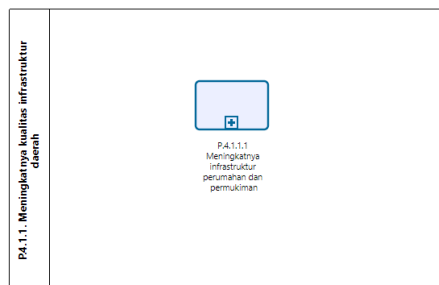
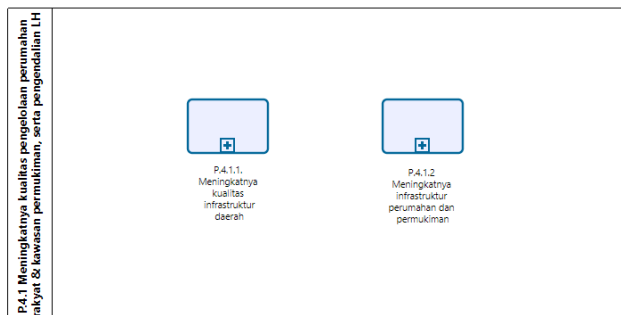
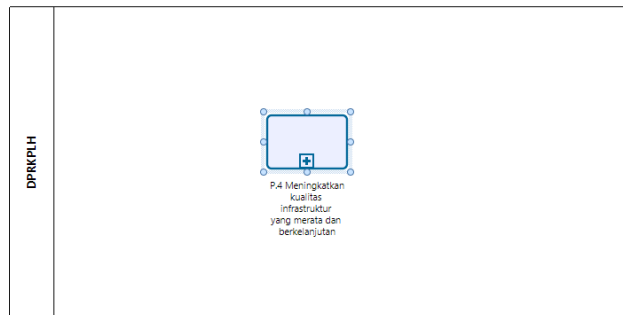
Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

1) Proses Bisnis

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut memiliki acuan untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar instansi dan / atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan visi misi dalam menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang digambarkan melalui peta proses bisnis dibawah ini :

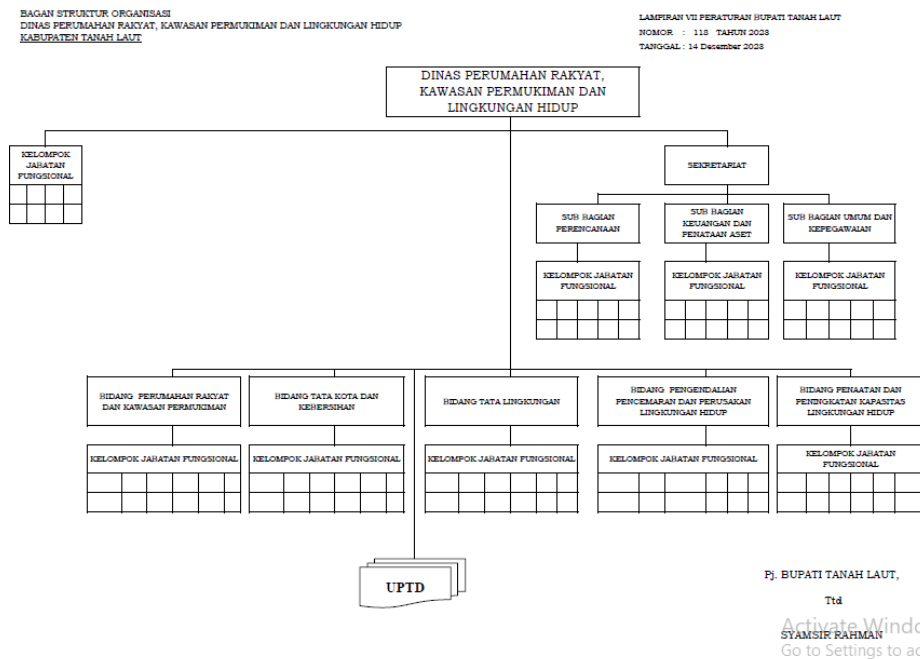
Peta Proses Bisnis Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)
Kabupaten Tanah Laut



2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

dan bidang lingkungan hidup serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2025.



Gambar 1.4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, yakni:

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pembinaan upbd dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, program dan anggaran;
- c. Administrasi umum dan kepegawaian; dan
- d. Ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- d. Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan, dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i. Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Renja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Perumusan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Pelaksanaan kebijakan data dan perencanaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan, pengawasan perumahanrakyat, dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan kebijakan penerangan jalan perumahan dan permukiman;
- h. Pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- i. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Tata Kota

Bidang Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang tata kota mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Renja bidang tata kota;
- b. Perumusan kebijakan di bidang tata kota;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang tata kota;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kota;
- e. Pelaksanaan kebijakan pertamanan dan ruang terbuka hijau;

- f. Pembukuan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bidang tata kota;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemanfaatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang tata lingkungan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Renja bidang tata lingkungan;
- b. Perumusan kebijakan bidang tata lingkungan;
- c. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- d. Penyusunan dokumen RPPLH;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- g. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- h. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- i. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup seperti produk domestik bruto hijau dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme intensif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
- j. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang tata lingkungan;

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Renja bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan; pelaksanaan kebijakan pencemaran lingkungan;
- f. Pelaksanaan kebijakan kerusakan lingkungan;
- g. Pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bidang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- i. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Renja bidang pengendalian penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Perumusan kebijakan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- f. Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- h. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bidang Perumahan Rakyat, dan Permukiman							
1	Penyediaan rumah yang menerima layanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat (rumah korban bencana)	Masih terdapatnya rumah di kawasan rawan bencana, di lokasi yang menimbulkan bahaya dan rumah	Pengendalian dan penanganan bencana	Permukiman informal sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir, panas ekstrem, dan kenaikan permukaan laut	pembangunan perumahan yang tidak memperhatikan tata ruang dan resiko bencana meningkatkan resiko bencana dan kerentanan rumah terhadap kerusakan	beberapa wilayah memiliki Kerentanan terhadap bencana alam	ketersediaan dan keterjangkauan perumahan yang layak
2	Penyediaan rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan pembangunan rumah baru layak huni	Masih terdapatnya rumah tidak layak huni	Kehidupan sehat dan sejahtera	rumah tidak layak huni sebagai sumber polusi dan degradasi lingkungan	kondisi fisik rumah yang tidak memenuhi standar lingkungan sehat	kondisi fisik rumah yang tidak aman dan tidak memenuhi standar memberikan dampak buruk pada kesehatan	ketersediaan dan keterjangkauan perumahan yang layak

						dan kualitas hidup penghuninya	
3	Penerbitan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (rencana tapak / siteplan)	Masih adanya angka backlog kependhunian	Peningkatan kualitas lingkungan	Kesenjangan dalam akses terhadap perumahan layak huni dan berkualitas, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah	Jumlah rumah yang dibutuhkan masih lebih banyak daripada yang tersedia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah rumah yang dibutuhkan masih lebih banyak daripada yang tersedia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah	pengembangan perumahan dan permukiman berkelanjutan

4	Peningkatan kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani	Masih terdapatnya kawasan kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang menimbulkan pencemaran lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan	kawasan kumuh sering tumbuh tanpa perencanaan, izin dan infrastruktur dasar	Permukiman kumuh dengan kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memadai	Permukiman kumuh dengan kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memadai sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan	peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
5	penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum (PSU) di perumahan	Masih terdapatnya kawasan perumahan tanpa diiringi penyediaan PSU yang memadai	penyediaan dan peningkatan infrastruktur ramah lingkungan	banyaknya kawasan perumahan baru tanpa diiringi penyediaan PSU yang memadai	Kekurangan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan penanganan sampah yang memadai	Pengembang sering mengabaikan kewajiban penyediaan PSU, atau menyerahkan aset PSU yang belum layak ke pemerintah daerah	penyediaan infrastuktur dasar permukiman yang memadai
Bidang Tata Lingkungan							
1	Penyusunan Dokumen yang mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Belum tersedianya data secara lengkap untuk perencanaan pengelolaan dan	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi,	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla,	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri,

		perlindungan lingkungan hidup		hujan asam	polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Perkebunan dan Pertambangan
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Belum tersedianya dokumen KLHS RPJMD	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

					pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	
3	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk menyusun dokumen lingkungan dan mengelola lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

						dan sosial)	
1	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Semakin kompleks permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan	Tidak adanya tenaga analis dokumen lingkungan yang berkompeten	Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup dikarenakan adanya regulasi baru, diantaranya UU nomor 11 tahun 202, PP nomor 22 tahun 2021 dan turunannya.	Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup dikarenakan adanya regulasi baru, diantaranya UU nomor 11 tahun 202, PP nomor 22 tahun 2021 dan turunannya.	Kurangnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup dikarenakan adanya regulasi baru, diantaranya UU nomor 11 tahun 202, PP nomor 22 tahun 2021 dan turunannya.	Bertambah banyaknya pelaku usaha baru yang menimbulkan dampak besar/penting terhadap Lingkungan hidup
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Diperlukan adanya TPST di setiap kecamatan	Meminimalisir penumpukan tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga daerah permukiman masyarakat	Meningkatkan layanan persampahan kepada masyarakat, serta meminimalisir tumpukan sampah di TPS	Meningkatkan layanan persampahan kepada masyarakat, serta meminimalisir tumpukan sampah di TPS	Meningkatkan layanan persampahan kepada masyarakat, serta meminimalisir tumpukan sampah di TPS	Meminimalisir terlalu penuhnya sampah yang ada di TPA

3	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Rendahnya Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pemanasan Global, Perubahan Iklim, Kerusakan Lapisan Ozon, Hujan Asam	Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan	Kebakaran Hutan dan Lahan, Kerusakan Lingkungan	Penurunan Kualitas Lingkungan
4	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kurangnya pendidikan dan pemahaman lingkungan kepada generasi muda	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan
5	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup,	Rendahnya ketaatan Pelaku Usaha dan/atau	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Pencemaran air, udara dan penurunan	Deforestasi dan degradasi hutan,	Deforestasi dan degradasi hutan yang intensif,	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

	Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan terhadap Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup		tutupan lahan (Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	kebakaran hutan dan lahan/karhutla, polusi air, polusi udara, sampah, dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan	pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial	Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan
6	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Tidak terlaporkannya permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga tidak tertangani	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati,	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

					abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN & PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
1	Pengendalian Pencemaran Udara dan Air	Penurunan Kualitas Lingkungan	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

2	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Belum tersampaikan secara merata informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik, kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran, polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi atau Inventarisasi Kerusakan Lahan	Masih adanya peralihan fungsi tanah pertanian menjadi lahan kering/permukiman, masih adanya lahan kritis yang belum di rehabilitasi	Peningkatan kualitas lingkungan	Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, polusi, deforestasi, hujan asam	Deforestasi dan degradasi hutan, kebakaran hutan dan lahan/kahutla, polusi air, polusi udara, sampah dan polusi plastik,	deforestasi dan degradasi hutan yang intensif, pertambangan batubara dan dampak lingkungan, degradasi lahan gambut dan kebakaran,	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Industri, Perkebunan dan Pertambangan

					kehilangan keanekaragaman hayati, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, pertambangan dan dampak lingkungan)	polusi sungai dan sumber air, abrasi pantai dan kenaikan permukaan air laut, kehilangan keanekaragaman hayati lokal, konflik agraria dan sosial)	
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN							
1	Re akreditasi KAN ruang lingkup pengujian parameter air	Kekurangan SDM Personel yang relevan dengan Bidang Laboratorium	tidak optimalnya mekanisme penguji kualitas lingkungan	Meningkatkan kualitas hasil pengujian, kepercayaan pelanggan, mengurangi risiko kesalahan	Tidak tercapainya syarat dan ketentuan dari KAN	Tidak dapat mendukung pengujian kualitas lingkungan yang berdampak pada tercapainya PAD	Penambahan personel yang kompeten pada Bidang Laboratorium
2	Sosialisasi kepada pelaku usaha kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha, karna anggaran bidang Laboratorium	Pelaku usaha di kabupaten Tanah Laut akan melakukan pengujian ke Laboratorium daerah lain	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang dampak lingkungan termasuk polusi udara dan pengelolaan	Tidak tercapainya syarat dan ketentuan dari KAN untuk pengajuan reakreditasi dan penambahan	Tidak tercapainya target PAD Kabuapten Tanah Laut	Penambahan anggaran untuk sosialisasi kepada pelaku usaha kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Laut

		terfokus kepada penambahan ruang lingkup parameter udara		limbah, yang dapat mempengaruhi kualitas air	ruang lingkup		
UPT KEBERSIHAN							
1	Lahan Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Bakunci Tidak Mencukupi	Kapasitas lahan TPA Bakunci semakin terbatas, sementara volume sampah yang masuk terus meningkat, menyebabkan penumpukan dan pengelolaan yang tidak optimal.	Optimalisasi sistem pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA, seperti pemilahan dari sumber dan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah.	Tren global dalam pengurangan limbah dan pengelolaan sampah berbasis teknologi canggih, seperti waste-to-energy (mengubah sampah menjadi energi) untuk mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional.	Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA serta upaya dalam mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern.	Tantangan dalam menyediakan lahan baru untuk TPA, terutama di daerah yang mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi pesat, yang meningkatkan produksi sampah.	Pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai alternatif untuk mengurangi beban TPA, dengan menerapkan sistem pemilahan dan daur ulang yang lebih efektif.
2	Pengamanan Aset yang berada di TPA Bakunci	Kurangnya sistem pengamanan aset seperti alat berat, kendaraan	Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi,	Penerapan standar pengelolaan aset dan infrastruktur di	Implementasi kebijakan tata kelola aset negara yang mengedepankan	Perlunya peningkatan pengamanan aset di TPA Bakunci akibat	Peningkatan sistem keamanan melalui pemasangan

		operasional, dan infrastruktur di TPA Bakunci, yang rentan terhadap pencurian atau kerusakan.	seperti pemasangan CCTV dan pencatatan digital terhadap aset untuk meminimalkan risiko kehilangan dan kerusakan.	TPA yang lebih modern serta berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan.	n transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pemanfaatan aset di fasilitas umum seperti TPA.	pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas di sekitar lokasi yang dapat meningkatkan potensi gangguan keamanan.	pagar, penempatan petugas keamanan, serta pengaturan akses masuk dan keluar dari area TPA.
3	Saluran Air Hujan TPA Bakunci menimbulkan pengikisan tanah	Erosi tanah akibat aliran air hujan yang tidak terkelola dengan baik di sekitar TPA Bakunci, berpotensi merusak struktur lahan dan mempercepat degradasi lingkungan.	Perlunya sistem pengelolaan air hujan yang baik di TPA untuk mencegah pengikisan tanah dan perembesan air lindi yang dapat mencemari lingkungan.	Perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem, memperparah risiko erosi dan degradasi lahan di area pembuangan sampah.	Peningkatan regulasi terkait pengelolaan air hujan dan mitigasi bencana lingkungan akibat buruknya sistem drainase di fasilitas pembuangan sampah.	Dampak dari tingginya curah hujan lokal yang mempercepat erosi di sekitar TPA Bakunci, sehingga memerlukan strategi penanganan khusus untuk mengendalikan dampak lingkungan.	Penguatan sistem drainase di TPA untuk mengalirkan air hujan secara lebih terkendali dan mencegah pengikisan tanah.
4	Alat Berat (Dozer, Exavator dan loader), lahan parkir alat berat yang berada di	Terbatasnya lahan parkir yang memadai untuk alat berat seperti	Pengelolaan lahan parkir alat berat yang ramah	Peningkatan regulasi terkait emisi alat berat serta dorongan	Implementasi kebijakan tentang penggunaan	Kebutuhan infrastruktur dan pengelolaan alat berat di	Penyediaan lahan parkir yang sesuai standar dengan fasilitas

	Lahan Kerja	dozer, excavator, dan loader di area kerja, menyebabkan kesulitan dalam penyimpanan dan perawatan peralatan.	lingkungan, termasuk sistem drainase yang baik untuk mencegah pencemaran tanah akibat kebocoran oli atau bahan bakar.	untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam sektor konstruksi dan pengelolaan lahan.	alat berat yang lebih efisien energi dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem serta pengelolaan limbah peralatan berat.	daerah yang terus meningkat akibat proyek pembangunan dan pemeliharaan lingkungan, termasuk penyediaan lahan parkir yang sesuai standar.	pengelolaan limbah dan sistem pemeliharaan alat berat untuk memperpanjang umur pakai peralatan.
5	Jalan Lingkungan TPA Bakunci Becek dan rusak	Kerusakan dan kondisi becek pada jalan lingkungan TPA Bakunci disebabkan oleh intensitas kendaraan berat yang tinggi, sistem drainase yang kurang optimal, serta kurangnya pemeliharaan infrastruktur jalan, sehingga menghambat	Kebutuhan perbaikan jalan sebagai bagian dari infrastruktur pendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, serta mitigasi dampak lingkungan akibat genangan air dan lumpur yang dapat mencemari	Perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan curah hujan, memperparah kerusakan jalan dan mempercepat degradasi infrastruktur.	Kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong peningkatan kapasitas TPA serta perbaikan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung.	Peningkatan volume sampah dan aktivitas kendaraan berat di sekitar TPA yang mempercepat kerusakan jalan, serta dampak terhadap masyarakat sekitar akibat akses yang terganggu.	Perbaikan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan pelayanan publik.

		akses operasional pengangkutan sampah dan berpotensi mencemari lingkungan sekitar.	ekosistem sekitar.				
6	Lahan Landasan Contener Sampah Sangat di Perlukan Perkotaan dan Perkecamatan	Keterbatasan lahan untuk landasan kontainer sampah di perkotaan dan kecamatan menyebabkan penumpukan sampah di lokasi yang tidak sesuai, sehingga mengganggu estetika, kesehatan masyarakat, dan pengelolaan sampah yang efektif.	Kebutuhan penyediaan lahan yang memadai sebagai tempat transit sementara sampah sebelum diangkut ke TPA, guna mengurangi dampak pencemaran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.	Urbanisasi yang pesat meningkatkan produksi sampah, sehingga menuntut penyediaan infrastruktur yang lebih baik untuk pengelolaan limbah di daerah perkotaan.	Kebijakan pengelolaan sampah yang mendorong pengurangan sampah di sumber, pemilahan sampah, dan peningkatan fasilitas pengelolaan limbah di setiap daerah.	Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di tingkat kecamatan yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah, sehingga memerlukan landasan kontainer yang strategis dan berkapasitas memadai.	Penyediaan lahan landasan kontainer sampah yang strategis dan sesuai dengan standar pengelolaan lingkungan.
7	Keperluan Masyarakat untuk Membuang Sampah di Protokol	Kurangnya tempat sampah yang memadai di	Penyediaan fasilitas pembuangan	Urbanisasi yang semakin meningkat	Implementasi kebijakan pengurangan	Pertumbuhan kawasan perkotaan dan	Penyediaan tempat sampah yang memadai di

	Jalan dan Taman Kota	sepanjang jalan protokol dan taman kota menyebabkan masyarakat terpaksa membuang sampah sembarangan, yang berakibat pada pencemaran lingkungan dan menurunkan estetika kota.	sampah yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan, termasuk tempat sampah yang cukup, pengelolaan limbah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta sistem pengangkutan yang efisien.	menyebabkan volume sampah di ruang publik bertambah, sehingga membutuhkan strategi pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.	sampah plastik dan pengelolaan sampah perkotaan yang lebih terintegrasi, termasuk penyediaan infrastruktur yang memadai di area publik.	peningkatan aktivitas masyarakat di jalan protokol dan taman kota menuntut adanya peningkatan layanan kebersihan dan sistem pengangkutan sampah yang lebih optimal.	area strategis seperti jalan protokol dan taman kota dengan sistem pemilahan sampah yang baik.
8	Pengurangan Jumlah Sampah An-Organik ke TPA Bakunci	Volume sampah anorganik yang terus meningkat menyebabkan kapasitas TPA Bakunci semakin terbatas dan mempercepat umur operasionalnya.	Penguatan kebijakan pengelolaan sampah berbasis prinsip Circular Economy untuk mengurangi jumlah sampah anorganik	Peningkatan produksi plastik dan sampah anorganik akibat gaya hidup konsumtif, serta dampak pencemaran mikroplastik terhadap ekosistem global.	Implementasi kebijakan nasional tentang pengurangan sampah plastik, termasuk pembatasan penggunaan kantong plastik dan peningkatan sistem	Penumpukan sampah anorganik di TPA yang berdampak pada pencemaran tanah dan air, serta perlunya penguatan program pengelolaan sampah di	Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis Circular Economy untuk mengurangi ketergantungan pada TPA sebagai tempat pembuangan akhir.

			yang masuk ke TPA melalui daur ulang, pemanfaatan kembali, dan pengolahan limbah secara inovatif.		pengelolaan limbah anorganik berbasis daur ulang.	tingkat desa dan kecamatan.	
9	Diperlukannya Lahan Untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	Keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST menghambat pengelolaan sampah yang lebih efektif, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat produksi sampah yang tinggi.	Pengembangan TPST sejalan dengan prinsip reduksi sampah di sumber, pemilahan sampah, dan penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah.	Krisis pengelolaan sampah di berbagai negara, terutama terkait sampah plastik dan limbah rumah tangga, yang mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan	Kebijakan nasional tentang pengurangan sampah di sumber dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah berbasis teknologi, termasuk pengembangan TPST di berbagai daerah untuk mengurangi beban TPA.	Peningkatan volume sampah di tingkat lokal akibat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi, sehingga membutuhkan fasilitas TPST untuk menampung, memilah, dan mengolah sampah sebelum masuk ke TPA.	Penyediaan dan pemanfaatan lahan yang strategis untuk pembangunan TPST guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.
TATA KOTA							

1	Pembangunan Taman/RTH/RTP Kota di Kota Pelaihari	Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP	Perencanaan tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan	isu pemanasan global menjadi dasar pembangunan Taman/RTH/RTP Kota di Kota Pelaihari	memenuhi amanat UU no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa luas proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota	meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan berkurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menambah RTH
2	Penanganan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman/RTH/RTP	Kurangnya jumlah tenaga lapangan untuk Penanganan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman/RTH/RTP, dikarenakan jumlah luasan sarana/prasarana yang terus bertambah	partisipasi masyarakat yang minim dalam menjaga dan memelihara Taman/RTH	perubahan iklim dan ketahanan kota mempengaruhi kondisi sarana dan prasarana Taman	lemahnya koordinasi antar K/L/D/I tentang pengelolaan Taman/RTH	kurangnya tenaga SDM untuk memonitoring kondisi taman/RTH	menghitung perbandingan jumlah tenaga lapangan dengan jumlah luasan sarana/prasarana yang ada-mengatur kembali pembagian tugas tenaga lapangan untuk Penanganan/ Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman/RTH/RTP

3	Penambahan Sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP untuk kenyamanan Masyarakat	Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP untuk kenyamanan Masyarakat	penyediaan dan peningkatan infrastruktur ramah lingkungan	Bayak taman masih dibangun dengan pendekatan konvensional, tidak memperhatikan efisiensi air, energi, dan keberlanjutan material	belum terpenuhinya target minimal 30% RTH di perkotaan (20% publik, 10% privat) dan taman publik yang ada belum merata spasial	taman sering tidak mencerminkan kekayaan budaya lokal kalimantan	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menambah RTH
4	Penambahan luasan RTH terbangun	Belum meratanya pembangunan sarana dan prasarana di Taman/RTH/RTP	perencanaan taman selalu dikaitkan dengan perencanaan tata ruang	penambahan taman sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kualitas hidup di wilayah perkotaan	pertumbuhan penduduk yang pesat tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan ruang terbuka hijau	belum kuatnya regulasi mengenai peraturan pembangunan Taman/RTH	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk menambah RTH

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 245 orang yang terdiri dari 50 PNS, 16 PPPK penuh waktu dan 179 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

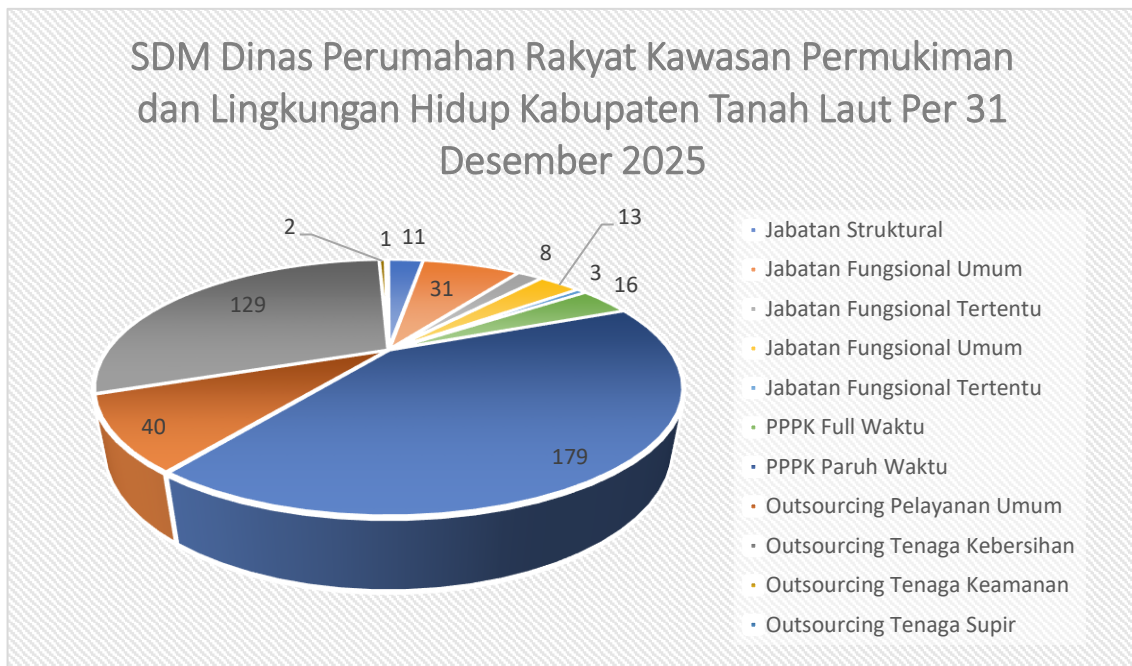
PNS Golongan				PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Total	Pendidikan						Total
IV	III	II	I				S2	S1/ DIV	D-III/ D-II	SLTA	SLTP	SD	
5	23	21	1	16	179	245	8	16	3	18	4	1	50

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup sesuai peta jabatan adalah 74 (tujuh puluh empat) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 76 (tujuh puluh enam) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan prima serta

mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa terdapat 11 Pejabat struktural, 8 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 31 orang fungsional umum (JFU) dan 16 orang PPPK dengan 13 orang jabatan fungsional umum, 3 orang jabatan fungsional tertentu dan 40 orang tenaga outsourcing pelayanan umum, 129 orang outsourcing tenaga kebersihan, 2 orang outsourcing tenaga keamanan dan 1 orang outsourcing tenaga supir.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 4 unit gedung kantor, 2 mushalla dan 2 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 7 unit kendaraan roda empat, 15 unit roda enam dan kendaraan roda dua 15 unit.

**Program, dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun
Anggaran 2025**

No.	Program, Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Penanggung Jawab
	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	109.660.563.835,62	124.912.385.742,23	Kepala DPRKPLH
	Program Pengembangan Perumahan	1.397.440.000,00	1.369.120.422,15	Kabid Perkim
	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana/Relokasi Program Kabupaten/Kota	69.300.000,00	58.230.422,15	Kabid Perkim
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.308.140.000,00	1.300.920.000,00	Kabid Perkim
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	20.000.000,00	9.970.000,00	Kabid Perkim
	Program Kawasan Permukiman	9.616.000.000,00	9.585.270.000,00	Kabid Perkim
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha	35.000.000,00	35.000.000,00	Kabid Perkim
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10(Sepuluh) Ha	9.581.000.000,00	9.550.270.000,00	Kabid Perkim
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	5.000.000.000,00	4.977.480.000,00	Kabid Perkim
	Pencegahan Perumahan dan	5.000.000.000,00	4.977.480.000,00	Kabid Perkim

	Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	43.710.053.683,69	53.093.177.751,40	Kabid Perkim
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	43.710.053.683,69	53.093.177.751,40	Kabid Perkim
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	175.120.152,98	217.047.044,02	Kabid Taling
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	175.120.152,98	217.047.044,02	Kabid Taling
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	6.008.426.319,23	5.583.741.378,15	Kabid P3LH dan Kepala UPTD Laboratorium
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5.662.068.583,01	5.272.140.125,15	Kabid P3LH dan Kepala UPTD Laboratorium
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	60.324.500,22	44.106.137,00	Kabid P3LH
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	286.033.236,00	267.495.116,00	Kabid P3LH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.042.079.454,02	4.838.321.070,48	Kabid Tata Kota
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.042.079.454,02	4.838.321.070,48	Kabid Tata Kota
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	263.017.089,85	167.250.264,67	Kabid P2KLH

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	263.017.089,85	167.250.264,67	Kabid P2KLH
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	43.946.214,43	56.222.570,84	Kabid P2KLH
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.946.214,43	56.222.570,84	Kabid P2KLH
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	106.819.489,73	76.572.276,11	Kabid P2KLH
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	106.819.489,73	76.572.276,11	Kabid P2KLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	194.930.819,60	156.696.585,98	Kabid P2KLH
	Pengelolaan Sampah	194.930.819,60	156.696.585,98	Kabid P2KLH
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	17.836.849.915,69	20.432.654.959,48	Kepala UPTD Kebersihan
	Pengelolaan Sampah	17.836.849.915,69	20.432.654.959,48	Kepala UPTD Kebersihan

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 700.1.2.1/216/LHE AKIP/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025, dengan nilai 78,88 predikat BB kategori

Sangat Baik, bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu :

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan perbaikan yang perlu dilakukan.	Telah dilaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulannya berdasarkan bukti undangan terlampir	12 Bulan	Januari - September 2025	Pokja di Inspektorat dan Pokja di Bapperida	Telah dilaksanakan rapat evaluasi monitoring setiap triwulan https://drive.google.com/file/d/1p3X62VJgO9271Y4-o9_a6-Hyk-4lYkyz/view?usp=drive_link
2	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/outcome kinerja perangkat daerah.	Disusunnya PK Perubahan 2025 yang sesuai dengan Renstra 2025 - 2029	6 Bulan	Januari - Juni 2025	Pokja di Inspektorat	Telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja sesuai Renstra 2025 - 2029 pada tanggal 02 September 2025 https://drive.google.com/file/d/1p3X62VJgO9271Y4-o9_a6-Hyk-4lYkyz/view?usp=drive_link
3	Melakukan pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.	Telah dilaksanakan penilaian terhadap pegawai pada aplikasi e-kinerja yang dibuktikan dengan screenshot penilaian	12 Bulan	Januari - Desember 2025	Kepala Dinas Perkim&LH beserta jajarannya	Telah dilaksanakan penilaian pada aplikasi e-kinerja https://drive.google.com/file/d/1p3X62VJgO9271Y4-o9_a6-Hyk-4lYkyz/view?usp=drive_link

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
4	Agar menyusun pembuatan Peraturan Kepala Daerah mengenai mekanisme, tanggung jawab, metode, serta standar kualitas data.	Penyusunan Perbup Lakip	2 Bulan	Desember 2025-Januari 2026	Kepala Dinas Perkim&LH, Sekretaris	Akan dilaksanakan pada tahun 2026 https://drive.google.com/file/d/1p3X62VJgO9271Y4-o9_a6-Hyk-4lYkyz/view?usp=drive_link

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024 dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup .

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan demikian Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup diharapkan mampu menampilkan :

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan

Visi yang telah dirumuskan tersebut. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup menetapkan Misi sebagai gambaran aktivitas yang sudah seharusnya dilaksanakan. Dengan Misi maka akan terlihat secara jelas kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana cara memenuhinya.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi
2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengemban Misi ke: 2 “Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas”.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga

keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup termasuk dalam mendukung tujuan ketiga yaitu Meningkatkan kualitas infrastruktur berkelanjutan dengan indikator Penurunan intensitas emisi GRK dan sasaran yaitu Meningkatnya Pemerataan infrastuktur dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. Adapun indikator keberhasilan dari sasaran Meningkatnya Pemerataan infrastuktur adalah Indeks Infrastruktur Daerah. Sedangkan indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup adalah Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan

Lingkungan Hidup adalah Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman dan Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan.

Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Infrastruktur (Angka)	49,55	54,21	55	57	59	60	60
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	0	2,05	2,01	1,88	1,75	1,62	1,46
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	68,57	70,16	70,25	70,34	70,44	70,53	70,6
1.	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	40,9	42	43	44	45	47	50
		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (Nilai)	49,55	54,21	55	57	59	60	60
2.	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)	0	503.416,22	553.236,73	605.871,01	662.468,73	720.230,16	781.285,85
		Indeks Kualitas Air (Indeks)	50	71,27	71,37	71,47	71,57	71,67	71,77
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	98,72	71,82	71,92	72,02	72,12	72,22	72,32
		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	44,67	65,17	65,24	65,31	65,48	65,60	65,72

1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	<p>Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah persentase jumlah rumah tangga yang menempati atau memiliki hunian yang memenuhi standar kelayakan fisik, kesehatan, keamanan, serta keterjangkauan biaya, dibandingkan dengan total seluruh rumah tangga di suatu wilayah pada periode tertentu.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan hunian layak dan}}{\text{Total Jumlah Rumah tangga}} \times 100\%$
		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (Nilai)	<p>Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah nilai komposit yang menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di suatu wilayah dalam periode tertentu.</p> <p>Rumus Perhitungan:</p> $\frac{\sum_i^n = 1(I_i \times B_i)}{\sum_i^n = 1B_i}$ <p>Keterangan Rumus :</p> <p>I_i = Nilai indikator ke-i (dalam skala 0–100 atau 0–1)</p> <p>B_i = Bobot indikator ke-i</p> <p>n = Jumlah indikator penyusun indeks</p> <p>Jika bobot setiap indikator sama, maka rumus dapat disederhanakan menjadi rata-rata sederhana.</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
2.	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)	<p>Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif adalah total akumulasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca yang berhasil dicapai dari pelaksanaan berbagai program, kegiatan, dan aksi mitigasi pada sektor-sektor terkait (seperti energi, transportasi, perumahan dan permukiman, limbah, serta kehutanan) selama periode waktu tertentu, yang dinyatakan dalam satuan ton CO₂ ekuivalen (ton CO₂e).</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $\sum_{t=1}^n (Emisi\ Baseline_t - Emisi\ Aktual_t)$ <p>Keterangan Rumus :</p> <p><i>Emisi Baseline_t</i> = Perkiraan emisi GRK pada tahun ke-t tanpa adanya aksi mitigasi (Business As Usual/BAU)</p> <p><i>Emisi Aktual_t</i> = Emisi GRK yang dihasilkan setelah implementasi program atau aksi mitigasi pada tahun ke-t</p> <p>t = Tahun pelaksanaan (1, 2, 3, ..., n)</p> <p>n = Jumlah tahun periode penghitungan</p> <p>Satuan= Ton CO₂ ekuivalen (ton CO₂e)</p>
		Indeks Kualitas Air (Indeks)	<p>Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang digunakan saat ini adalah hasil pengembangan indeks kualitas air berbasis formulasi dari National Sanitation Foundation – Water Quality Index (NSF-WQI) yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia melalui pengambilan keputusan dengan metode Delphi. Rumusan tersebut digunakan untuk perhitungan indeks kualitas air sungai dan indeks kualitas air danau.</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $IKA\ Kab./Kota = \frac{\sum_i^n IKA\ Titik\ Pantau_i}{Jumlah\ Titik\ Pantau}$
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	<p>Pada tahun 2025 perhitungan IKU perlu dilakukan penyesuaian acuan baku mutu udara ambien sesuai PP 22 Tahun 2021 Lampiran VII karena sebelumnya masih mengacu pada baku mutu udara ambien Eu yang mana perhitungan IKU masih menggunakan data dari dua parameter gas yaitu NO₂ dan SO₂, yang diperoleh dari hasil pengukuran udara dengan metode passive sampler. dua parameter gas tersebut belum</p>

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
			<p>dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan, transportasi, debu jalanan dan konstruksi yang menghasilkan parameter PM 2,5 yang lebih dominan. Sehingga pada tahun 2025 perhitungan IKU (Indeks kualitas Udara) merupakan hasil dari pemantauan kualitas udara dengan parameter gas NO₂ dan SO₂ dengan penambahan parameter PM 2,5 dari stasiun AQMS KLHK yang terdekat dari Kabupaten.</p> <p>Adapun perhitungan IKU baru menggunakan rumusan terbaru sebagai berikut :</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$ $I_{INA1} = \text{Rata - rata (Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2,5}$ $\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Rata - rata NO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Rata - rata SO}_2}{\text{Baku Mutu INA}}$ $\text{Indeks PM}_{2,5} = \frac{\text{Rata - rata PM}_{2,5}}{\text{Baku Mutu INA}}$
		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	<p>Perhitungan IKL dilakukan dengan menghitung kualitas tutupan lahan yang termasuk dalam 23 (dua puluh tiga) kelas tutupan sebagaimana pada Tabel 3 dan memasukkan faktor koreksi gambut pada fungsi lindung dan fungsi budidaya bagi Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang memiliki lahan gambut. Rumus perhitungan dari Indeks Kualitas Lahan adalah sebagai berikut:</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> $IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut}$ $IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$ <p>dimana,</p> <p>TL : Tutupan lahan</p> <p>C : Koefisien kelas tutupan lahan</p>

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
1	2	3	4	5
1	Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan kampanye menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemicuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah 2. Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyediaan maupun rehabilitasi rumah layak huni melalui kewenangan kumuh dan pencegahan kumuh (di luar kumuh) 3. Sosialisasi dan promosi dalam efisiensi penggunaan energi 	<p>Peningkatan peran DPRKPLH dalam mengoptimalkan kualitas kebersihan dan kenyamanan lingkungan</p> <p>Peningkatan kualitas kebersihan kenyamanan lingkungan</p> <p>Melakukan Sosialisasi di bidang kebersihan dan lingkungan</p> <p>Melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>Mensosialisasikan peraturan perundang- undangan kebersihan dan lingkungan kepada masyarakat/ pihak swasta</p> <p>Membuat Kajian Rencana terhadap RTH, Membuat Komunitas Hijau, dan Perluasan ruang terbuka Hijau skala Kabupaten</p> <p>Pengintegrasian perencanaan pembangunan yang Berwawasan lingkungan dan Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</p>	LINGKUNGAN HIDUP

			Meningkatkan sinergi dan evektifitas pengelolaan sumber daya alam dan lngkungan hidup dengan instansi terkait	
			Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan selanjutnya	
			Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengeloalaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	
			Pengendalian dampak perubahan iklim, Mengembangkan sistem informasi pengeloalaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	
			Pembentukan pos pengaduan untuk pelayan pengaduan, Pembentukan Tim penanganan pengaduan dan Penerapan sanksi administrasi bagi pengaduan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan	
			Pembentukan kelembagaan masyarakat sebagai wadah pengelolaan lingkungan hidup serta Edukasi Lingkungan tentang pemanfaatan sampah	

			Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau	
2			<p>Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ,pemeliharaan/ rehabilitasi fasilitas prasaana, sarana dan utilitas (PSU) Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman</p> <p>Melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berprasaran dasar</p> <p>Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan dan permukiman, dengan fokus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR</p> <p>Mengefektifkan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan perumahan rakyat dan permukiman, dengan fokus korban bencana</p>	PERKIM

3	<p>Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle dan Pusat Daur Ulang- Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/ black soldier fly, refuse derived fuel, waste the energy, pirolisis, dan lain- lain), dan pengintegrasian sektor informal, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan off-taker hasil olahan sampah</p>	<p>Menyediakan sarana prasarana pengolahan sampah yang memadai melalui pengolahan dan pemilahan, daur ulang sampah agar lebih efisien</p>	UPT Kebersihan
	<p>Mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi dan kampanye menuju budaya literasi sampah yang diawali dari pemicuan, pemilahan, dan pengurangan sampah yang harus konsisten dan terintegrasi dengan sistem pengumpulan dan pengangkutan yang terpilah, serta pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna sesuai kondisi masing-masing daerah</p>	<p>Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha tentang pentingnya pemilahan sampah</p>	
	<p>Optimalisasi TPA dalam pengelolaan limbah domestik secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem sanitary landfill</p>	<p>Melakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas pemrosesan akhir (TPA), fasilitas pengolahan limbah di TPA</p>	

NO	WILAYAH	ARAHAN KEBIJAKAN RPJMD	INTERVENSI STRATEGIS	KET
1	2	3	4	5
1	TPA Bakunci	Penyediaan dan revitalisasi sarana prasarana (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle dan Pusat Daur Ulang-Rumah Kompos, dan lain-lain), penggunaan teknologi tepat guna (komposting, maggot/ black soldier fly, refuse derived fuel, waste the energy, pirolisis, dan lain-lain), dan pengintegrasian sektor informal, optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan memastikan off-taker hasil olahan sampah	Lokus kegiatan UPTD Kebersihan difokuskan pada TPA Bakunci, TPS di seluruh kecamatan, TPST, TPS3R, Bank Sampah, serta ruang-ruang publik dan kawasan permukiman, yang menjadi titik krusial dalam rantai pengelolaan sampah, mulai dari sumber hingga ke proses pemrosesan akhir.	UPT KEBERSIHAN
2	TPA Bakunci		Intervensi strategis dilakukan melalui penguatan sarana dan prasarana operasional, seperti penambahan dan pemeliharaan armada angkut, alat berat di TPA, peningkatan fasilitas TPS/TPST, pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan data persampahan, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas lapangan.	

3	Desa, Permukiman dan Sekolah di Kabupaten Tanah Laut		Pendekatan partisipatif juga menjadi strategi kunci, melalui pemberdayaan masyarakat lewat Bank Sampah, edukasi pemilahan sampah dari rumah, kampanye kebersihan di sekolah dan komunitas, serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan pengelolaan persampahan yang efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan.	
4	Kabupaten Tanah Laut	Pemerintah kabupaten/kota melakukan penyediaan maupun rehabilitasi rumah layak huni melalui kewenangan kumuh dan pencegahan kumuh (di luar kumuh)	Menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan/atau pembangunan layak huni di wilayah kewenangan kumuh maupun untuk pencegahan kumuh	PERKIM

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Target
IKU KEPALA DINAS				

1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	54,21
		2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	42
2	Meningkatnya kualitas air udara dan lahan	1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	503.416,22 TON CO2 EQ
		2	Indeks Kualitas Air	71,27 Indeks
		3	Indeks Kualitas Udara	71,82 Indeks
		4	Indeks Kualitas Lahan	65,17

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 2 sasaran di atas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup didukung dengan dengan APBD sebesar **Rp124.912.385.742,23** (*Termasuk Program Sekretariat*). Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	1.369.120.422,15
		Program Kawasan Permukiman	9.585.270.000,00

		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.977.480.000,00
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	53.093.177.751,40
2	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	217.047.044,02
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.583.741.378,15
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	4.838.321.070,48
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	167.250.264,67
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	56.222.570,84
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	76.572.276,11
		Program Pengelolaan Persampahan	20.589.351.545,46
JUMLAH			100.553.554.323,28

Selain itu, terdapat Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menunjang kegiatan internal sekretariat sebesar **Rp24.358.831.418,95.**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 terdapat 2 sasaran

dengan 6 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109,06%

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas							
No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
				Target	Realisasi	Capaian	Kategori
IKU KEPALA DINAS							
1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	42	98.34	223,71%	Sangat Tinggi
		2	Indeks Infrastruktur	54,21	51,32	94,66%	Sangat Tinggi

2	Meningkatnya kualitas air udara dan lahan	1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	503.416,22 TON CO2 EQ	Tidak dapat dilakukan perhitungan	Tidak dapat dilakukan perhitungan	Tidak dapat dilakukan perhitungan
		2	Indeks Kualitas Air	71,27 Indeks	74,02	103,8%	Sangat Tinggi
		3	Indeks Kualitas Udara	71,82 Indeks	84,42	117,5%	Sangat Tinggi
		4	Indeks Kualitas Lahan	65,17	65,43	100,3%	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja 2025						109,06%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 2 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 6 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokkan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya</i> <i>jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100% Target
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	
Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100% Realisasi

	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> 100% Realisasi	X
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian		

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1

Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas** Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu:

1. Indeks Infrastruktur (Angka)
2. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Infrastruktur	Angka	54,21
		Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	2,05
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Nilai	70,16

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman
2. Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman

Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman diukur melalui 2 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	96,57	97	40,90	42	98.34	223,71%
	%	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	-	-	49,55	54,21	51,32	94,66%

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025	159,18%
---------------------------------------	----------------

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	42	98.34	223,71%	47	209,29%
		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	Nilai	54,21	51,32	94,66%	60	85,53%

a. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau adalah ukuran proporsi rumah tangga dalam suatu wilayah yang menempati atau dapat mengakses tempat tinggal yang:

1. Layak huni, yaitu memenuhi standar minimum keselamatan bangunan, kesehatan, kecukupan ruang, ketersediaan air minum, sanitasi, dan lingkungan yang aman; serta
2. Terjangkau, yaitu biaya perolehan atau biaya hunian (sewa/cicilan dan biaya dasar perumahan) tidak membebani secara berlebihan pendapatan rumah tangga, umumnya dalam batas wajar tertentu.

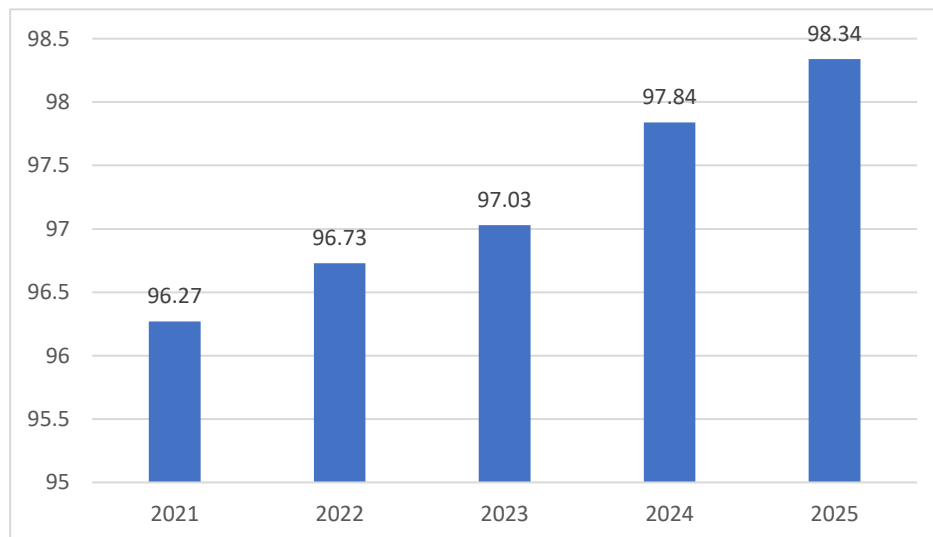
Secara sederhana, indikator ini menggambarkan sejauh mana rumah tangga dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan sesuai kemampuan ekonomi mereka.

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga dengan hunian layak dan terjangkau}}{\text{Total Jumlah Rumah tangga}} \times 100\%$$

$$\frac{107,442 \text{ rumah tangga}}{255 \text{ Rumah tangga}} \times 100\%$$

Secara umum, indikator ini mengukur berapa banyak rumah tangga yang dapat tinggal di hunian yang aman, sehat, memadai, serta dapat dijangkau dari segi biaya. Komponen Utama: Kelayakan Hunian dianggap layak jika memenuhi kriteria seperti: Struktur bangunan aman dan permanen Akses ke air minum layak Akses sanitasi layak Luas lantai memadai Memiliki status penguasaan yang jelas/aman. Keterjangkauan Hunian dikatakan terjangkau jika biaya perumahan tidak melebihi persentase tertentu dari pendapatan rumah tangga, umumnya 30%.

Grafik 3.1.2
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Analisis perbandingan kinerja menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak mengalami peningkatan yang stabil dan konsisten dari tahun 2021 hingga perkiraan tahun 2025.

Pada awal periode tahun 2021, terdapat 105.180 rumah tangga yang tercatat memiliki akses hunian layak. Angka ini secara bertahap naik menjadi 105.679 pada tahun 2022, dan 106.004 pada tahun 2023. Peningkatan paling signifikan dalam satu tahun terjadi antara tahun 2023 dan 2024, di mana terjadi penambahan sebanyak 892 rumah tangga, mencapai total 106.896. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2025, dengan proyeksi angka mencapai 107.442 rumah tangga.

Dari perspektif capaian kinerja, persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak terhadap total rumah tangga juga menunjukkan perbaikan yang nyata. Dimulai dari sekitar 96,27% pada tahun 2021, rasio ini meningkat setiap tahun, melewati 97% pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai sekitar 98,34% pada tahun 2025. Kinerja ini secara keseluruhan menggambarkan upaya yang berhasil dalam mendekati target akses hunian layak bagi seluruh rumah tangga.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi kinerja untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun ini menunjukkan angka yang sangat progresif, yakni sebesar 98,34%. Jika disandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 60%, maka tingkat capaian kinerja terhadap target (progres) telah mencapai 209,29%.

b. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan infrastruktur dasar pada kawasan perumahan dan permukiman. Secara umum, indeks ini menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang layak, seperti:

- Jaringan jalan lingkungan,
- Air minum/air bersih,
- Sanitasi dan drainase,
- Pengelolaan limbah,
- Listrik dan penerangan,
- Serta fasilitas pendukung permukiman lainnya.

Indeks ini sering dipakai oleh pemerintah dan perencana wilayah untuk:

- Menilai kondisi dan kesenjangan infrastruktur permukiman antarwilayah,
- Menentukan prioritas pembangunan dan investasi,
- Serta memantau kemajuan pembangunan perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Untuk memperoleh Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum_i^n = 1(I_i \times B_i)}{\sum_i^n = 1B_i}$$

Keterangan Rumus :

I_i = Nilai indikator ke-i (dalam skala 0–100 atau 0–1)

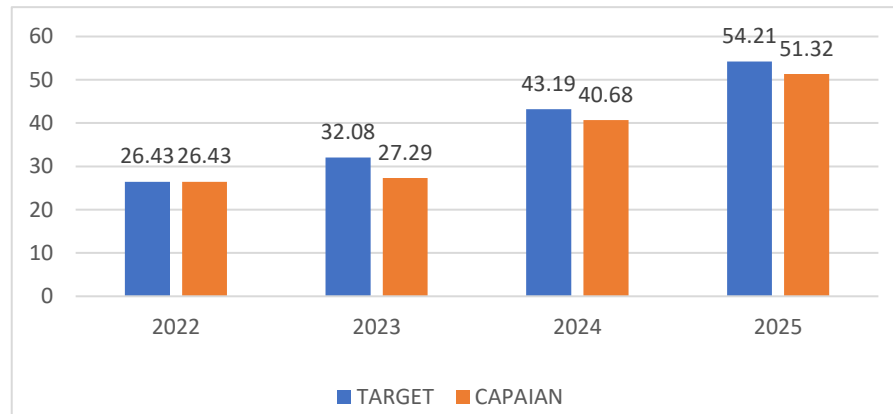
B_i = Bobot indikator ke-i

n = Jumlah indikator penyusun indeks

Jika bobot setiap indikator sama, maka rumus dapat disederhanakan menjadi rata-rata sederhana.

$$\frac{\sum \text{Indeks Perkim}}{\sum \text{Luas Permukiman}} = \frac{1(2803 \times 4616)}{45,5 \times 108,56}$$

Grafik 3.1.2
Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Tahun 2022 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Periode empat tahun dari tahun 2022 hingga 2025 menunjukkan adanya tren positif yang konsisten dalam target dan capaian kinerja Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman. Secara keseluruhan, realisasi kinerja (capaian) berhasil meningkat setiap tahunnya, dimulai dari 26 unit/poin pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya di angka 51,32 pada tahun 2025.

Pada awal periode, tahun 2022 menjadi tahun di mana capaian (26) berhasil memenuhi target yang ditetapkan (26). Namun, pada tahun-tahun berikutnya, meskipun angka capaian terus meningkat, terjadi kesenjangan antara target dan realisasi di lapangan. Pada tahun 2023, capaian (27) berada di bawah target (32). Kesenjangan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana capaian (41) berada di bawah target (43). Puncaknya terjadi pada tahun 2025, dengan target tertinggi (54,21) yang ditetapkan, namun capaian (51,32)

tetap berada di bawah target tersebut, meskipun angka absolutnya adalah yang tertinggi dalam periode ini.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Realisasi kinerja Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman sampai dengan tahun ini belum sepenuhnya memenuhi target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Data menunjukkan bahwa realisasi kinerja aktual berada pada angka 51,32, sementara target yang harus dicapai adalah 54,21. Terdapat kesenjangan (gap) sekitar 2,89 poin antara capaian saat ini dengan target yang diharapkan. Meskipun demikian, angka realisasi 51,32 tersebut merepresentasikan pencapaian substansial, yakni sekitar 94,67% dari keseluruhan target jangka menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar rencana strategis telah dilaksanakan, namun masih dibutuhkan dorongan ekstra untuk menuntaskan sisa target yang belum tercapai.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup “Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman”, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup melaksanakan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan, Peningkatan Kualitas Drainase Jalan Lingkungan, Peningkatan Kualitas Data Pengelolaan Perumahan, Penurunan Rumah Tidak Layak Huni, dan Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Umum pada Kawasan Kumuh Sesuai Standar.

a. Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan

1. Pelaksanaan Perencanaan Jalan Lingkungan.

Kegiatan Perencanaan Jalan Lingkungan merupakan aktivitas pra-konstruksi yang bersifat krusial dalam siklus pembangunan infrastruktur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini mencakup penyusunan dokumen teknis, survei lapangan, dan pemetaan prioritas wilayah permukiman yang akan diintervensi pada tahun anggaran berjalan.

Kegiatan ini difokuskan pada penyusunan Dokumen Inventarisasi Jalan Lingkungan sebagai langkah awal dalam siklus perencanaan makro. Dokumen ini mencakup pendataan kondisi fisik (baik, sedang, rusak ringan, rusak berat), dimensi jalan (panjang dan lebar), jenis perkerasan, serta koordinat geografis jalan di seluruh kawasan permukiman.

Penyusunan dokumen inventarisasi ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran melalui mekanisme berikut:

1. Penyediaan Data Baseline: Dokumen ini berfungsi sebagai database utama (baseline) untuk menentukan volume kebutuhan penanganan infrastruktur secara riil, sehingga target peningkatan infrastruktur dalam Renstra dapat diukur secara akurat.
2. Penentuan Skala Prioritas: Dengan data inventarisasi, Dinas dapat mengalokasikan anggaran pada ruas jalan lingkungan yang memiliki tingkat kerusakan paling parah dan dampak sosial paling luas, sehingga intervensi infrastruktur menjadi lebih tepat sasaran.
3. Validasi Capaian Indikator: Dokumen ini menjadi alat verifikasi untuk mengukur persentase peningkatan kondisi jalan lingkungan dari tahun ke tahun, yang merupakan indikator utama keberhasilan sasaran strategis.

Pada Tahun Anggaran 2025 pelaksanaan inventarisasi telah menghasilkan dokumen komprehensif dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian Output: Tersusunnya Dokumen Inventarisasi Jalan Lingkungan di Kecamatan Takisung, Kurau dan Bumi Makmur
2. Akurasi Data: Terpetakannya 325,77 Kilometer ruas jalan lingkungan yang dikategorikan berdasarkan kondisi eksisting.

2. Peningkatan jalan lingkungan

Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jalan Lingkungan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta menunjang aktivitas sosial dan ekonomi di lingkungan permukiman. Jalan lingkungan memiliki peran strategis sebagai akses utama masyarakat dalam menunjang kegiatan sehari-hari, termasuk akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi.

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi pekerjaan peningkatan dan pembangunan jalan lingkungan pada beberapa lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan skala prioritas dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2025, dilaksanakan peningkatan jalan lingkungan sepanjang 33,160 km dengan sebaran wilayah berada di kecamatan Pelaihari, Bajuin, Bati-Bati, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Panyipatan, Takisung, Tambang Ulang, dan Kurau.

Tabel Data Lokasi Peningkatan Jalan Lingkungan

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
1	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Basuki Rahmat RT.26 RW.07 (Belakang Polsek Pelaihari) Kel.	527,01	406,7

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
			Angsau Kec. Pelaihari		
2	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Pamanaran RT.025 RW.003 Kel. Angsau Kec. Pelaihari	555,73	609,2
3	Pelaihari	Sarang Halang	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt 4 dan Rt 5 Kel Sarang Halang Kec. Pelaihari	293,7	417,8
4	Pelaihari	Atu-atu	Peningkatan Jalan Lingkungan Komp. CIP RT. 006 RW. 002, Ds.Atu-atu Kec.Pelaihari	340,05	407,2
5	Pelaihari	Pelaihari	Peningkatan Jalan Pusaka dan Jalan Dharma Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari	477,82	167,5
6	Pelaihari	Sungai Riam	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari	406,32	391
7	Pelaihari	Ujung Batu	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun II (Ujung Batu Plasma) Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari	218,85	276,5
8	Pelaihari	Ujung Batu	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun II RT.08 Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari	284,11	350,6
9	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang sejahtera Kel. Angsau Kec. Pelaihari	228,22	283

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
10	Pelaihari	Atu-atu	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Kalangkala Komplek CIP Rt 7 Desa Atu-atu Kecamatan Pelaihari	177,87	213,5
11	Pelaihari	Karang Taruna	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Permata Jingga Jalan Merah Delima Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	142,41	185
12	Pelaihari	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan Jln Beramban Raya Rt 21 Rw 07 Gg Ikhlas Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	142,41	174
13	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Dharma RT.14 Kel. Angsau Kec. Pelaihari	160,92	208,2
14	Pelaihari	Sarang Halang	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Berkat Pesona Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	142,41	169,4
15	Pelaihari	Sungai Riam	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 10 Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	142,41	211
16	Pelaihari	Pabahanan	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Padang Raya Gang Dintois RT. 10 RW. 04 Kelurahan Pabahanan Kec. Pelaihari	142,41	165,2
17	Pelaihari	Telaga	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.1 Mantewah Desa Telaga Kec. Pelaihari	142,41	186

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
18	Pelaihari	Pemuda	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.5 Desa Pemuda Kecamatan Pelaihari	160,92	181,6
19	Pelaihari	Panggung	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.14 Desa Panggung Kec. Pelaihari	142,41	139
20	Pelaihari	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Danau Bom RT.04 RW.02 Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari	160,92	195
21	Pelaihari	Sungai Riam	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 9 Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	142,41	211
22	Pelaihari	Atu-Atu	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek CIP Desa Atu - Atu Kec. Pelaihari	142,41	157
23	Pelaihari	Atu-atu	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Bajuin Raya Jl.Kapar Desa Atu atu Kec.Pelaihari pelaihari	142,41	157
24	Pelaihari	Atu-atu	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Anugerah Residence 2 Desa Atu-atu Kec.Pelaihari	65,97	83,5
25	Pelaihari	Sungai Riam	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Riam Rt.17 Kec.Pelaihari	142,41	169
26	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Angsau Dalam Arah Jalan Ke Kuburan Rt.17 Kec.Pelaihari	142,41	196,5

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
27	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Teratai 3 Rt 8 Rw 3 Kel.Angsau	160,92	228
28	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Balerejo Rt 18b Rw 6 Kel.Angsau	160,92	185
29	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt 013 Rw 005 Kel.Angsau Kec.Pelaihari	160,92	207,3
30	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Antesa Rt.5B Kel.Angsau Kec.Pelaihari	160,92	206,5
31	Pelaihari	Pabahanan	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Griya Ziva Pabahanan, Jalan Raya Rt 07 Rw 03 Kel.Pabahanan	160,92	194,5
32	Pelaihari	Panggung	Peningkatan Jalan Lingkungan Aurah Megah Residence Desa Panggung	160,92	201
33	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Beringin RT.2A/RW.1 Kel.Agsau Kec.Pelaihari	160,92	222
34	Pelaihari	Karang Taruna	Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan Anugerah Residence 1 Jl Pemuda Kel.Karang Taruna	142,41	139
35	Pelaihari	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Safira Land Rt 18 Rw 05 Kel.Sarang Halang	160,92	188

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
36	Pelaihari	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan Masjid Nabawi Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari	160,92	140
37	Pelaihari	Angsau	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Parit Baru Rt.27 (Depan Rumah Hendy) Kec.Pelaihari	142,41	178,5
38	Pelaihari	Panggung	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Satol Rt.12/03 Desa Panggung Kec.Pelaihari	142,41	171,6
39	Pelaihari	Pelaihari	Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Graha Karya Bakunci Kel.Karang Taruna	160,92	206,5
40	Pelaihari	Angsau	Pembuatan Paving Jalan Lingkungan Gang Pelita Parit Rt.20 (Samping Kopi House Shine) Kel. Angsau Kec. Pelaihari	139,73	147,5
41	Pelaihari	Karang Taruna	Pembuatan Jalan Lingkungan Paving Block RT.02 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	25,26	42
42	Pelaihari	Angsau	Pembuatan Jalan Lingkungan Paving Block Gang Abdul Hadi/Muhajirin RT. 2b Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	139,73	134
43	Pelaihari	Angsau	Pembuatan Paving Jalan Lingkungan Jl. Sepakat No 14 Rt 16 (GKE MARANATHA PELAIHARI) Kel.Angsau Kec.Pelaihari	157,89	90,6

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
44	Bajuin	Tirta Jaya	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Swadaya Dusun 02 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin	271,26	432
45	Bajuin	Kunyit	Peningkatan Jalan Lingkungan JL. ATILAM RT/RW 005/003 Desa Kunyit Kec. Bajuin	271,26	406,7
46	Bajuin	Ketapang	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.002 RW.002 Desa Ketapang Kec. Bajuin	217,01	309,2
47	Bajuin	Tanjung	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 17 Desa Tanjung Kec. Bajuin	146,41	181,75
48	Bajuin	Tirta Jaya	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.08 Dusun 2 Desa Tirta Jaya 2 Kec. Bajuin	131,54	169
49	Bajuin	Atu Atu	Peningkatan Jalan Lingkungan jalan Arwana Raya Komplek Bajuin Raya Desa Atu Atu Kec. Bajuin	131,54	169
50	Bajuin	Atu Atu	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.09 Desa Atu Atu Kec. Bajuin	131,54	169
51	Bajuin	Galam	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Galam Kec. Bajuin	148,63	194
52	Bajuin	Tirta Jaya	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.12 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	148,63	194
53	Bajuin	Tebing Siring	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 12 Tebing Siring Kec. Bajuin	109,25	125
54	Bajuin	Tirtajaya	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.8 Desa Tirtajaya Kec. Bajuin	131,54	169

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
55	Bajuin	Tebing Siring	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 14 dan RT. 16 Tebing Siring Kec. Bajuin	131,54	172
56	Bajuin	Tanjung	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tanjung 1B Rt.18 Kec.Bajuin	131,54	172
57	Bajuin	Tebing Siring	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun IV Rt.15 Desa Tebing Siring Kec.Bajuin	131,54	171,9
58	Bajuin	Tanjung	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.9 Desa Tanjung Kec.Bajuin	131,54	171,9
59	Bajuin	Tanjung	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tanjung Rt.19 Dusun 4B Kec.Bajuin	131,54	171,8
60	Bati-Bati	Padang	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Batas Desa Padang dan Ujung RT. 14/01 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati	205,17	289,5
61	Bati-bati	Padang	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 2, 7. 8, 6, 14, 10 Desa Padang, kecamatan Bati-Bati	156,74	216
62	Bati-bati	Liang Anggang	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Habib Umar RT. 07, Desa Liang Anggang Kec.Bati-bati	200,23	286,4
63	Bati-bati	Ujung Baru	Peningkatan Jalan Lingkungan rt/rw 004/005 Desa Ujung Baru, Kec.Bati-Bati	257,7	347,4
64	Bati-Bati	Banyu Irang	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Banyu Irang RT.13	205,17	284,8

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
			RT.08 Kecamatan Bati-Bati		
65	Bati-bati	Kait-Kait	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kait-Kait RT. 11 dan 12 Kecamatan Bati-Bati	162,41	530
66	Bati-bati	Bati - Bati	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Nor Amalia Rt.14 Desa Bati-bati Kec.Bati-bati	124,97	169
67	Bati-bati	Padang	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 6 RW.2 Desa Padang Kec. Bati-Bati	124,97	150
68	Bati-bati	Bati - Bati	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Padang Raya RT. 10 Desa Bati-Bati Kec. Bati-Bati	124,97	179,5
69	Bati-bati	Pandahan	Pembuatan Siring Jalan Pelabuhan RT. 1 RW. 1 Desa Pandahan Kec. Bati-Bati	102,44	91
70	Bati-bati	Padang	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Pangeran IV RT.6 RW 2 Desa Padang Kec. Bati-Bati	124,97	157,5
71	Bati-bati	Nusa Indah	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Kebun Sayur RT.4 Desa Nusa Indah Kec.Bati-Bati	141,2	198,5
72	Bati-bati	Ujung	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Lingkungan RT. 6 RW. 2 Desa Ujung Kec. Bati-Bati	124,97	166
73	Bati-bati	Ujung	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ujung - Ujung Baru Kec.Bati-bati	141,2	193
74	Bati-bati	Nusa Indah	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Plajau Desa Nusa Indah Kec.Bati-bati	141,2	186,9

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
75	Bati-bati	Nusa Indah	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Mufakat Rt 9 Rw 1 Ds.Nusa Indah Kec.Bati-bati	141,2	186,8
76	Bati-bati	Nusa Indah	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Nusa Indah Gg.Sabrina Rt.07 Rw.02 Kec.Bati-bati	124,97	170
77	Bati-bati	Bentok Darat	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Imban Rt.09 Rw.04 Kec.Bati-bati	124,97	171
78	Batu Ampar	Gunung Mas	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.10 Gunung Mas kecamatan Batu Ampar	184,97	160
79	Batu Ampar	Damit Hulu	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03 Desa Damit Hulu kecamatan Batu Ampar	131,54	170
80	Batu Ampar	Tajau Pecah	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tajau Pecah Rt.16 Dusun 3 Batu Beranjang Kec.Batu Ampar	131,54	172
81	Batu Ampar	Tajau Pecah	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tajau Pecah Rt.10 Kec.Batu Ampar	60,94	69
82	Batu Ampar	Bluru	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bluru Rt.01 Rw.01 Kec.Batu Ampar	131,54	171,9
83	Bumi Makmur	Handil Maluka	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Handil Baru Rt.002/Rw.001 Desa Handil Maluka, Kec.Bumi Makmur	323,6	325,99
84	Bumi Makmur	Kurau Utara	Peningkatan jalan lingkungan Jl. Tembus RT.04 Desa Kurau Utara Menuju Jalan	175,51	167,5

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
			Provinsi Kecamatan Bumi Makmur		
85	Bumi Makmur	Handil Birayang Atas	Pembuatan Siring Jalan Lingkungan Desa Handil Birayang Atas Kec. Bumi Makmur	98,62	135,4212451
86	Bumi Makmur	Kurau Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang RT 02 dan Gang RT 05 Desa Kurau Utara, Kec.Bumi Makmur	59,5	112,79
87	Jorong	Asam Jaya	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.08 RW.04 Desa Asam Jaya Kecamatan Jorong	290,6	408
88	Jorong	Alur	Perkerasan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Desa Alur Kec. Jorong	242,23	333,9
89	Jorong	Sabuhur	Perkerasan Jalan Lingkungan Arah makam Dusun Sidomukti Desa Sabuhur Kec. Jorong	173,8	224,9
90	Jorong	Alur	Peningkatan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Desa Alur Kec. Jorong	110,6	144,99
91	Jorong	Alur	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Alur Dusun 2 Kec.Jorong	124,97	163
92	Jorong	Simpang Empat Sungai Baru	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Pemukiman 36 Rt.14 Rw.3 Ds.Simpang Empat Sungai Baru Kec.Jorong	124,97	185,4

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
93	Jorong	Muara Asam-asam	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Muara Asam-asam Kec.Jorong	110,6	161
94	Kintap	Sungai Cuka	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.13 Desa Sungai Cuka Kec. Kintap	323,41	390,708
95	Kintap	Sungai Cuka	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Cuka Blok F RT.06 Kecamatan Kintap	170,37	217,85
96	Kintap	Sungai Cuka	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 05 Rw. II desa Sungai Cuka Kecamatan Kintap	213,98	302,895
97	Kintap	Kintap	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Kuburan RT.2 Desa Kintap Kecamatan Kintap	130,15	165
98	Kintap	Pasir Putih	Peningkatan Jalan Lingkungan JL. Syarkawi RT.01 RW.01 Desa Pasir Putih Kecamatan Kintap	136,12	199,99
99	Kintap	Pasir Putih	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 2 Desa Pasir Putih Kec.Kintap	133,08	191,5
100	Kintap	Kebun Raya	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.08, Rt.09 Dusun 3 Desa Kebun Raya Kec.Kintap	213,95	309,5
101	Kintap	Mekarsari	Peningkatan Jalan Lingkungan Pantai loesari RT. 05 Desa Mekarsari Kec. Kintap	103,77	115,684
102	Kintap	Sumber Jaya	Peningkatan Jalan Lingkungan Jalan Ronggolawe RT 03 Desa Sumber Jaya Kec. Kintap	103,77	138,32

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
103	Kintap	Kintapura	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Kintapura Kec.Kintap	103,77	138,32
104	Kintap	Bukit Mulya	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.14 Dusun 4 Desa Bukit Mulya Kec.Kintap	106,77	147,9
105	Kintap	Kebun Raya	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Diponegoro Rt.7 Dusun 2 Desa Kebun Raya Kec.Kintap	103,77	135
106	Kintap	Sebamban Baru	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.11 Dusun 3 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap	103,77	138,3
107	Kintap	Muara Kintap	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Muara Kintap Rt.2 Kec.Kintap	103,77	137,4
108	Kintap	Muara Kintap	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Muara Kintap Jl.Gg Aluh Kec.Kintap	103,77	124
109	Kintap	Muara Kintap	Pembinaan Jalan Lingkungan Paving Block Desa Muara Kintap Rt.12 Pulau Nyamuk Kec.Kintap	126,79	46,4
110	Panyipatan	Batakan	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Batakan Alternatif Kec. Panyipatan	1407,54	1855
111	Panyipatan	Tanjung Dewa	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 2, Desa Tanjung Dewa Kec.Panyipatan	321,25	417
112	Panyipatan	Panyipatan	Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Perintis Rt.05 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan	249,31	235
113	Panyipatan	Panyipatan	Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 04	160,27	181

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
			Desa Panyipatan Kec. Panyipatan		
114	Panyipatan	Kandangan Baru	Perkerasan Jalan Lingkungan RT.06 Desa Kandangan Baru Kec. Panyipatan	532,4	710
115	Panyipatan	Batu Mulya	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Batu Mulya Kec.Panyipatan	124,97	172,5
116	Takisung	Tabanio	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tabanio Kec. Takisung	717,18	963
117	Takisung	Ranggan g Dalam	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 5 Dusun 2 Desa Ranggan Dalam, Kec.Takisung	381,74	429
118	Takisung	Benua Tengah	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung	215,97	297
119	Takisung	Benua Tengah	Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 Desa Benua Tengah Kec. Takisung	345,58	434
120	Takisung	Batilai	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Batilai Kec.Takisung	222,96	254
121	Takisung	Gunung Makmur	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.04 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	131,54	169
122	Takisung	Gunung Makmur	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.05 Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	131,54	177,5
123	Takisung	Sumber Makmur	Peningkatan Jalan Lingkungan RT.11 Desa Sumber Makmur Kec. Takisung	131,54	162





NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
124	Takisung	Pagatan Besar	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pagatan Besar Kec. Takisung	131,54	170
125	Takisung	Banua Lawas	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.8 Desa Banua Lawas Kec. Takisung	94,83	127
126	Takisung	Gunung Makmur	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gunung Makmur RT.16 Kec. Takisung	131,54	167,5
127	Takisung	Banua Lawas	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Banua Lawas Kec. Takisung	131,54	173
128	Takisung	Gunung Makmur	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Gunung Makmur Kec. Takisung	131,54	164,7
129	Takisung	Benua Tengah	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 4 RT. 15 Desa Benua Tengah Kec. Takisung	131,54	170
130	Takisung	Benua Tengah	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 6 RT. 7 Desa Benua Tengah Kec. Takisung	131,54	173,2
131	Takisung	Tabanio	Perkerasan Jalan Lingkungan Desa Tabanio Kec. Takisung	328,9	319
132	Takisung	Ranggan g	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ranggan RT.06 Kecamatan Takisung	116,36	156,6
133	Takisung	Ranggan g	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ranggan RT. 6 Kec. Takisung	131,54	169,9
134	Takisung	Gunung Makmur	Peningkatan Jalan Lingknagan Rt.9 Kampung Penyangat Ds.Gunung	148,64	197

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
			Makmur Kec.Takisung		
135	Takisung	Ranggan g	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Ranggan Rt.09 Kec.Takisung	94,38	121
136	Takisung	Banua Tengah	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.17 Desa Banua Tengah Kec.Takisung	137,49	179,5
137	Tambang Ulang	Sungai Pinang	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Pinang RT.005 Kecamatan Tambang Ulang	382,74	391,5
138	Tambang Ulang	Sungai Jelai	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Jelai Kec.Tambang Ulang	382,74	520,5
139	Tambang Ulang	Pulau Sari	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pulau Sari RT.10 Kec. Tambang Ulang	148,64	203
140	Tambang Ulang	Sungai Pinang	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt 02 dan Rt 05 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang	116,32	131
141	Tambang Ulang	Gunung Raja	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.07 Rw.03 Desa Gunung Raja Kec.Tambang Ulang	148,63	192,7
142	Tambang Ulang	Bingkulu	Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.5 Arah Cindai Alus Putera Bingkulu Kec.Tambang Ulang	131,54	159
143	Kurau	Bawah Layung	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bawah Layung Kec. Kurau	118,37	132,98

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI (M)
144	Kurau	Raden	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Raden Kec. Kurau	118,37	135,9
TOTAL PANJANG				26711	33160

Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan

LOKASI	SEBELUM	SESUDAH
Peningkatan Jalan Lingkungan RT.08 Dusun 2 Desa Tirta Jaya 2 Kec. Bajuin	 3°48'10,51963"S 114°48'40,21805"E Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tirtajaya RT.8 Dusun 2	 3°48'10,36624"S 114°48'40,07135"E Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tirtajaya
Peningkatan Jalan Lingkungan RT.8 Desa Tirtajaya Kec. Bajuin	 3°48'15,47888"S 114°48'39,90355"E Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tirtajaya RT.8 Ruas 1	 3°48'15,35364"S 114°48'39,94186"E Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tirtajaya
Peningkatan Jalan Lingkungan Rt.08, Rt.09 Dusun 3 Desa Kebun Raya Kec.Kintap	 3°52'2,61"S 115°17'38,208"E Kecamatan Kintap Peningkatan Jalan Lingkungan Rt08,Rt09 Kebun Raya Sta 0400	 3°52'2,85"S 115°17'38,178"E Kecamatan Kintap Peningkatan Jalan Lingkungan Rt08 dan Rt09 Dusun 3 Desa Kebun Raya Sta 0400

LOKASI	SEBELUM	SESUDAH
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Batakan Alternatif Kec. Panyipatan		
Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Perintis Rt.05 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan		

3. Rehab/Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Jalan Lingkungan adalah tindakan perbaikan fisik terhadap kerusakan pada ruas jalan lingkungan yang mengalami penurunan fungsi. Berbeda dengan pembangunan baru, rehabilitasi berfokus pada pengembalian kondisi jalan (seperti penambalan lubang, perbaikan lapis permukaan, atau perbaikan struktur minor) agar jalan tersebut dapat berfungsi kembali secara optimal sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Hasil dari pelaksanaan rehabilitasi pada periode pelaporan ini adalah terlaksananya perbaikan jalan lingkungan sepanjang 1.626 meter di 8 titik lokasi sebagai berikut :

Tabel Data Lokasi Rehabilitasi Jalan Lingkungan

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG (M)
1	Bati-bati	Padang	Jalan Lingkungan Pesantren Ubudiyah Desa Padang Kec.Bati-bati	124
2	Pelaihari	Sungai Riam	Jalan Lingkungan Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari	198
3	Pelaihari	Angsau	Jalan Lingkungan Gg. Teratai I Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	200
4	Pelaihari	Pabahana n	Jalan Lingkungan Griya Ziva Pabahanan II Kec. Pelaihari	292,9
5	Bajuin	Tirta Jaya	Jalan Lingkungan Rt. 6 Dusun I Desa Tirta Jaya Kec. Pelaihari	166
6	Bajuin	Bumi Jaya	Jalan Lingkungan Rt. 8 (JL. Panembahan Senopati) Desa Bumi Jaya Kec.Bajuin	195
7	Bajuin	Bajuin	Jalan Lingkungan Trans Bangdep Desa Bajuin Kec. Bajuin	250
8	Batu Ampar	Tajau Pecah	Jalan Lingkungan Rt. 16 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	200

b. Peningkatan Kualitas Drainase Jalan Lingkungan

1. Pelaksanaan perencanaan drainase jalan lingkungan.

Kegiatan Perencanaan Drainase Jalan Lingkungan merupakan langkah strategis teknis yang meliputi survei topografi, analisis hidrologi, dan penyusunan desain teknis (*Detail Engineering Design*) sistem pembuangan air di kawasan permukiman. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem drainase yang terintegrasi, bukan sekadar pelengkap jalan, melainkan sebagai subsistem perlindungan infrastruktur dan kesehatan lingkungan.

Realisasi kegiatan perencanaan drainase pada periode ini telah memberikan hasil yaitu tersusunnya Dokumen Teknis Drainase mencakup 32 lokasi strategis di perumahan dan kawasan permukiman.

2. Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan

Kegiatan Pelaksanaan Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan merupakan pengerjaan konstruksi saluran pembuangan air (baik menggunakan sistem beton pracetak/*u-ditch* maupun pasangan batu) yang terletak di sisi jalan lingkungan. Kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk mengelola limpasan air hujan (*stormwater*) agar tidak menggenangi area hunian dan badan jalan.

Hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran ini meliputi terselesaikannya pembangunan saluran drainase sepanjang 11.506 meter di 32 lokasi perumahan dan kawasan permukiman dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Data Lokasi Rehabilitasi Jalan Lingkungan

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI(M)
1	Pelaihari	Pelaihari	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Jl. Niaga RT. 012 RW. 004 Kel. Pelaihari	471,74	347
2	Pelaihari	Pelaihari	Pembuatan Drainase Jalan Pusaka dan Jalan Dharma Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari	1262,28	529
3	Pelaihari	Pabahanan	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Dari ujung Jl. Bougenville Komplek Wengga RT.11 menuju ke arah barat sampai ujung Jl. Fittonia RT.12, Kel.Pabahanan	358,3	286
4	Pelaihari	Ambungan	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Rt 01 sampai dengan Rt 11 Desa Ambungan, Kec.Pelaihari	451,85	566
5	Pelaihari	Pemuda	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Jalan Perumahan RT 001 Dusun 001 desa Pemuda dan Jalan TK Nabila RT 001 Dusun 001 Desa Pemuda Kec. Pelaihari	378,48	445
6	Pelaihari	Panggung	Pembuatan Drainase Lingkungan Desa Panggung Kec. Pelaihari	173,71	195

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI(M)
7	Pelaihari	Karang Taruna	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Perumahan Shafwah Asri Jl. Raya Takisung Bakunci Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	173,71	177
8	Pelaihari	Atu-Atu	Pembuatan Drainase Jalan Kalangkala RT.7 Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari	173,71	165
9	Pelaihari	Sarang Halang	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Perumahan Alfa Sinergi Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	196,29	236,4
10	Pelaihari	Sarang Halang	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Jalan Sum-Sum RT.13 Kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	196,29	288,6
11	Pelaihari	Angsau	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Rt.2A Gang Beringin Kel.Angsau Kec.Pelaihari	173,71	273
12	Pelaihari	Sarang Halang	Pembuatan Drainase Lingkungan RT. 013 RW. 004 kelurahan Sarang Halang Kec. Pelaihari	173,71	244,2
13	Pelaihari	Angsau	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Tiang Aji 4 RT. 17B Bali Rejo Kel. Angsau Kec. Pelaihari	173,71	284
14	Pelaihari	Angsau	Pembuatan Drainase Lingkungan Gang Sakinah Rt.25 Pamanaran Kel.Angsau Kec.Pelaihari	173,71	284
15	Pelaihari	Karang Taruna	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Perumahan Graha Karya Bakunci Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	80,48	83
16	Bajuin	Tirta Jaya	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan RT. 1 Dusun 1 Desa Tirta Jaya Kec. Bajuin	169,97	200
17	Bati-Bati	Kait-Kait	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan RT.06 RW.02 Jalan Jember Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati	166,43	124,9

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI(M)
18	Bati-Bati	Bentok Darat	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan RT.06 RW.03 Jalan Karya Sentosa Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati	166,43	229,72
19	Batu Ampar	Batu Ampar	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Desa Batu Ampar Rt. 01 Rw. 4, Kec.Batu Ampar	285,8	285,7
20	Batu Ampar	Tajau Pecah	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Desa Tajau Pecah RT. 0013 Dusun 004, Kec.Batu Ampar	461,59	987,5
21	Batu Ampar	Gunung Mas	Pembuatan Drainase RT.2 Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar	78,75	95
22	Jorong	Asam Jaya	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Dusun 002 dan Dusun 004, Desa Asam Jaya Kec.Jorong	245,3	342,6
23	Kintap	Kintap	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Jl Pusaka Dusun 1 Desa Kintap Kec.Kintap	256,09	319,5
24	Kintap	Mekar Sari	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Desa Mekar Sari, Kec.Kintap	195,62	264,7
25	Kintap	Bukit Mulia	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan RT. 01, 06, 10 dan 19 Desa Bukit Mulia Kec Kintap	409,76	568,7
26	Kintap	Pandan Sari	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Jalan Barakat RT. 05 Desa Pandan Sari Kec. Kintap	155,97	225,9
27	Panyipatan	Batakan	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan RT. 007, RT.008, RT.010, RT.002, RT.020 Desa Batakan Kec.Panyipatan	437,24	1165,5
28	Takisung	Banua Lawas	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Desa Benua Lawas Rt.02, Rt.04, Rt.10, Kec.Takisung	285,8	300,78
29	Takisung	Batilai	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Desa Batilai RT 05 Dusun 02, Kec.Takisung	370,33	520,26

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG RENCANA (M)	PANJANG REALISASI(M)
30	Takisung	Telaga Langsat	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Dusun III Sindang Kasih Desa Telaga Langsat, Kec.Takisung	435,63	545,168
31	Tambang Ulang	Pulau Sari	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Jl.Gg Keluarga Rt.02 Rw.01, Desa Pulau Sari Kec.Tambang Ulang	461,59	694,22
32	Tambang Ulang	Tambang Ulang	Pembuatan Drainase Jalan Lingkungan Jl Transal RT. 07, Desa Tambang Ulang Kec.Tambang Ulang	370,33	233,24
TOTAL PANJANG				9564,31	11506,588

3. Rehab/Pemeliharaan Drainase Jalan Lingkungan

Kegiatan Rehab/Pemeliharaan Drainase Jalan Lingkungan merupakan upaya intervensi teknis untuk mengembalikan atau mempertahankan fungsi saluran pembuangan air yang mengalami penurunan kinerja akibat kerusakan struktur, pendangkalan (sedimentasi), maupun penyumbatan. Kegiatan ini mencakup perbaikan dinding saluran yang runtuh, pengerukan sedimen, serta penggantian tutup drainase yang rusak di kawasan permukiman.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada periode ini, capaian yang dihasilkan adalah telah dilakukan rehab/pemeliharaan sepanjang 238 meter di lokasi berikut :

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	LOKASI	PANJANG (M)
1	Batu Ampar	Tajau Pecah	Drainase Jalan Lingkungan Kuburan Muslimin RT.3 Desa Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	238

c. Peningkatan Kualitas Data Pengelolaan Perumahan

1. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan

Kegiatan Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan merupakan instrumen krusial dalam mencapai Sasaran Strategis Dinas: “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman”. Melalui proses verifikasi dan pengesahan *site plan* perumahan, Dinas memastikan bahwa setiap pengembangan hunian baru oleh pengembang telah memenuhi standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang memadai.

Pada Tahun Anggaran 2025, telah diterbitkan sebanyak 9 (sembilan) Rekomendasi Site Plan perumahan dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perumahan	Nama Pengembang	Alamat Perumahan	Jumlah Unit
1	Harumi Al Banjari	PT.Harumi Pandora Jaya	Jl.Pelaihari Batakan Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari	30
2	Alfa Sinergi	PT.Tamara Alfa Sinergia	Jalan Madang Pirawas, Rt.009 Rw.005 Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihar Kab.Tanah Laut	20
3	Anugerah Utama 2	PT.Anugerah Widya Utama	Jalan Al-Fatah Kel.Karang Taruna Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut	89
4	Arta Harmoni	PT.Arta Harmoni Kayangan	Jalan Mangga Besar Kel.Sarang Halang Kel.Pelaihari Kab.TanahLaut	33
5	Griya Madani Residence	PT.Bumi Madani Kalimantan	Jl.Deso Pemuda Desa Pemuda Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut	46
6	Wal Jamaah	PT.Anam Saudara Wal Jamaah	Desa Simpang Empat Sungai Baru	48

No	Nama Perumahan	Nama Pengembang	Alamat Perumahan	Jumlah Unit
			Kec.Jorong Kab.Tanah Laut	
7	Anugerah Residence 5 (Tahap 1)	PT.Berkah Anggara Putri	Jl.Raya Atu-atu Rt.004 Rw.001 Ds.Atu-atu Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut	35
8	Anugerah Residence 5 (Tahap 1)	PT.Berkah Anggara Putri	Jl.Raya Atu-atu Rt.004 Rw.001 Ds.Atu-atu Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut	27
9	Citra Nuansa	PT.Tamara Jaya Property	Jl.A.Yani Gg.H.Abdul Manan Rt.005 Rw.003 Kel.Sarang Halang Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut	57
Total				385

Melalui penerbitan rekomendasi *site plan*, Dinas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan perumahan menuju konsep permukiman yang sehat, aman, dan berkelanjutan, sehingga sasaran strategis peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dapat tercapai secara optimal sesuai target RPJMD.

2. Pelaksanaan Inventarisasi Rumah Korban Bencana

Kegiatan Inventarisasi Rumah Korban Bencana merupakan implementasi dari tahap pertama dan kedua mekanisme penerapan SPM, yaitu Pengumpulan Data dan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Tanpa inventarisasi yang akurat, target capaian SPM sebesar 100% terhadap warga negara yang berhak tidak dapat diukur secara valid.

Pada kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana telah dilaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota sebanyak 20 unit dan sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana telah dilaksanakan pembangunan

rumah bagi korban bencana kabupaten/kota sebanyak 23 unit rumah dengan uraian sebagai berikut :

NO	URAIAN	LOKASI		UNIT	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA/KEL			
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pelaihari	Panjaratan	20	22.500.000	450.000.000
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Panyipatan	Batu Tungku	23	35.000.000	805.000.000
TOTAL				43		1.255.000.000

3. Pelaksanaan Inventarisasi Rumah Tidak Layak Huni

Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi RTLH merupakan langkah krusial dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup. Melalui pendataan yang akurat, dapat diidentifikasi hunian yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan, kecukupan luas minimum, maupun kesehatan. Inventarisasi ini menjadi fondasi utama (baseline data) dalam perumusan kebijakan intervensi perbaikan rumah guna meningkatkan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selama tahun anggaran berjalan, kegiatan inventarisasi dilakukan masih melalui data baseline penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui survei lapangan dan verifikasi data *by name by address* di seluruh wilayah Kabupaten tanah Laut yang telah dilaksanakan pada tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan ini memastikan bahwa target program peningkatan kualitas perumahan tepat sasaran,

sehingga kontribusi terhadap peningkatan akses rumah layak huni dapat terukur secara objektif dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari total target 546 unit rumah ada 545 yang bisa terlaksana dikarenakan :

1. Data Tidak Akurat atau Tidak Terbaru

Kendalanya adalah data RTLH belum diperbarui secara berkala dan Perbedaan data antara desa, kecamatan, dan kabupaten.

Solusinya adalah Mengintegrasikan data dengan DTKS atau sistem berbasis NIK dan Menggunakan aplikasi digital berbasis GPS dan foto dokumentasi real-time.

2. Kurangnya SDM dan Anggaran Pendataan

Kendalanya adalah Petugas pendataan terbatas. Dan Wilayah luas dan akses sulit (daerah terpencil).

Solusinya adalah Melibatkan aparat desa/kelurahan dan kader masyarakat dan Mengoptimalkan penggunaan teknologi (form digital, GIS).

3. Kriteria RTLH Tidak Dipahami Masyarakat

Kendalanya adalah Masyarakat menganggap semua rumah sederhana sebagai RTLH dan Kurangnya sosialisasi standar teknis rumah layak huni.

Solusinya adalah Sosialisasi kriteria RTLH secara terbuka (struktur, atap, lantai, sanitasi, luas hunian) dan Membagikan panduan sederhana melalui desa dan media sosial resmi.

4. Pelaksanaan Inventarisasi Kawasan Kumuh

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup telah menetapkan sasaran strategis "Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman" sebagai prioritas utama dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak dan sehat. Pada tahun 2021, salah satu upaya kunci dalam

mencapai sasaran ini adalah melalui pelaksanaan Inventarisasi Kawasan Kumuh yang dituangkan dalam penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPK).

Pelaksanaan kegiatan ini berkontribusi langsung sampai dengan tahun berjalan, terhadap pencapaian target IKU "Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani". Dengan tersusunnya dokumen RP2KPK, Dinas memiliki dasar penentuan skala prioritas penanganan yang lebih tepat sasaran, sehingga efektivitas pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman dapat ditingkatkan secara signifikan. Dokumen RP2KPK tahun 2021 telah berhasil diselesaikan dengan cakupan seluruh lokasi yang teridentifikasi dalam Surat Keputusan (SK) Kumuh yang masih berlaku sampai tahun sekarang.

d. Penurunan Rumah Tidak Layak Huni

1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan instrumen utama dalam mencapai sasaran strategis "Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman". Kegiatan ini diarahkan untuk menjamin hak dasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang sehat dan aman, sesuai dengan standar keselamatan bangunan dan kecukupan luas minimum.



Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pada periode ini, capaian yang dihasilkan adalah telah dilakukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 545 unit rumah dari target 546 unit rumah, dengan sebaran lokasi sebagai berikut :

NO	URAIAN	LOKASI		TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA				
1	Bantuan Sosial Berupa Uang (Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni)	Pelaihari	Sumber Mulia	2	2	25.000.000	50.000.000
2			Sarang Halang	1	1	25.000.000	25.000.000
3			Karang Taruna	6	6	25.000.000	150.000.000
4			Sungai Riam	2	2	25.000.000	50.000.000
5			Panggung	2	2	25.000.000	50.000.000
6			Bumi Jaya	1	1	25.000.000	25.000.000
7			Guntung Besar	1	1	25.000.000	25.000.000
8			Angsau	1	1	25.000.000	25.000.000
9			Pelaihari	8	8	25.000.000	200.000.000
		Total	24	24		600.000.000	
10	Batu Ampar	Batu Ampar	Bluru	5	5	25.000.000	125.000.000
11			Gunung Melati	1	1	25.000.000	25.000.000
12			Jilatan	1	1	25.000.000	25.000.000
13			Jilatan Alur	9	9	25.000.000	225.000.000
14			Batu Ampar	10	10	25.000.000	250.000.000
		Total	26	26		650.000.000	
15	Jorong	Jorong	Batalang	25	25	25.000.000	625.000.000
16			Jorong	2	2	25.000.000	50.000.000
17			Karang Rejo	5	5	25.000.000	125.000.000
18			Simpang Empat Sungai Baru	4	4	25.000.000	100.000.000
		Total	36	36		900.000.000	
19	Bati-Bati	Bati-Bati	Kait-kait	10	10	25.000.000	250.000.000
20			Padang	10	10	25.000.000	250.000.000
21			Ujung	20	20	25.000.000	500.000.000
22			Liang Anggang	15	15	25.000.000	375.000.000
23			Nusa Indah	10	10	25.000.000	250.000.000
		Total	65	65		1.625.000.000	

NO	URAIAN	LOKASI		TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)		
		KECAMATAN	DESA						
24	Bajuin		Bajuin	5	5	25.000.000	125.000.000		
25			Tebing Siring	1	1	25.000.000	25.000.000		
26			Tirta Jaya	33	33	25.000.000	825.000.000		
27			Tanjung	1	1	25.000.000	25.000.000		
28			Sungai Bakar	14	14	25.000.000	350.000.000		
29			Pemalongan	11	11	25.000.000	275.000.000		
30			Kunyit	8	8	25.000.000	200.000.000		
31			Ketapang	21	21	25.000.000	525.000.000		
Total				94	94		2.350.000.000		
32			Kintap		Kintap	3	3	25.000.000	75.000.000
33	Salaman	13			13	25.000.000	325.000.000		
34	Bukit Mulia	6			6	25.000.000	150.000.000		
35	Sebamban Baru	13			13	25.000.000	325.000.000		
36	Sumber Jaya	8			8	25.000.000	200.000.000		
Total				43	43		1.075.000.000		
37	Takisung		Ranggang	26	25	25.000.000	650.000.000		
38			Kuala Tambangan	28	28	25.000.000	700.000.000		
39			Batilai	19	19	25.000.000	475.000.000		
40			Takisung	1	1	25.000.000	25.000.000		
41			Gunung Makmur	2	2	25.000.000	50.000.000		
42			Pagatan Besar	1	1	25.000.000	25.000.000		
43			Benua Lawas	1	1	25.000.000	25.000.000		
44			Tabanio	1	1	25.000.000	25.000.000		
45			Benua Tengah	10	10	25.000.000	250.000.000		
Total				89	88		2.225.000.000		
46	Kurau		Handil Negara	11	11	25.000.000	275.000.000		
47			Padang Luas	1	1	25.000.000	25.000.000		
48			Kali Besar	11	11	25.000.000	275.000.000		

NO	URAIAN	LOKASI		TARGET (Unit)	REALISASI (Unit)	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA				
		Total		23	23		575.000.000
49		Bumi Makmur	Kurau Utara	15	15	25.000.000	375.000.000
50			Handil Labuan Amas	20	20	25.000.000	500.000.000
51			Bumi Harapan	5	5	25.000.000	125.000.000
52			Handil Babirik	1	1	25.000.000	25.000.000
53			Handil Birayang Atas	1	1	25.000.000	25.000.000
54			Handil Birayang Bawah	5	5	25.000.000	125.000.000
			Total		47	47	
55		Panyipatan	Suka Ramah	11	11	25.000.000	275.000.000
56			Tanjung Dewa	5	5	25.000.000	125.000.000
57			Batakan	10	10	25.000.000	250.000.000
58			Kandangan Lama	11	11	25.000.000	275.000.000
59			Kandangan Baru	17	17	25.000.000	425.000.000
60			Batu Mulya	15	15	25.000.000	375.000.000
61			Bumi Asih	15	15	25.000.000	375.000.000
		Total		84	84		2.100.000.000
62		Tambang Ulang	Pulau Sari	15	15	25.000.000	375.000.000
		Total		15	15		375.000.000
		TOTAL		546	545		13.650.000.000

LOKASI	SEBELUM	SESUDAH
<p>Ahmad Jali RT 012 Desa Jilatan Alur Kec. Batu Ampar</p>		
<p>SA'ADAH Jl. Desa Kali Besar RT.001</p>		
<p>Supiani RT. 005 Desa Kunyit Kec. Bajuin</p>		
<p>Rujali Rahman RT.002 Desa Kandangan Lama Kec.Panyipatan</p>		

LOKASI	SEBELUM	SESUDAH
Samirah RT.002 Desa Sebamban Baru Kec.Kintap		

2. Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Dan Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, DPRKPLH melaksanakan mandat penyediaan rumah layak huni bagi kelompok masyarakat rentan, khususnya korban bencana alam/sosial serta masyarakat yang terdampak relokasi program pembangunan pemerintah. Intervensi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin kepastian tempat tinggal pasca-situasi darurat maupun dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Termasuk juga untuk sebagai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 13 Tahun 2023. Fokus utama pelayanan dasar ini diarahkan pada dua indikator kunci:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana.
2. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

NO	URAIAN	LOKASI		UNIT	ANGGARAN PER UNIT (RP)	PAGU (RP)
		KECAMATAN	DESA/KEL			
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Pelaihari	Panjaratan	20	22.500.000	450.000.000
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Panyipatan	Batu Tungku	23	35.000.000	805.000.000
	TOTAL			43		1.255.000.000

e. Peningkatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Umum pada Kawasan Kumuh Sesuai Standar

1. Penyusunan Dokumen Kebijakan PKP

Penyusunan dokumen kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan fondasi utama dalam mencapai sasaran strategis “Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman”. Tanpa dokumen perencanaan yang komprehensif, pembangunan infrastruktur akan kehilangan arah dan integrasi. Dinas memandang penyusunan dokumen ini sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan setiap pembangunan hunian dan lingkungan memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan keberlanjutan.

Strategi dan Output Utama Dalam periode laporan ini, Dinas telah menyelesaikan penyusunan dokumen strategis yang berfungsi sebagai peta jalan (roadmap) pembangunan, antara lain:

- RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman): Menjadi acuan

jangka panjang (20 tahun) untuk mengoordinasikan penyelenggaraan PKP secara lintas sektoral dan administratif.

- RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan): Sebagai dokumen rencana aksi konkret untuk mengintervensi kawasan kumuh melalui strategi investasi dan pencegahan yang terukur.
- Renstra dan Dokumen Teknis: Penguatan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat untuk memastikan keselarasan dengan target RPJMD.

2. Pelaksanaan Koordinasi Pemenuhan PSU Pada Kawasan Kumuh

Pelaksanaan koordinasi pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) merupakan instrumen krusial dalam mencapai sasaran strategis. Fokus kegiatan ini adalah mengintegrasikan elemen dasar lingkungan—seperti jalan lingkungan, drainase, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran—pada kawasan kumuh guna memenuhi ambang batas hunian layak. Hal ini dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Lintas SKPD melalui Forum Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) yang menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pemenuhan PSU agar tepat sasaran dan terintegrasi secara sistemik.

Melalui rangkaian rapat koordinasi berkala, Pokja PKP melakukan intervensi kolaboratif yang mencakup harmonisasi program, mengidentifikasi hambatan di lapangan—seperti kendala lahan atau konflik sosial—untuk dirumuskan solusinya secara bersama antar-instansi terkait serta validasi data terpadu menggunakan hasil rapat Pokja untuk memutakhirkan Data Profil Kawasan Kumuh, sehingga intervensi PSU didasarkan pada angka kebutuhan riil di lapangan.

Sepanjang tahun anggaran, telah dilaksanakan 3 (tiga) kali rapat koordinasi yang menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait penataan kawasan.

Faktor Pendorong/Keberhasilan

Capaian realisasi kinerja hingga tahun berjalan mencapai angka 51,32, atau sekitar 94,67% dari target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi sebesar 54,21. Meskipun angka absolut belum melampaui target akhir, terdapat berbagai faktor pendorong krusial yang memastikan organisasi tetap berada pada jalur pencapaian target yang ditetapkan.

- **Komitmen Kepemimpinan dan Kebijakan Internal**

Keberhasilan mencapai progres di atas 50% ini didorong oleh kuatnya komitmen pimpinan dalam menetapkan kebijakan yang mendukung implementasi program secara efektif. Adanya dukungan kebijakan internal yang selaras dengan kebijakan nasional memberikan landasan operasional yang kokoh bagi seluruh unit kerja.

- **Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja**

Implementasi anggaran berbasis kinerja menjadi instrumen utama dalam upaya mencapai target strategis. Alokasi anggaran yang fokus pada pencapaian output dan outcome memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien dan terukur, sehingga memberikan dampak nyata pada capaian indikator kinerja utama.

- **Sistem Pemantauan dan Evaluasi Berkala**

Organisasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui progres pencapaian kinerja. Mekanisme ini berfungsi sebagai sistem deteksi dini (early warning system) untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan dan segera menyusun strategi perbaikan guna memastikan target jangka menengah tetap tercapai pada akhir periode Renstra.

Faktor Penghambat/Kegagalan

Meskipun progres capaian menunjukkan tren positif, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan realisasi (51,32) belum mencapai target jangka menengah (54,21), antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya Pendukung: Masih terdapat beberapa kendala terkait ketersediaan infrastruktur teknologi atau sarana prasarana yang belum sepenuhnya mendukung percepatan program strategis secara masif.
- Dinamika Lingkungan Strategis: Adanya perubahan kebijakan di tingkat makro atau fluktuasi kondisi ekonomi/sosial yang berdampak pada perubahan prioritas pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- Proses Adaptasi Regulasi Baru: Adanya penyesuaian terhadap regulasi terbaru dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu dalam sinkronisasi tata kelola di tingkat internal organisasi.

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan target jangka menengah sebesar 54,21 tercapai sepenuhnya, organisasi menetapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Akselerasi Program Strategis: Melakukan percepatan pada kegiatan-kegiatan yang memiliki bobot kinerja besar namun progresnya masih di bawah rata-rata melalui skema crash program atau penugasan khusus.
- Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi: Mengintegrasikan sistem informasi manajemen kinerja untuk memantau capaian secara real-time, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat jika terjadi deviasi.
- Penguatan Koordinasi Lintas Sektor: Meningkatkan kolaborasi antar unit kerja dan stakeholder terkait untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat efektivitas pencapaian target.
- Re-evaluasi Alokasi Sumber Daya: Melakukan realokasi anggaran dan SDM pada area-area yang menjadi pengungkit utama (key driver) capaian kinerja untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan input.

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 7 ASN pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup serta di dukung oleh 4 Program dengan Pagu Rp. 69.025.048.173,55.00 dan terealisasi Rp. 67.148.413.456,00 atau sebesar 97,28%.

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pengembangan Perumahan	1.369.120.422,15	1.314.123.000,00
2	Program Kawasan Permukiman	9.585.270.000,00	9.503.855.000,00
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.977.480.000,00	4.936.090.000,00
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	53.093.177.751,40	51.394.345.456,00
JUMLAH		69.025.048.173,55	67.148.413.456

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan

Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan diukur melalui 4 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TAHUN 2025		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	0	503.416,22	Tidak dapat dilakukan perhitungan	Tidak dapat dilakukan perhitungan
		Indeks Kualitas Air	Indeks	50	71,27	74,02	103,8%
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	98,72	71,82	84,42	117,5%
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	44,67	65,17	65,43	100,3%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025							107,2%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	503.416,22	Tidak dapat dilakukan perhitungan	Tidak dapat dilakukan perhitungan	720.230,16	Tidak dapat dilakukan perhitungan
		Indeks Kualitas Air	Nilai	71,27	74,02	103,8%	71,67	103%
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	71,82	84,42	117,5%	72,22	116,9%
		Indeks Kualitas Lahan	Nilai	65,17	65,43	100,3%	65,60	99,7%

a. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Penurunan emisi GRK kumulatif merupakan **akumulasi total penurunan emisi dari beberapa tahun atau beberapa kegiatan** dalam suatu periode, dari tahun baseline. Penurunan emisi GRK kumulatif mencerminkan **kontribusi kolektif pembangunan rendah karbon terhadap pencapaian target RPJMN dan komitmen nasional (NDC)**. Indikator ini digunakan oleh Bappenas untuk:

- Mengevaluasi kemajuan pencapaian target penurunan emisi nasional,
- Menyusun laporan kinerja pemerintah (misalnya evaluasi rpjmn dan lampiran pidato presiden),

- Serta memenuhi kebutuhan pelaporan domestik dan internasional.

Dengan demikian, penurunan emisi GRK kumulatif tidak merepresentasikan satu aksi atau satu tahun saja, melainkan **hasil agregasi upaya mitigasi secara berkelanjutan** dalam kerangka pembangunan nasional

Aksara, merupakan platform perencanaan, pemantauan dan pelaporan aksi-aksi pembangunan rendah karbon secara transparan, akurat, lengkap, konsisten dan terintegrasi, yang mana langsung terdapat nilai penurunan GRK kumulatif dalam satuan periode.

Penurunan Emisi GRK Kumulatif pada tahun 2025 masih menunggu hasil kabupaten atau kota lain dikarenakan ditahun 2024 ada sosialisasi yang dilakukan secara online bukan pelatihan atau workshop, jadi realisasi atau capaian diakhir tahun 2025 masih terkendala dalam melakukan penginputan di aplikasi GRK .

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dikarenakan Penurunan Emisi GRK Kumulatif ini merupakan indikator yang baru ditambahkan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup, sedangkan realisasi capaian pada tahun 2024 untuk Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca adalah 1 Dokumen (100%,) dengan tingkat pencapaian 100% terhadap target tahun 2024.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, pada tahun 2023 memperoleh nilai 1 Dokumen (100%,) dan pada tahun 2024 sebesar 1 Dokumen (100%,). Hal ini

mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tercatat belum ada realisasi dikarenakan masih indikator yang terbilang baru ditetapkan oleh Provinsi, dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 553.236 TON CO₂ EQ (100%). Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 720.230 TON CO₂ EQ, maka Penurunan Emisi GRK Kumulatif belum dapat dilakukan perhitungan.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan / peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup “Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan”, dengan indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup melaksanakan Pendataan GRK dan Peningkatan Kualitas Kampung Proklamasi.

a. Pendataan GRK

1. Penginputan data GRK.

Program Kampung Iklim merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim di Indonesia yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, pihak swasta, dan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut

seperti yang termuat dalam Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 100.3.3.2/876-KUM/2025 Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Penetapan Lokasi Kampung Iklim di Kabupaten Tanah Laut. Pada tahun 2025. Kabupaten Tanah Laut kembali mendapatkan penghargaan kampung iklim dengan kategori Proklim Utama Apresiasi Desa/Kelurahan Proklim yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

b. Peningkatan Kualitas Kampung Proklim

1. Pembinaan kampung proklim

Jumlah Kampung Proklim yang di bina ada 7 Desa yaitu:

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KATEGORI
1	Desa Karang Rejo	Jorong	Utama
2	Desa Bajuin	Bajuin	Madya
3	Desa Tanjung	Bajuin	Madya
4	Desa Pemalongan	Bajuin	Madya
5	Desa Tebing Siring	Bajuin	Madya
6	Desa Bumi Asih	Panyipatan	Pratama
7	Desa Sungai Bakau	Kurau	Pratama

2. Pelaksanaan kegiatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan bertujuan membangun ketahanan terhadap dampak perubahan iklim sekaligus berkontribusi pada penurunan laju perubahan iklim itu sendiri, untuk mengurangi atau menekan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan penyerapan karbon, melalui efisiensi energi,

penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah berkelanjutan, perlindungan dan rehabilitasi hutan, serta perubahan pola produksi dan konsumsi.



Sosialisasi penghijauan pada desa Asri Mulya, Jorong Verifikasi calon proklim utama desa Karang Rejo, Jorong

Faktor Pendorong/Keberhasilan

Supaya penurunan Emisi GRK dapat terlaksana dengan baik, dimohon agar bisa dikolaborasikan dengan instansi lain yang berupa pokin dimasing masing perangkat daerah.

Faktor Penghambat/Kegagalan

1. Belum disosialisasikan dan dilakukan workshop secara langsung.
2. Pengisian lintas OPD sedikit menghambat pengisian di platform. dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

3. Kurangnya SDM yang mengampu dikegiatan penurunan gas rumah kaca

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi untuk memperkuat kemampuan staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam mendukung kinerja .
2. Dilakukannya sosialisasi atau workshop atau pelatihan terkait kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca

b. Indeks Kualitas Air

Indeks kualitas Air sekaligus Perjanjian Kinerja Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut dengan Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

Pada tahun 2025 melalui program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatannya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air. Indikator hasil pemantauan Indeks Kualitas Air yang memenuhi baku mutu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 mengalami fluktuasi.

Rumus Perhitungannya :

$$IKA \text{ Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA \text{ Titik Pantau}_i}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$$

Pada Tahun 2025 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai menurut Perda RPPLH tahun 2021 - 2051 dan target berdasarkan Renstra tahun 2025 – 2029 adalah 71,27 dan

hasil yang dicapai untuk tahun 2025 sudah berhasil memenuhi target yaitu 74,02. Pada tahun 2025 terdapat perubahan rumus perhitungan nilai IKA dimana sebelumnya memakai perhitungan IKA Indeks Pencemar sedangkan peraturan yang baru memakai perhitungan IKA INA.

No	Tahun	Target	Hasil
1	2024	50	50,00
2	2025	71,27	74,02

Pemantauan kualitas air sungai untuk data Indeks Kualitas Air (IKA) yang dilakukan di 6 (enam) sungai yaitu sungai Kintap, Sungai Asam-Asam, Sungai Tabanio, Sungai Maluka, sungai Sabuhur, dan sungai Swarangan. Pemantauan dilakukan 2 kali dan dilakukan di hulu, tengah dan hilir masing-masing sungai.

Dari 18 (delapan belas) parameter air sungai yang diuji, yaitu 8 (delapan) parameter yang digunakan untuk menghitung nilai Indeks Kualitas Air (IKA) adalah : pH, TSS, BOD, COD, DO, Total Fosfat, Nitrat, dan Fecal Coli.

Dari hasil Analisa kualitas parameter air pada sungai dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah total coliform, Fecal Coliform dan COD.

Dari hasil analisis penetapan status mutu air berdasarkan metode IKA INA pada 36 titik pantau sungai diketahui terdapat 6 dengan status memenuhi dan 29 titik pantau dengan status sedang.

Air khususnya air sungai mempunyai peran yang sangat strategis dalam perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air sungai bagi sebagian besar masyarakat merupakan sumber air minum rumah tangga. Selain itu air sungai menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri, pertanian dan pembangkit listrik.

Di sisi lain sungai juga menjadi tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka kualitas air sungai menjadi salah satu penting yang menjadi indikator kualitas lingkungan hidup.

Pemantauan kualitas air permukaan periode 1 dan 2 dilakukan pada 12 titik sample air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sample yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

Dari hasil analisa kualitas parameter air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu pada semua titik pantau adalah Total Coliform, TSS, COD, Fecal Coliform, Amoniak dan Amoniak.

Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode indeks pencemar pada 12 (dua belas) titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) diketahui terdapat 3 (tiga) dengan status memenuhi dan 22 (dua puluh dua) titik pantau dengan status cemar ringan dan 3 (tiga) titik pantau dengan status sedang.

Tabel 3.2.3
Analisa kualitas parameter air Daerah Aliran Sungai (DAS)
berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan Periode I
Tahun 2025

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Das Kintap		Das Asam-asam		Das Tabanio		Das Maluka		Das Sabuhur		Das Swarangan	
				Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
	Titik Kordinat	X		296965	254136	269056	259305	235066	968272	246490	254796	254796	259305	270820	269247
		Y		958040 5	961011 5	958017 4	955171 2	960247 9	959309 8	958074 5	955703 7	955703 7	955171 2	955972 9	955328 5
1	Temperature	oC	Dev 3	26,57	25,2	28	26	27,1	30,7	28,6	29,2	27	26	26	30,1

2	pH	-	6-9	7,97	7,15	7,72	6,75	7,81	7,21	6,74	5,83	6,7	6,17	7,15	5,28
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	50	2,78	35,4	43,67	26,2	2,5	79,75	21,83	2,78	9,4	74,007	10,75	4,86
4	TDS (Total Padatan Terlarut)	mg/L	1000	72	390	88	96	125,5	60	60	329	53,5	82	50	910
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	138,4	154,1	130,2	181,7	208	77,4	82,3	703		90,3	93,8	3,44
6	DO (Oksigen Terlarut)	mg/L	4	5,6	6,6	6,3	6,9	6,6	6,2	5,8	5,3	6,15	6,17	7	5,4
7	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	3	2,12	1,88	1,47	1,79	1,63	1,14	1,39	1,71	1,79	2,61	1,22	2,69
8	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	25	19,18	37,77	18,34	33,34	26,88	15,02	36,76	38,24	41,38	52,26	22,05	21,14
9	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	-	0,211	0,197	0,145	0,166	0,114	0,143	0,097	0,115	0,301	0,159	0,156	0,186
10	Cd (Kadmium) Terlarut*	mg/L	0,01	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
11	Hg (Raksa) Terlarut*	mg/L	0,002	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325	0,000325
12	Total Fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
13	Debit			0,5	148,4	18,75	103	1,98	12,6	16,67	4,95	2,46	3,28	30,88	0,1
13	Nitrat (NO3-N)*	mg/L	10	0,0953	0,2032	0,0954	0,1059	0,002	0,4754	0,2234	0,0243	0,1833	0,5129	0,1214	0,002
14	Nitrit (NO2-N)	mg/L	0,06	0,0157	0,0707	0,0551	0,0237	0,004	0,1662	0,0427	0,0064	0,0355	0,146	0,0044	0,004
15	Amoniak (NH3-N)*	mg/L	0,02	1,178	1,063	3,033	0,8722	0,927	0,7825	0,6854	0,9144	1,177	1,033	1,009	0,6224
16	Fecal Coliform*	MP N/100 ml	1000	5,4x10 ⁴ (54.00)	2,4x10 ⁴ (24.00)	4,0x10 ² (400)	2,4x10 ³ (2.400)	1,6x10 ² (160)	1,7x10 ⁴ (17.000)	3,3x10 ³ (3.300)	3,5x10 ² (330)	7,8x10 ² (720)	1,2x10 ⁴ (12.000)	6,8x10 ¹ (68)	2
17	Total Coliform*	MP N/100 ml	5000	3,5x10 ³ (3.500)	2,4x10 ³ (2.400)	4,0x10 ² (400)	2,4x10 ³ (2.400)	1,6x10 ² (160)	1,7x10 ⁴ (17.000)	3,3x10 ³ (3.300)	3,5x10 ² (330)	7,8x10 ² (720)	1,2x10 ⁴ (12.000)	6,8x10 ¹ (68)	2

Tabel 3.2.4
Analisa Kualitas Parameter Air Daerah Aliran Sungai (DAS)
berdasarkan Baku Mutu yang telah ditetapkan Periode II
Tahun 2025

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Das Kintap		Das Asam-asam		Das Tabanio		Das Maluka		Das Sabuhur		Das Swarangan	
				Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir	Hulu	Hilir
1	Temperature	oC	Dev ₃	25,9	28,1	30,4	27,3	27	30,4	29	29,2	30,9	29,1	28,9	29,1
2	pH	-	6-9	7,95	6,97	7,58	7,56	8,2	7,7	6,24	6,24	7,41	7,12	7,22	6,81
3	TSS (Total Padatan Tersuspensi)	mg/L	50	3,13	36,8	46,25	15,25	4,50	32,50	2,78	2,78	8,87	3,88	3,12	25,00
4	TDS (Total Padatan Terlarut)	mg/L	1000	90,00	102,0	150,0	126,0	162,00	84,00	138,00	138,00	98,00	50,00	78	900,00
5	DHL (Daya Hantar Listrik)	ms/cm	-	138,1	119,7	256,0	148,6	178,8	97,4	178,4	178,4	135,6	65,3	8,6	27,0
6	DO (Oksigen Terlarut)	mg/L	4	7,1	6,7	6,45	6,5	7,21	4,51	5,3	5,3	6,35	6,15	6,7	6,4
7	BOD (Biological Oxygen Demand)	mg/L	3	2,02	1,94	2,02	2,02	2,26	2,20	1,29	1,29	2,02	1,94	2,26	2,18
8	COD (Chemical Oxygen Demand)	mg/L	25	46,07	49,3	42,8	45,46	45,79	44,05	39,64	39,64	40,98	37,08	43,85	21,1
9	Fe (Besi) Terlarut	mg/L	-	0,782	1,47	1,162	1,118	<0,040	3,092	0,31	0,310	1,883	2,328	1,507	0,363
10	Cd (Kadmium) Terlarut*	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11	Hg (Raksa) Terlarut*	mg/L	0,002	<0,00325	<0,000326	0,0007391	0,0005312	<0,000325	<0,000325	<0,000325	<0,000325	<0,000325	<0,0008934	<0,000325	<0,000325
12	Total Fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2
13	Debit	m ³ /S	-		1,3	30,88	0,8	0	28,6	5,2	5,2	4,08	2,8	26,8	1,4
13	Nitrat (NO ₃ -N)*	mg/L	10	0,1322	0,2922	0,4556	0,2403	0,0578	0,1569	0,2517	0,0674	0,1934	0,3044	0,4313	0,0458
14	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/L	0,06	0,0048	0,054	0,0732	0,0306	<0,0040	0,0244	0,0454	<0,0040	0,0168	0,023	0,0118	0,0105
15	Amoniak (NH ₃ -N)*	mg/L	0,02	0,0234	0,0793	0,2448	0,0374	0,074	1,522	1,19	1,058	0,2098	0,1867	0,058	0,2186
16	Fecal Coliform*	MPN/100 ml	1000	3,5x10 ³	2,4x10 ⁴	3,5x10 ³	3,5x10 ⁴	2,8x10 ³	5,4x10 ³	1,6x10 ⁴	2,2x10 ²	3,5x10 ³	2,4x10 ³	3,5x10 ³	24x10 ³
17	Total Coliform*	MPN/1	5000	1,3x10 ³	2,4x10 ⁴	2,4x10 ³	2,4x10 ⁴	2,8x10 ³	2,2x10 ³	1,6x10 ⁴	2,2x10 ²	3,5x10 ³	2,4x10 ³	2,4x10 ³	4,1x10 ²

		00 ml																	
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pemantauan kualitas air permukaan dilakukan pada 12 titik sample air yang terdiri 6 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana aliran air permukaan tersebut merupakan titik – titik yang telah dianggap mewakili gambaran kualitas air permukaan di Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan hasil pengujian sample yang dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan dan UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut maka didapatkan data – data sebagai berikut :

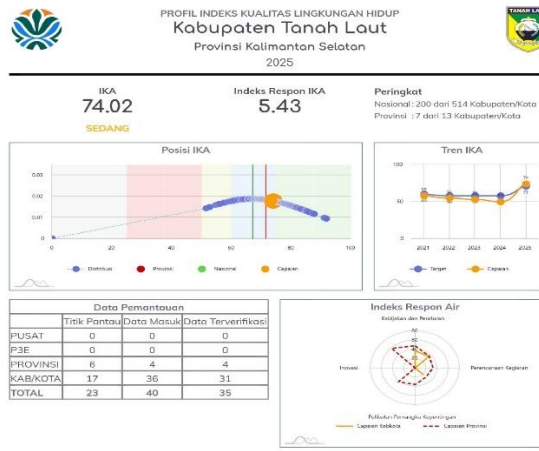
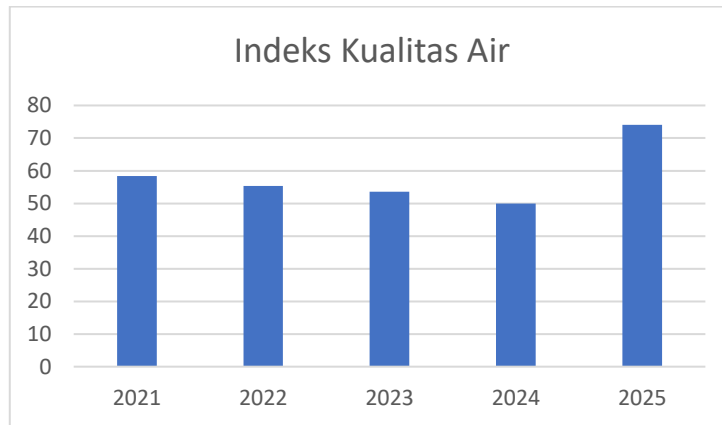
Dari hasil pemantauan pada 12 (dua belas) titik pantau air permukaan dan analisa berdasarkan baku mutu air sungai kelas II sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Sungai Kelas II pada periode 1 (satu) diketahui bahwa jumlah parameter yang diperiksa sebanyak 216 parameter dan jumlah parameter yang tidak melebihi baku mutu sebanyak 177 dan yang melebihi baku mutu sebanyak 39 parameter, sehingga didapatkan persentase parameter yang memenuhi baku mutu adalah sebesar dengan 81,94 % dari total parameter sebanyak 216 parameter. Sedangkan pada periode 2 (dua) diketahui bahwa jumlah parameter yang diperiksa sebanyak 216 parameter dan jumlah parameter yang tidak melebihi baku mutu sebanyak 162 parameter dan yang melebihi baku mutu sebanyak 54 parameter, sehingga didapatkan persentase parameter yang memenuhi baku mutu adalah sebesar 75 % dari total parameter sebanyak 216 parameter.

Dari hasil perhitungan pada aplikasi IKLH nilai Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahap I dan Tahap II untuk 12 (dua belas) titik

pantau dengan kategori sungai kelas II Tahun 2024 didapatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) kategori sungai kelas II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebesar 50.

Dari hasil evaluasi Indeks Kualitas Air (IKA) untuk kategori sungai kelas II diketahui bahwa nilai IKA pada Tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar 3,57 dari 53,57 menjadi 50 dimana hal ini dipengaruhi perubahan status mutu air dari setiap pemantauan.

Grafik 3.1.2
Indeks Kualitas Air Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kualitas Air" pada tahun 2025 tercatat sebesar 74,02, atau setara dengan 103,71% dari target yang telah ditetapkan sebesar 71,27.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 58,42 dan menjadi 53,57 pada 2023, pada tahun 2024 memperoleh nilai 50 dan pada tahun 2025 sebesar 74,02. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan anggota Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kualitas Air Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tercatat mencapai 74,02, yang setara dengan 103,85% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 71,27. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 71,67, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 96,28% dari target akhir Renstra.

c. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diperoleh dari hasil konversi data pengukuran konsentrasi polutan udara ambien rata-rata (harian/tahunan) ke dalam angka indeks tanpa satuan.

Berdasarkan deskripsi, analisis data hasil perhitungan dan pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Tanah Laut masih memenuhi Baku Mutu yang ditetapkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Status Mutu udara ambien berdasarkan 2 metode perhitungan analisa yaitu metode Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan metode Passive Sampler yang digunakan sebagai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Tanah Laut.

A. Metode Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) dan kebisingan dilaksanakan pada 4 kawasan Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Kawasan Padat Transportasi

Jl. A. Yani KM. 123 Desa Simpang Empat Asam Asam

2. Kawasan Pemukiman

Depan Masjid Al-Ikhlas Jl. Komplek Kijang Mas

3. Kawasan Perkantoran

Depan Kantor Bupati Tanah Laut

4. Kawasan Industri

Depan PT. Indofood Tbk

Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan analisa Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Tanah Laut semua memenuhi baku mutu. Pada tingkat kebisingan, pengukuran pada periode I dan periode II terdapat sampel yang melebihi Baku Mutu Tingkat kebisingan yaitu pada Kawasan Pemukiman dan Kawasan Perkantoran.

Tingginya nilai tingkat kebisingan dapat berdampak terhadap masyarakat yaitu pada gangguan psikologis tahap ringan yaitu terhadap gangguan tidur.

Tabel 3.2.55
Hasil Uji Kualitas Udara Ambien (ISPU) Periode I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Padat Transportasi Jl. A. Yani KM. 123 Simpang Empat Asam Asam	Pemukiman Depan Mesjid Al-Ikhlas Jl. Komplek Kijang Mas	Perkantoran Depan Kantor Bupati Tanah Laut	Perindustrian Depan PT. Indofood Tbk	Keterangan
1.	Suhu	°C	-	34,2	32,2	32	30	Manual Alat
2.	Kecepatan Angin	m/s	-	0,2682	0,8493	0,1341	0,0894	Manual Alat
3.	Arah Angin	dari	-	Timur – Barat	Timur – Barat	Barat - Timur	Barat – Timur	Manual Alat
4.	Kelembaban	% RH	-	76	76	62	70	Manual Alat
5.	TSP	µg/Nm ³	230 (24 Jam)	9,88	0,59	0,97	2,73	SNI 7119.3-2017
6	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	200 (1 Jam)	106,21	106,21	7,63	93,69	SNI 7119.2-2017
7	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	60,1	38,34	41,63	53,53	SNI 7119.7-2017
8	Oksidan sebagai Ozon (O ₃)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	23,08	6,24	7,63	14,72	SNI 7119.8-2017
9	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	10000 (1 Jam)	<115	<115	<115	<115	SNI 7119.10-2010
10	Kebisingan	Db(A)		64,6	63,9	63,4	64,1	SNI 8427-2017

Tabel 3.2.56
Hasil Uji Kualitas Udara Ambien (ISPU) Periode II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Padat Transportasi Jl. A. Yani KM. 123 Simpang Empat Asam Asam	Pemukiman Depan Mesjid Al-Ikhlas Jl. Komplek Kijang Mas	Perkantoran Depan Kantor Bupati Tanah Laut	Perindustrian Depan PT. Indofood Tbk	Keterangan
1.	Suhu	°C	-	30	32,6	32,2	34	Manual Alat
2.	Kecepatan Angin	m/s	-	3,3525	0,0447	0,1341	0,46935	Manual Alat
3.	Arah Angin	dari	-	Barat – Timur	Barat – Timur	Barat – Timur	Barat – Timur	Manual Alat
4.	Kelembaban	% RH	-	59	63	63	68	Manual Alat
5.	TSP	µg/Nm ³	230 (24 Jam)	23,86	4,70	3,61	23,04	SNI 7119.3-2017
6	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	µg/Nm ³	200 (1 Jam)	6,70	8,78	6,21	13,91	SNI 7119.2-2017
7	Sulfur Dioksida (SO ₂)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	1,86	2,34	1,38	3,33	SNI 7119.7-2017
8	Oksidan sebagai Ozon (O ₃)	µg/Nm ³	150 (1 Jam)	17,73	14,9	13,52	7,76	SNI 7119.8-2017

9	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm ³	10000 (1 Jam)	<115	<115	<115	<115	SNI 7119.10-2010
10	Kebisingan	Db(A)		69,30	63,7	63.1	68	SNI 8427-2017

Tabel 3.2.57
Hasil Uji Tingkat Kebisingan Periode I Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Baku Mutu Sesuai Lokasi Pengambilan Sampel (db)	Hasil Analisa (dB)	Ket
1	Depan Kantor Bupati Tanah Laut	60	63,4	
2	Depan Mesjid Al Ikhlas Jl.Komplek Kijang Mas	55	63,9	
3	Depan PT. Indofood Raya Tbk	70	64,1	
4	Jl.A.Yani KM.123 Simpang 4 Asam Asam	70	64,6	

Tabel 3.2.58
Hasil Uji Tingkat Kebisingan Periode II Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No	Lokasi Pengambilan Sampel	Baku Mutu Sesuai Lokasi Pengambilan Sampel (db)	Hasil Analisa (dB)	Ket
1	Depan Kantor Bupati Tanah Laut	60	63,1	
2	Depan Mesjid Al Ikhlas Jl.Komplek Kijang Mas	55	63,7	
3	Depan PT. Indofood Raya Tbk	70	68	
4	Jl.A.Yani KM.123 Simpang 4 Asam Asam	70	69,3	

B. Metode Passive Sampler dilaksanakan pada 4 kawasan Titik pengambilan sampel di Kabupaten Tanah Laut yaitu :

1. Kawasan Padat Transportasi,
2. Kawasan Pemukiman,
3. Kawasan Perkantoran,

4. Kawasan Industri

Status Mutu udara ambien berdasarkan metode perhitungan Passive Sampler semua memenuhi baku mutu dan Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2024 untuk Kabupaten Tanah Laut adalah 98,72 dan angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu 95,84 naik menjadi 2,88 point. Peningkatan ini pengaruh dari kegiatan penanaman pohon, bertambahnya RTH, Adanya angkutan umum gratis bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat emisi kendaraan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha yang memiliki emisi pada kegiatan usahanya.

Tabel 3.2.59
DATA PASSIVE SAMPLER PERIODE I & II TAHUN 2024 (PUSAT)

			Transportasi	Industri/Agro Industri	Perumahan	Perkantoran/Komersial
09/09/2025			Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari	PT IndofoodJl. A. Yani KM 3,2 Kec. Bati-Bati	Komplek Puri AnggoroJl. A. Yani Gg. H. Busa	Dinas Perkim dan LHJl. A. Syukri Komp. Gagas Permai
			-3.800.953	-3.543.106	-3.785.676	-3.797.235
			114.790.161	114.729.952	114.771.969	114.784.162
	NO2 (Nitrogen Dioksida)	NO2 (µg/m3)	4.16	5.98	1.71	2.01
	(Sulfur Dioksida)	SO2 (µg/m3)	5.9	7.36	2.88	4.19

			Transportasi	Industri/Agro Industri	Perumahan	Perkantoran/Komersial
26/11/2025			Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari	PT IndofoodJl. A. Yani KM 3,2 Kec. Bati-Bati	Komplek Puri AnggoroJl. A. Yani Gg. H. Busa	Dinas Perkim dan LHJl. A. Syukri Komp. Gagas Permai

			-3.800.953	-3.543.106	-3.785.676	-3.797.235
			114.790.161	114.729.952	114.771.969	114.784.162
	NO2 (Nitrogen Dioksida)	NO2 (µg/m3)	5.52	6.46	2.85	3.92
	(Sulfur Dioksida)	SO2 (µg/m3)	4.09	7.34	2.65	4.11

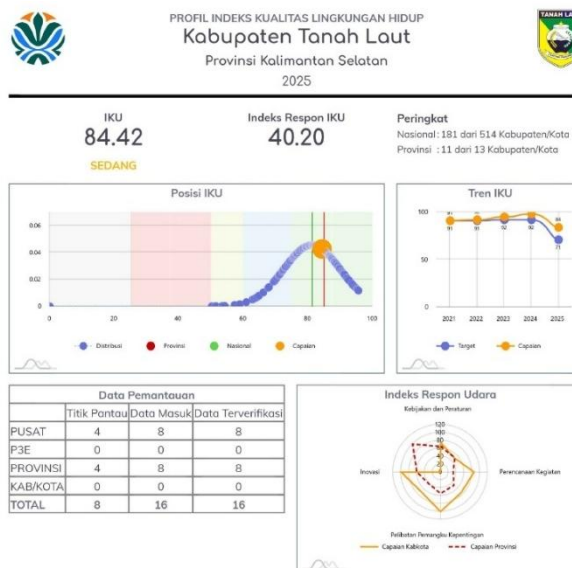
Tabel 3.2.60
DATA PASSIVE SAMPLER PERIODE I & II TAHUN 2025 (PROVINSI)

			Perkantoran	Permukiman	Transportasi	Industri
12/11/2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Komp.Perkantoran Gagasan Jl. Datu Insyad No.210 Kel. Angsau Kec. Pelaihari,		Komplek Perumahan Cahaya Angsau Residence Jl. Simpang Kuburan Muslimin Kel. Angsau Kec. Pelaihari,	Jl. H. Boejasin Kel. Angsau Kec. Pelaihari,	PT. Japfa Comfeed Indonesia Feed Division Jl. A.Yani Km. 7 No.123 , Nusa Indah, Kec. Bati-Bati	
			-379.635	-3.789.114	-3.799.302	-3.574.782
			11.478.174	114.779.885	114.781.223	114.727.186
	NO2 (Nitrogen Dioksida)	NO2 (µg/m3)	3.7	3.2	1.4	0.98
	(Sulfur Dioksida)	SO2 (µg/m3)	1.1	2.5	0.98	0.82

			Perkantoran	Permukiman	Transportasi	Industri
20/11/2025	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Komp.Perkantoran Gagasan Jl. Datu Insyad No.210 Kel. Angsau Kec. Pelaihari,		Komplek Perumahan Cahaya Angsau Residence Jl. Simpang Kuburan Muslimin Kel. Angsau Kec. Pelaihari,	Jl. H. Boejasin Kel. Angsau Kec. Pelaihari,	PT. Japfa Comfeed Indonesia Feed Division Jl. A.Yani Km. 7 No.123 , Nusa Indah, Kec. Bati-Bati	
			-379.635	-3.789.114	-3.799.302	-3.574.782

		11.478.174	114.779.885	114.781.223	114.727.186	
	NO2 (Nitrogen Dioksida)	NO2 (µg/m3)	2.5	1.7	4.5	5.7
	(Sulfur Dioksida)	SO2 (µg/m3)	0.85	1.2	3.6	1

Grafik 3.1.2
Indeks Kualitas Udara Tahun 2021 – 2025



Sumber : Aplikasi IKLH Kalimantan Selatan

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kualitas Udara Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tercatat sebesar 65,43, atau setara dengan 91,1% dari target yang telah ditetapkan sebesar 71,82. capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 98,72 dengan tingkat pencapaian 107,12% terhadap target tahun 2024.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 91,85 dan terus meningkat menjadi 95,84 pada 2023, pada tahun 2024 memperoleh nilai 98,72 dan pada tahun 2025 sebesar 84,42.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kualitas Udara Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tercatat mencapai 84,42, yang setara dengan 117,54% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 71,82. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 72,22, capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 116,89% dari target akhir Renstra.

d. Indeks Kualitas Lahan

Indeks Kualitas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diperoleh dari perhitungan gabungan dua

komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Data ini mencerminkan kondisi atau tingkat kesuburan lahan, yang dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) berdasarkan data citra satelit dan survei lapangan terkait penutupan vegetasi, hutan, dan gambut.

Hutan merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah pengendalian daur air, erosi dan longsor lahan. Harapan ini perlu didukung bersama untuk diwujudkan, karena banyak kelebihan ekosistem hutan untuk mewujudkan harapan tersebut. Nilai peran hutan ditentukan oleh luas, jenis, watak pertumbuhan, keadaan pertumbuhan dan struktur hutannya. Ekosistem hutan juga dipengaruhi oleh keadaan iklim, geologi, watak tanah dan geomorfologi, sehingga di dalam membangun hutan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dan masalah kependudukannya. Angka kualitas lahan mengalami peningkatan yang semula 44,27 menjadi 44,67. Luas Tutupan Lahan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.61
Perbandingan hasil perhitungan indeks kualitas lahan di Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024 dan tahun 2025

Tutupan	Tahun 2024	Tahun 2025
	Luas (Ha)	
Luas Tutupan Hutan	59949,80	63854,28
Luas Belukar dalam Kawasan Hutan	31882,17	29438,16
Luas Belukar pada Kawasan berfungsi Lindung	3172,71	2620,24
Luas RTH	9712,41	9949,00
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	7554,73	6726,63
IKL	44,27	65,17

Sumber: KLHK, 2025

Tabel 3.2.62
Daftar pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha Tahun 2025

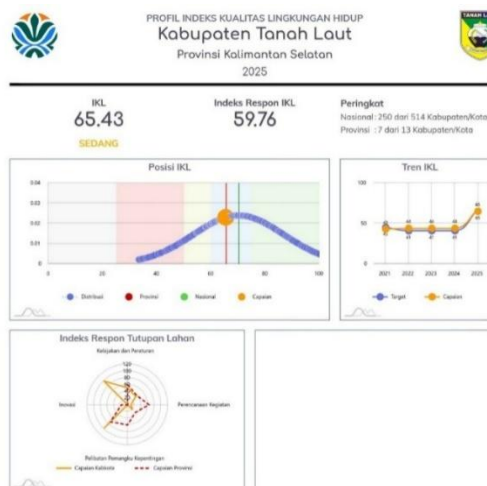
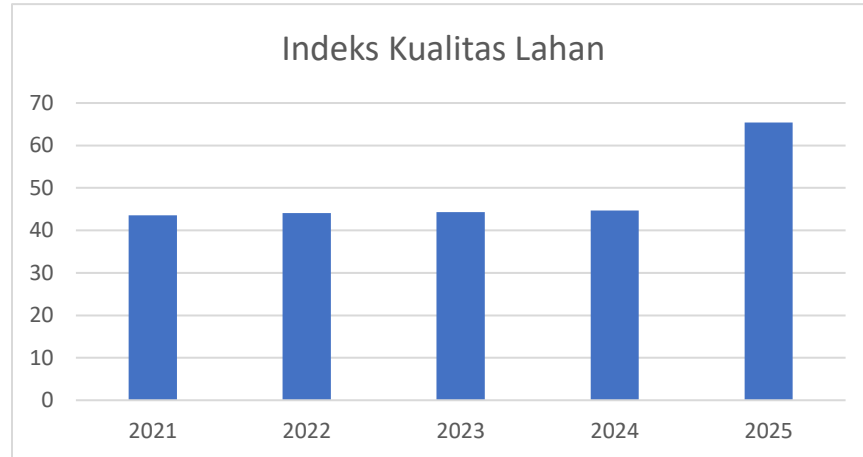
No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Lokasi	Hasil Pengawasan
1	PT. Sentosa Sukses Utama	30 Januari 2025	Ds. Bingkulu Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat
2	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 22	6 Februari 2025	Ds. Liang Anggang Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
3	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 30	6 Februari 2025	Ds. Pulau sari Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat
4	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit 38	6 Februari 2025	Ds. Pulau sari Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat
5	RSUD KH. Mansyur	6 Februari 2025	Ds. Kintap Kec. Kintap	Taat
6	Endik Medical Clinic	6 Februari 2025	Ds. Kintap Kec. Kintap	Tidak Taat
7	PT. Sarana Subur Agrindotama	11 Februari 2025	Ds. Jorong Kec. Jorong	Tidak Taat
8	PT. Mandiri Perkasa Plant	11 Februari 2025	Ds. Simpang Empat Baru Kec. Jorong	Tidak Taat
9	RSUD H. Boejasin	12 Februari 2025	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Tidak Taat
10	Koperasi Sawit Makmur (PT. BGMPA)	18 Februari 2025	Ds. Tajau Mulya Kec. Batu Ampar	Taat
11	PT. Smart, Tbk	18 Februari 2025	Kec. Kintap	Tidak Taat
12	PT. Karimata Timur	20 Februari 2025	Ds. Nusa Indah Kec. Bati-Bati	Taat
13	PT. Bintang Jasa Abadi	20 Februari 2025	Ds. Nusa Indah Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
14	PT. Ciomas Adisatwa (RPA)	27 Februari 2025	Ds. Ujung Baru Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
15	PT. Dutasatrya Adhipersada	27 Februari 2025	Ds. Banyu Irang Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
16	Yayasan Izdihar Ibunda	12 Maret 2025	Kec. Pelaihari	Taat
17	Azka Medical Centre	12 Maret 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat
18	Rumah Sakit Ammariz	13 Maret 2025	Kec. Pelaihari	Taat
19	PT. Mitra Sehat Borneo (RSBCM)	13 Maret 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat
20	Hotel Tuntung Pandang	18 Maret 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat
21	Hotel Sinar	18 Maret 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat
22	Rumah Potong Hewan	19 Maret 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat
23	CV. Trio Motor Pelaihari	19 Maret 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat
24	PT. Sarana Doa Bersama	25 Maret 2025	Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat
25	PT. Air Telaga Surya	10 April 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
26	PT. Patriot Intan Abadi	22 April 2025	Kec. Tambang Ulang Ds. Pulau Sari	Tidak Taat
27	PT. Patriot Intan Abadi	22 April 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Kait-Kait	Tidak Taat
28	PT. Patriot Intan Abadi	22 April 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Bentok Kampung	Tidak Taat
29	PT. Patriot Intan Abadi	22 April 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Liang Anggang	Tidak Taat
30	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	23 April 2025	Kec. Tambang Ulang Ds. Bingkulu	Tidak Taat
31	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	23 April 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	Tidak Taat
32	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	23 April 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Sambangan	Tidak Taat

33	PT. Buana Manira Prakarsa	30 April 2025	Kec. Pelaihari Ds. Sungai Riam	Tidak Taat
34	PT. Ciomas Adisatwa Farm 1	15 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
35	PT. Ciomas Adisatwa Farm 2	15 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
36	PT. Ciomas Adisatwa Farm Bentok 1	15 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
37	PT. Ciomas Adisatwa Farm Bentok 2	15 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
38	PT. Hepi Bornio	21 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
39	UD. Kandang Biru	21 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
40	Arvin Rismawan	21 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
41	CV. Bintang Banua Abadi	21 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
42	PT. Rukun Abadi Sejahtera	22 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
43	Lihin Rustafa	22 Mei 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
44	PT. Sarana Subur Agrindotama	2 Juni 2025	Kec. Panyipatan Ds. Kandangan Lama & Ds. Batu Tungku	Tidak Taat
45	PT. Sarana Subur Agrindotama	2 Juni 2025	Kec. Panyipatan Ds. Bumi Asih & Ds. Kuringkit	Tidak Taat
46	PT. Sariguna Primatirta, Tbk	3 Juni 2025	Kec. Tambang Ulang Ds. Pulau Sari	Tidak Taat
47	PT. Sukses Wijaya Adimakmur	3 Juni 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Nusa Indah	Tidak Taat
48	CV. Saprotan Utama	18 Juni 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	Tidak Taat
49	PT. Kelana Multi Kontruksi	18 Juni 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	Taat
50	PT. Pugung Raya Blok A1	18 Juni 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	Tidak Taat
51	PT. Pugung Raya Blok A2	18 Juni 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	Tidak Taat
52	PT. Pugung Raya Blok A3	18 Juni 2025	Kec. Bati-Bati Ds. Banyu Irang	Tidak Taat
53	H. Hasanudin	19 Juni 2025	Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat
54	PT. Putra Kanca	19 Juni 2025	Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat
55	PT. Bimo Laksana Group	19 Juni 2025	Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat
56	CV. HU Berkah Bersaudara	19 Juni 2025	Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat
57	Labkesda	16 Juli 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat
58	PT. Citra Putra Kebun Asri	28 Juli 2025	Kec. Kintap Desa Salaman	Tidak Taat
59	PT. Citra Putra Kebun Asri	28 Juli 2025	Kec. Kintap Desa Riam Adungan I	Tidak Taat
60	PT. Citra Putra Kebun Asri	28 Juli 2025	Kec. Kintap Desa Riam Adungan II	Tidak Taat
61	PT. Cahaya Mata Telur	30 Juli 2025	Kec. Tambang Ulang Desa Bingkulu	Tidak Taat
62	PT. Mitra Citra Gemilang	30 Juli 2025	Kec. Bati-Bati Desa Nusa Indah	Tidak Taat
63	PT. Citra Putra Kebun Asri	31 Juli 2025	Kec. Pelaihari Desa Pemuda	Tidak Taat
64	PT. Citra Putra Kebun Asri	31 Juli 2025	Kec. Batu Ampar Desa Jilatan	Tidak Taat
65	PT. Citra Putra Kebun Asri	31 Juli 2025	Kec. Jorong Desa Swarangan	Tidak Taat
66	PT. Citra Putra Kebun Asri	31 Juli 2025	Kec. Jorong Desa Jorong	Tidak Taat
67	PT. Wahyu Putra Ramadhan	03 September 2025	Kec. Jorong	Tidak Taat
68	Felix Sutanto	04 September 2025	Kec. Bati-Bati	Taat
69	Upt Laboratorium Lingkungan	1 Oktober 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat

70	TPA Bakunci	1 Oktober 2025	Kec. Pelaihari	Tidak Taat
71	Ir. H. Edy Sudarmadi	2 Oktober 2025	Kec. Tambang Ulang Desa Martadah	Tidak Taat
72	Rumah Sakit Umum Daerah	14 Oktober 2025	Kec. Bumi Makmur Desa Bumi Harapan	Tidak Taat
73	PT. Panen Embun Kemakmuran	15 Oktober 2025	Kec. Bati-Bati	Taat
74	PT. Tri Industri Alami	15 Oktober 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
75	PT. Tuju Kuda Hitam Sakti	16 Oktober 2025	Kec. Kintip Desa Kintipura	Tidak Taat
76	PT. Penguin Indonesia	16 Oktober 2025	Kec. Kintap Desa Pandansari & Kintapura	Tidak Taat
77	PT. Indoraya Everlatex	16 Oktober 2025	Kec. Kintap Desa Pandansari & Kintapura	Taat
78	PT. Indoraya Everlatex	16 Oktober 2025	Kec. Kintap Desa Pasir Putih & Kintap Kecil	Taat
79	PT. Indoraya Everlatex	16 Oktober 2025	Kec. Jorong Desa Swarangan, Desa Karang Rejo & Jorong	Taat
80	PT. Indoraya Everlatex	16 Oktober 2025	Kec. Jorong Desa Jorong	Taat
81	PT. Indoraya Everlatex	16 Oktober 2025	Kec. Jorong Desa Batalang & Kec. Batu Ampar Desa Damit Hulu	Taat
82	PT. Pola Kahuripan Inti Sawit	17 Oktober 2025	Kec. Kintap Desa Kintapura	Taat
83	PT. Doddy Budiyanto (PT. Dalfena Borneo Famili)	29 Oktober 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
84	PT. A'Dhom Farm Indonesia	29 Oktober 2025	Kec. Bati- Bati	Tidak Taat
85	PT. Prima Rezeki 1	29 Oktober 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
86	PT. Prima Rezeki 2	29 Oktober 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
87	PT. Mekar Rezeki Jaya	29 Oktober 2025	Kec. Bati-Bati	Taat
88	PT. Emida	25 November 2025	Kec. Jorong desa Jorong	Tidak Taat
89	PT. Kintap Jaya Wattindo PKS Kintap	19 Desember 2025	Kec. Kintap Desa Pandansari	Taat
90	PT. Kintap Jaya Wattindo	24 Desember 2025	Kec. Bajuin Desa Tebing Siring	Tidak Taat
91	PT. Kintap Jaya Wattindo PKR	24 Desember 2025	Kec. Bati-Bati Desa Liang Anggang	Tidak Taat
92	PT. Kintap Jaya Wattindo	29 Desember 2025	Kec. Takisung Desa Ranggung	Tidak Taat
93	PT. Candi Artha	30 Desember 2025	Kec. Batu Ampar Desa Tajau Pecah	Taat
94	PT. Lunik Anugerah	30 Desember 2025	Kec. Jorong	Taat
95	PT. Hasrat Jaya Utama	31 Desember 2025	Kec. Bati-Bati	Taat
96	PT. Lidy's Artha Borneo	31 Desember 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
97	PT. Salamandra Petramuya	31 Desember 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
98	PT. Sapta Jasa Kontruksi	31 Desember 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
99	PT. Tanjung Raya Bersama	31 Desember 2025	Kec. Bati-Bati	Tidak Taat
100	Waluyo	31 Desember 2025	Kec. Tambang Ulang	Tidak Taat

Sumber: DPRKPLH Kab. Tanah Laut 2025

Grafik 3.1.2
Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021 – 2025



1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian kinerja sasaran strategis perangkat daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang disajikan, capaian indikator "Indeks Kualitas Lahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tercatat sebesar 65,43, atau setara dengan 100.39% dari target yang

telah ditetapkan sebesar 65,17. Capaian kinerja pada tahun 2025 melampaui target dan menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, realisasi capaian pada tahun 2024 adalah 44,67, dari target yang telah ditetapkan sebesar 41,78 dengan tingkat pencapaian 106,92% terhadap target tahun 2024.

Tren peningkatan dari tahun ke tahun menunjukkan progres yang baik, mengingat capaian indikator pada tahun 2021 hanya sebesar 43,54 dan terus meningkat menjadi 44,08 pada 2022, pada tahun 2023 memperoleh nilai 44,27 dan pada tahun 2024 sebesar 44,67. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan kinerja yang signifikan dalam meningkatkan kepuasan anggota Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi

Indikator "Indeks Kualitas Lahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 tercatat mencapai 65,43 yang setara dengan 100,39% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 65,17. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (2029), yaitu sebesar 65,60 capaian hingga tahun 2025 telah mencapai 99,74% dari target akhir Renstra.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup "Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan", dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman, dan Lingkungan Hidup melaksanakan Peningkatan Wilayah yang Memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha terhadap PPLH, Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau, Peningkatan Pemanfaatan Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup, Peningkatan Sekolah Sadar Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Pengelolaan Sampah.

a. Peningkatan Wilayah yang Memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup

- **Penyediaan hasil uji kualitas lingkungan hidup sesuai standar.**
 - Penyediaan hasil uji kualitas air sungai yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi, meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi seperti pH, BOD, COD, TSS, DO, serta kandungan logam berat. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk laporan resmi dan dibandingkan dengan baku mutu kualitas air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Penyediaan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang mencakup parameter $PM_{2.5}$, PM_{10} , SO_2 , NO_2 , CO, dan O_3 . Pengujian dilakukan menggunakan metode standar nasional atau internasional, dan hasilnya dilaporkan sesuai baku mutu kualitas udara ambien yang ditetapkan pemerintah.
 - Penyediaan hasil analisis kualitas tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan dan potensi pencemaran, seperti kandungan logam berat (Pb, Hg, Cd), pH tanah, dan bahan organik. Pengujian dilakukan sesuai metode standar dan hasilnya digunakan sebagai dasar pengelolaan lahan.

Penyediaan hasil uji kualitas lingkungan hidup dilengkapi dengan:

- Sertifikat atau akreditasi laboratorium pengujian
- Metode pengujian yang digunakan
- Tanggal dan lokasi pengambilan sampel
- Interpretasi hasil uji terhadap baku mutu



2. Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan hidup

a) Pelaksanaan penanaman bibit pohon

Kegiatan ini merupakan upaya untuk menanam bibit Pohon Kembali secara rutinitas di setiap tahun bersama pihak-pihak yang diikut sertakan seperti Dinas Lingkungan hidup, Dinas Kehutanan, Sekolah-Sekolah, Lembaga Lingkungan dan lain sebagainya . Hingga sekarang, tercatat sudah 7000 bibit Pohon yang sudah ditanam di kabupaten Tanah laut dan akan terus bertambah disetiap tahunnya.



3. Peningkatan penyebaran informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

a) Pelaksanaan sosialisasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga kualitas udara ambien melalui edaran Bupati yang disampaikan ke masyarakat dan pelaku usaha. Khusus untuk masyarakat edaran Bupati tersebut disampaikan ke kecamatan dan desa-desa.



Memberikan informasi pengendalian pencemaran limbah domestik

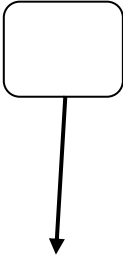
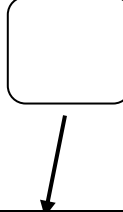
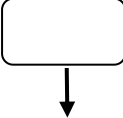
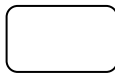


4. Peningkatan kualitas laboratorium pengujian

a) Pelaksanaan layanan laboratorium lingkungan sesuai standar

SOP PENCATATAN DAN PENYIMPANAN DATA SAMPEL DI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Website/ Administrator	Pejabat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pelanggan/Tim PPC menyerahkan sampel kepada Administrator Laboratorium	Mulai		Sampel			
2.	Administrator Laboratorium menerima dan mengidentifikasi sampel			Sampel	10 Menit		Identifikasi harus dilakukan dengan teliti dan benar



3.	<i>Administrator</i> Laboratorium mengisi data sampel melalui aplikasi secara daring			Sampel	30 Menit	Sampel - Data sampel tercatat dan tersimpan pada aplikasi - Kode sampel - Formulir permintaan pengujian sampel	Data sampel yang diinput harus secara detail dan lengkap
4.	<i>Administrator</i> Laboratorium mengisi data sampel melalui aplikasi secara daring <i>Administrator</i> Laboratorium memberi label pada sampel			- Kode sampel dari aplikasi - kertas label	5 Menit	- Kode sampel dari aplikasi - kertas label Sampel berlabel kode	
5.	<i>Administrator</i> Laboratorium mencetak formulir permintaan pengujian sampel			- Printer - Kertas Label 5 Menit	5 Menit	Formulir permintaan pengujian sampel	
6.	<i>Administrator</i> Laboratorium menyerahkan formulir permintaan pengujian sampel				5 Menit		
7.	Pelanggan menerima formulir permintaan pengujian sampel						
8.	Selesai						

b) Penyediaan alat laboratorium lingkungan sesuai standar

Penyediaan peralatan dan bahan yang ada di UPTD laboratorium Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sampai pada tahun 2025 telah memenuhi standar yaitu berupa alat kualitas air, kualitas udara, mikrobiologi dan alat lainnya. Kemudian diadakan bahan untuk kegiatan kantor lainnya seperti alat pendukung laboratorium, bahan kimia cair dan padat. Dan selalu melakukan Pemeliharaan peralatan laboratorium berupa Pemeliharaan kalibrasi yang dilakukan rutin karena

merupakan kewajiban sebuah laboratorium. Pada bulan juni 2025, dilakukan kalibrasi terhadap parameter yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dilaksanakan oleh Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 17 Alat, pada bulan agustus 2025 oleh Gema Instrumen Analitikal sebanyak 1 Alat, pada bulan Juli 2025 oleh Wira Lab sebanyak 1 Alat.

c) Penyediaan SDM laboratorium lingkungan bersertifikat

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia laboratorium Personel laboratorium berjumlah 15 orang mendapatkan pelatihan alat- alat pengadaan baru, serta pelatihan lainnya.

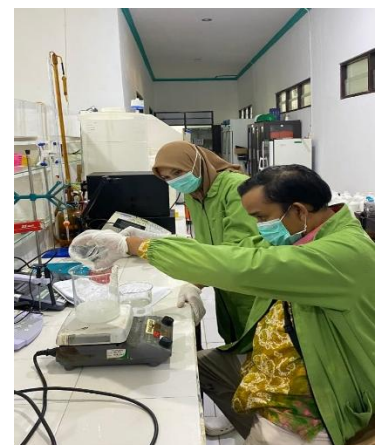


Foto-foto Kegiatan Pemeliharaan



foto Pelatihan yang diikuti UPTD Laboratorium Lingkungan Kab. Tanah Laut

b. Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha terhadap PPLH

1. Peningkatan pelaku usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin PPLH

a) Pelaksanaan persetujuan lingkungan terkait PPLH, penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi

Pengelolaan lingkungan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif secara ekonomi bagi pengusaha, pemerintah dan masyarakat tetapi tidak merugikan secara Lingkungan. Dampak negatif yang muncul dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian atau permasalahan lingkungan secara signifikan. Pada tahun 2025 terdapat 265 perusahaan yang penerbitan persetujuan Dokumen Lingkungan, izin lingkungan / persetujuan lingkungan dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Emisi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dasar dari dikeluarkannya izin lingkungan / persetujuan lingkungan adalah disetujuinya Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL) yang merupakan kesepakatan pengelolaan lingkungan dalam lingkup usaha dan/atau kegiatan. Didalamnya berisi langkah langkah pengelolaan yang mencakup Pengendalian

Pencemaran air (PPA), Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

2. Penyediaan pejabat pengawas lingkungan hidup yang kompeten

a) Pembentukan pejabat pengawas lingkungan hidup

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Di daerah, dikenal juga PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah). Pelatihan pejabat pengawas lingkungan hidup. Yang bertujuan untuk Menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap izin dan persetujuan lingkungan Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan Memperkuat penegakan hukum lingkungan secara administrative.

b) Pelatihan pejabat pengawas lingkungan hidup

Pelatihan ini bertujuan untuk membekali PPLH dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melakukan pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Materi pelatihan meliputi peraturan lingkungan hidup, teknik pengawasan dan pemeriksaan lapangan, pengambilan dan pengujian sampel lingkungan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta penerapan sanksi administratif. Pelatihan diselenggarakan oleh instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup dan menjadi syarat agar PPLH dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif dan sesuai ketentuan hukum.

3. Peningkatan pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan

a) Pengawasan ketaatan pelaku usaha

Ada 5 (lima) obyek pengawasan yang menjadi indikator ketaatan lingkungan terhadap ketentuan

1. Kesesuaian dokumen dengan kondisi senyatanya di lokasi kegiatan, seperti luasan, kapasitas produksi, peralatan, proses produksi, dll.
2. Kewajiban Pelaporan sebagai sarana pengawasan tidak langsung (pengawasan pasif).
3. Pengendalian Pencemaran Air (air limbah produksi dan air limbah domestik) yaitu persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan SLO, fasilitas pengelolaannya (IPAL), dll.
4. Pengendalian Pencemaran Udara : persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi dan SLO, fasilitas pengelolaannya (alat pengendali emisi)
5. Pengelolaan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan Limbah B3 (Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) : rincian teknis pengelolaan limbah B3, fasilitas pengelolaan limbah B3 (TPS Limbah B3), Fasilitas penyimpanan B3(Gudang B3), dll.

Dari hasil evaluasi pengawasan bahwa pelanggaran lingkungan pada tahun 2025 yang banyak terjadi adalah berkenaan dengan pengendalian pencemaran air khususnya untuk air limbah domestik dan pengendalian pencemaran udara terkait persetujuan teknis pembuangan emisi dan SLO, serta pelaporan. Pada tahun 2025 sasaran

strategis Kabid P2KLH meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan kewenangan Kabupaten Tanah Laut dengan indikator :

1. Target Pengawasan :100 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
 2. Realisasi Pengawasan:100 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
 3. Target Ketaatan : 100 %
 4. Realisasi Ketaatan : $(19/100) \times 100\% = 19\%$
- b) Monitoring tindak lanjut pengawasan

Dengan cara Menyusun jadwal pengawasan yang memprioritaskan pelaku usaha dan/atau Pada tabel diatas di tahun 2025, dilakukan pengawasan terhadap 100 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan, diantara 100 pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut sebanyak 19 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang mentaati ketentuan dalam dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan Dan, Meningkatkan Presentase capaian ketaatan Perusahaan pada tahun 2026.





4. Peningkatan tindak lanjut pengaduan dampak lingkungan
 - a) Fasilitasi pengaduan PPLH



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. A. Syukri, Komplek Gagas Permai, Pelaihari 70814
 Telp (0512) 21552 Fax (0512) 21552

DATA PENGADUAN TAHUN 2025

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Warga Desa Nusa Indah	<ul style="list-style-type: none"> - Keluhan kebisingan dan debu dari kegiatan workshop/bengkel truk dan alat berat di Desa Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati - Sumber workshop/bengkel truk di gang Sabrina Komplek Langgeng Citra Persada Blok A 	08/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal 08 Januari 2025 pengaduan disampaikan oleh salah satu warga di gang Sabrina Komplek Langgeng Citra Persada Blok A, keluhan dampak kegiatan workshop/bengkel truk dan alat berat yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Getaran rumah saat menurunkan mesin atau alat berat 2. Suara bising/ribut saat malam hari mengganggu waktu istirahat/tidur 3. Debu saat siang hari dari aktivitas las, dikhawatirkan ada partikel- partikel yang membahayakan lingkungan sekitar 4. Seringnya mengganggu akses jalan pada saat lalu lintas armada yang penurunan mesin/alat berat. - Dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan Bati-Bati terkait keberadaan workshop/bengkel truk di area permukiman yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar berupa keluhan suara bising dan debu - Pada tanggal 13 Januari 2025 Pihak kecamatan, Pol PP dan kepala desa Nusa Indah telah melakukan peninjauan ke lokasi dan melakukan komunikasi dengan penanggung jawab workshop/bengkel dan mereka bersedia untuk pindah lokasi kegiatan dan sudah mempersiapkan lokasi baru.
2	Warga Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap	Dugaan pencemaran sungai akibat Over Burden (OB) tambang batubara ilegal Dusun Batu Anting	24/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal 24 April 2025 dilakukan monitoring pengaduan ke Dusun Batu Anting dengan kegiatan sbb : - Koordinasi dengan Banit Tipidter Polres Tala, Danramil Kintap, Kanit Reskrim Polsek Kintap, Kasi Trantib Kecamatan Kintap, Kepala Desa Kintap Kecil, Kepala Dusun Kintap Kecil dan penanggung jawab tambang Dusun Batu Anting. - Melakukan peninjauan lokasi secara bersama-sama untuk melihat progress tindak lanjut perbaikan pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan sesuai dengan Surat Kepala DPRKPLH Nomor : 660/35-PPKLH/DPRKPLH/IX/2024, tanggal 24 September 2024 perihal : Surat Peringatan - Melakukan pengamatan terhadap lokasi kegiatan penambangan batubara, permukiman terdekat dan kondisi sungai Kintap Kecil. - Melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto/video dengan kamera dan drone area area kegiatan penambangan dan sekitarnya. <p>Hasil monitoring lapangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi terlihat adanya aktivitas pertambangan batubara di dusun Batu Anting RT.01 Desa kintap Kecil. Terdapat beberapa alat berat di sekitar area kegiatan. ➢ Pada area tambang yang bersebelahan dengan sungai kintap terlihat tumpukan OB tambang yang mengalami

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>longsor di sepanjang sepadan sungai hingga masuk ke aliran sungai.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pada area sisi sungai terdapat siring-siring dari batang pohon kelapa yang menurut informasi dilapangan, siring tersebut dibuat untuk menahan longsor OB tambang agar tidak masuk ke aliran sungai, upaya penyirangan masih dalam proses karena menunggu kondisi sungai surut. <p>Saran Tindak Lanjut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar segera dilakukan upaya pengerokan lumpur OB tambang yang masuk ke aliran sungai. 2. Agar dilakukan upaya pencegahan OB tambang kembali longsor dan tidak merusak sempadan sungai sejauh 100 meter dari sungai. <p>Upaya penyelesaian saran tindak lanjut ini agar sesegera mungkin dan menyampaikan progress perkembangan tindak lanjut setiap hari kepada Camat Kintap.</p>
3	Warga Desa Tampang Kecamatan Pelaihari	Pembakaran limbah medis RS	09/05/2025	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Pada tanggal 10 Mei 2025 dilakukan peninjauan ke lokasi untuk melihat langsung bukti adanya pembakaran limbah medis pada lokasi yang diadukan. Terlihat adanya sisa-sisa pembakaran limbah medis bercampur dengan limbah nonmedis. Kepada warga pelapor diminta untuk melakukan pemantauan pada lokasi apabila ada kegiatan pengangkutan dan pembakaran limbah medis lahi dan segera melaporkan ke DPRKPLH untuk segera ditindaklanjuti dan menemukan bukti langsung. ✚ Pada tanggal 19 Mei 2025 dilakukan verifikasi lapangan oleh TIM DPRKPLH <p>Hasil verifikasi lapangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pada saat dilakukan peninjauan ke lokasi ditemukan adanya sisa-sisa pembakaran sampah medis dan sampah domestik pada bak semen berbentuk persegi, disekitar lokasi pembakaran terdapat limbah medis berserakan seperti spuit bekas, impus set bekas, botol infus bekas, ampul bekas obat injeksi dll. Kondisi limbah medis tersebut ada berupa medis limbah baru dan ada juga limbah medis yg sudah lama berada dilokasi dalam waktu lama. ➢ Dilakukan konfirmasi terhadap penanggung jawab pengelolaan LB3 RSBCM, dengan kegiatan sbb: ➢ Melakukan pemeriksaan teknis pengelolaan TPS LB3 khususnya limbah medis, dengan hasil sbb: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pada TPS limbah medis terdapat tumpukan plastik berwarna kuning berisi limbah medis, kapasitas TPS limbah medis relatif kecil sehingga tumpukan plastik limbah medis hampir memenuhi ruangan dan terdapat limbah medis yang tercecer dilantai. 2) Menurut informasi penanggung jawab kesling RSBCM, jumlah limbah medis yang masuk ke TPS dicatat oleh petugas yang mengantar limbah medis pada papan

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>logbook limbah medis, kadang-kadang tidak tercatat oleh petugas.</p> <p>3) Jumlah limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan RSBCM berkisar 5 – 30 kg/hari.</p> <p>4) Melakukan pemeriksaan ruang incinerator</p> <p>5) Menurut informasi petugas dilokasi, incinerator dalam kondisi rusak</p> <p>6) Kondisi ruang incinerator terlihat kotor dan tidak tertata, terdapat limbah medis dibagian lantai ruang incinerator</p> <p>➤ Pada saat peninjauan ke RSBCM, ditemukan adanya kegiatan pengangkutan limbah dari rumah sakit menuju area luar, hasil penelusuran menunjukkan bahwa limbah yang diangkut tersebut adalah limbah medis dan limbah domestik RSBCM yang di timbun dan dibakar dilokasi Jl, A. Yani Desa Tampang, pihak manajemen RSBCM membenarkan bahwa limbah tersebut memang berasal dari RSBCM.</p> <p>Saran Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar segera dilakukan upaya pembersihan dan pemulihan area yang tercemar limbah medis 2. Agar semua limbah medis ditempatkan pada TPS LB3 dan segera dikelola untuk diserahkan pada pihak ketiga <p>Pada tanggal 28 Mei 2025 dilakukan monitoring progress tindak lanjut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan tindak lanjut perbaikan pengelolaan LB3. 2. Pemeriksaan tindak lanjut pembersihan dan pemulihan lahan tercemar limbah medis. 3. Melakukan pengumpulan dokumentasi berupa foto/video. <p>Hasil monitoring telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan teknis pengelolaan TPS LB3 hasil sbb: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitas penyimpanan LB3 dengan kapasitas TPS LB3 tidak memadai dengan jumlah limbah medis yang dihasilkan. Memiliki Izin LB3 Nomor : 140/012-PLB3/DPM-PTSP/2018 tanggal 26 Juni 2018 (masa berlaku sudah habis). Menurut informasi pengelola LB3 pada saat ini sedang proses pengajuan Rincian Teknis TPS LB3 ke DPRKPLH Kab. Tala, dalam tahap perbaikan dokumen. Akan dilakukan penambahan TPS LB3 dan rencana pemasangan incinerator baru di area paling belakang RSBCM. ➤ Berdasarkan berita acara pengangkutan LB3 dari PT. Sarana Bumi Lestari, telah dilakukan pengangkutan limbah infeksius padat pada tanggal 22 Mei 2025 sebanyak 703 kg dan pada tanggal 26 Mei 2025 sebanyak 217 kg. ➤ Limbah medis yang ada disimpan pada TPS limbah medis dengan suhu ruang. Pada lokasi terdapat coldstorage/freezer yang menurut informasi pengelola LB3 rencana akan digunakan untuk menyimpan limbah medis sementara sebelum diangkut pihak ketiga, namun belum difungsikan. Pada TPS LB3 masih ada LB3 yang belum terangkut dan masa simpannya sudah melebihi ketentuan teknis (90 hari pada suhu > 0°C) yaitu abu incinerator, pada pengawasan tahun 2024 hingga saat ini belum pernah ada pengangkutan. ➤ Pencatatan Limbah medis masih belum sesuai ketentuan teknis. ➤ Ditemukan limbah medis yang ditempatkan diluar area

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>TPS LB3, yaitu pada ruang belakang dekat rencana ruang incinerator yang baru berupa ampul bekas ampul obat ditampung dalam drum dan sebagian tercecer dilantai, dengan kondisi ada yang masih utuh dan ada yg berupa pecahan ampul obat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tidak ada pencatatan jumlah limbah medis yang dikeluarkan dari masing-masing unit penghasil LB3. ➤ Pencatatan pada logbook masih belum sesuai ketentuan, tidak ada data jumlah LB3 yang diangkut dan sisa LB3 yang disimpan. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pemeriksaan ruang incinerator <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurut informasi petugas, sudah dilakukan perbaikan incinerator sejak tanggal 26 Mei 2025 hingga hari ini (28 Mei 2025), belum dilakukan uji coba apakah incinerator berfungsi dengan baik atau tidak. Belum ada kegiatan pembakaran limbah medis di incinerator sehingga limbah medis yang dihasilkan akan tetap diserahkan dan diangkut oleh pihak ketiga. ➤ Kondisi ruang incinerator sudah dibersihkan dan sudah tidak ada lagi limbah medis berada diruang tersebut. <p>2. Melakukan monitoring/peninjauan ke lokasi Desa Tampang pada lahan yang wajib dilakukan upaya pembersihan dan pemulihan dari pencemaran limbah medis, dengan hasil sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada area tersebut sudah dilakukan upaya pembersihan dari limbah-limbah medis, sudah dilakukan pengangkutan semua limbah medis dan sisa-sisa pembakaran limbah medis, sehingga tidak ditemukan lagi adanya limbah medis dilokasi tersebut. ➤ Pada area tersebut dilakukan upaya pemulihan dengan mengembalikan kondisi tanah agar bisa berfungsi seperti sediakala. <p>Saran Tindak Lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera menyelesaikan proses penyusunan dokumen Rincian Teknis TPS LB3. 2. Segera melakukan perbaikan pencatatan jumlah LB3 dari masing-masing unit penghasil LB3 dan pencatatan pada logbook LB3 sesuai ketentuan teknis. 3. Segera menyerahkan limbah B3 yang masa simpannya sudah melebihi ketentuan teknis masa penyimpanan kepada pihak ketiga pengangkut LB3. 4. Menyampaikan laporan progress pelaksanaan saran tindak lanjut dalam berita acara ini kepada Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut. <p>Tim DPRKPLH akan terus melakukan pemantauan terhadap progress perbaikan pengelolaan LB3 di RSBCM.</p>

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Warga Desa Kintapura Kecamatan Kintap	Dugaan pencemaran sungai akibat Over Burden (OB) tambang batubara ke area kebun warga	26/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada tanggal 26 Juni 2025 diterima laporan salah satu warga Desa Kintapura terkait Dugaan pencemaran sungai akibat Over Burden (OB) tambang batubara ke area kebun warga ke DPRKPLH Tanah Laut yang juga ditembuskan ke DLH Prov. Kalsel ➤ Pada tanggal 9 Juli 2025 dilakukan pendampingan DLH Prov Kalsel kegiatan verifikasi pengaduan ke Desa Kintapura Kecamatan Kintap bersama-sama dengan perwakilan kecamatan Kintap dan perwakilan PT. Arumin Indonesia Site Asam-Asam. ➤ Hasil Verifikasi lapangan sbb : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada lokasi lahan yang diadukan berada pada area cekungan dan merupakan area titik terendah yang menjadi area aliran air pada saat terjadinya hujan. ➤ Pada lokasi tidak ditemukan adanya tanaman sawit yang mati ➤ Terlihat adanya tanaman sawit setinggi ± 50 cm, dengan perkiraan usia tanam < 1 thn ➤ Disekitar lahan terlihat ada tanggul baru yang dibuat oleh pihak PT. Arumin Indonesia Site Asam-Asam untuk mencegah masuknya aliran air dari area tambang ke lahan tersebut. ➤ Pihak PT. Arumin Indonesia Site Asam-Asam bersedia membantu pemulihan lahan yang terdampak tersebut, akan tetapi pemilik lahan tidak bersedia untuk dilakukan pemulihan, menuntut untuk dilakukan pembebasan lahan/ganti rugi saja. ➤ Terkait penyelesaian pembebasan lahan/ganti rugi ini sudah diluar ranah lingkungan hidup, maka agar diselesaikan antar kedua belah pihak.
5	Warga Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang	Kerusakan lingkungan akibat kegiatan galian tanah urug	21/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warga membuat surat pernyataan dan tandatangan penolakan adanya kegiatan tambang galian C/tanah urug di wilayah desa Bingkulu yang ditujukan kepada pengelola tambang tanah urug dan ditembuskan kepada Camat Tambang Ulang, Kapolsek Tambang Ulang dan Danposransil Tambang Ulang. ➤ Kegiatan tambang galian C. tanah urug tersebut tidak memiliki izin dan menjadi ranah aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban.

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Warga Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari	Keluhan kebisingan dampak kegiatan pengelolaan sarang burung walet	24/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pada tanggal 12 Agustus 2025 dilakukan koordinasi ke kelurahan Karang Taruna, bertemu dengan Kasi Kemasyarakatan. ➢ Disampaikan perihal adanya keluhan perwakilan warga terkait dampak kegiatan pengelolaan sarang burung walet agar bisa diselesaikan ditingkat RT. ➢ Karena belum ada tindak lanjut penyelesaian di tingkat RT, maka dilakukan rapat mediasi di kelurahan Karang taruna sekaligus peninjauan lapangan pada tanggal 9 September 2025, rapat dihadiri oleh Tim DPRKPLH Tala, perwakilan Satpol PP, perwakilan DPMPSTP, perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan, Lurah Karang Taruna, Ketua RW.4, Ketua RT. 9A, Pemilih Sarang burung walet dan beberapa perwakilan warga. ➢ KESEPAKATAN Mengingat kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sudah berjalan sebelum berkembangnya area permukiman sekitar, maka warga masih memberikan toleransi untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat tekanan suara/kebisingan pemanggil walet tidak melebihi ketentuan yang berlaku untuk tingkat kebisingan di area permukiman yaitu sebesar 55 desibel (dB). ➢ Waktu aktif pemanggil walet dari jam 06.00 WITA sampai dengan jam 18.00 WITA. ➢ Pemilik usaha agar melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala terhadap alat pemanggil suara sehingga berfungsi optimal dengan volume sesuai ketentuan. ➢ Apabila warga merasakan gangguan akibat terjadinya peningkatan volume pemanggil walet, maka segera melaporkan kepada pemilik usaha untuk segera dilakukan penyesuaian volume suara.

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Warga Desa Martadah Baru Kecamatan Tambang Ulang	Keluhan bau menyengat dampak kegiatan peternakan bebek petelur	28/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada tanggal 6 Agustus 2025 dilakukan koordinasi dengan kasi trantib kecamatan Tambang Ulang terkait pengaduan perwakilan warga Desa Martadah Baru Keluhan bau menyengat dampak kegiatan peternakan bebek petelur. ➤ Kemudian pada hari itu Bapak Camat bersama Tim melakukan peninjauan ke lokasi ternak bebek di desa Martadah Baru, diperoleh data bahwa awal izin kegiatan dilokasi tersebut adalah kandang sapi. Pemilik bukan warga desa Martadah Baru melainkan dari luar daerah. Merupakan usaha perorangan bukan perusahaan, tidak ada pengelolaan limbah kotoran bebek sehingga pada saat hujan kotoran akan larut terbawa aliran air masuk ke aliran anak sungai. Pihak desa sudah berupaya mengadakan pertemuan mediasi namun mengalami kendala karena pemilik usaha tidak berada di tempat. ➤ Pada tanggal 26 Agustus 2025 dilakukan musyawarah penyelesaian permasalahan aktivitas peternakan bebek petelur di Aula Desa Martadah Baru, dihadiri oleh perwakilan Satpol PP Tala, Kapolsek Tambang Ulang, Camat Tambang Ulang, perwakilan DPRKPLH Tala, Babinsa Martadah Baru, Babinkamtibmas Martadah Baru, Ketua BPD Martadah Baru, Ketua RT. 11, 12 dan 13 serta perwakilan warga terdampak. Hasil musyawarah : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Warga RT.11, 12 dan 13 sepakat untuk penutupan permanen kegiatan peternakan bebek petelur di RT. 11 RW 03 ➤ Batas waktu eksekusi 1 (satu) bulan ➤ Pemerintah desa Martadah Baru memfasilitasi dan mengawal proses penutupan peternakan bebek tersebut sesuai prosedur. ➤ Pada Tanggal 15 September 2025 dilakukan peninjauan lapangan bersama-sama oleh tim Satpol PP, dan Damkar, Bagian Hukum Setda, DPM-PTSP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPUPR, Kecamatan Tambang Ulang dan Aparat Desa Martadah Baru ke lokasi peternakan bebek petelur di Desa Martadah Baru RT. 11 RW. 03 Kecamatan Tambang Ulang, dengan hasil sbb: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Usaha kegiatan belum memiliki perizinan berusaha, belum memiliki SPPL sesuai dengan ketentuan dalam perizinan berusaha yang berisi pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan dampak yang ditimbulkan dari usaha/kegiatan yang dilakukan. SPPL ini terintegrasi dalam perizinan berusaha melalui OSS. ➤ Berdasarkan ketentuan pada PPRI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : pasal 4 bahwa setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki Amdal/ UKL-UPL/SPPL. Pasal 7 ayat (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap Lingkungan Hidup.

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berdasarkan hasil pengamatan kondisi usaha/kegiatan peternakan bebek diperoleh fakta lapangan sbb : <ul style="list-style-type: none"> ✚ Pada saat peninjauan dilokasi, pada kegiatan peternakan bebek terdapat 3 kandang berbahan kayu dan bambu desain berbentuk bangunan panggung dengan kapasitas total ± 3.000 ekor. ✚ Pada bagian bawah kandang berupa lantai tanah/tidak kedap air dimana kotoran bebek pada kandang akan jatuh dan mengalami penumpukan. Pada bagian bawah kandang terlihat ada sekam yang disebar (kondisi masih baru) yang berfungsi agar bagian bawah kandang yang menampung kotoran bebek kondisi tetap kering. ✚ Kondisi lahan tempat kandang dibangun dengan tingkat kemiringan yang semakin rendah pada area bagian depan ke bagian area belakang, pada lahan di belakang area kandang terdapat area gantung/cekungan. Pada saat terjadi aliran air hujan, kotoran bebek dibagian bawah kandang berpotensi terbawa aliran masuk ke area gantung dan mengalir ke area-area yang lebih rendah hal ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. ➤ Kondisi kandang relatif bersih dan ada perlakuan pelapisan sekam dibawah kandang serta penyemprotan EM4 dan kapur sehingga pada Area kandang saat verifikasi sudah ada penurunan kebauan. ➤ Pelaku usaha menyatakan bersedia dibina dan diberikan masukan untuk melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan. <p>Saran tindak lanjut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pemilik usaha memenuhi kewajiban terhadap dokumen lingkungan (SPPL) 2. Agar pemilik usaha konsisten melakukan perbaikan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan 3. Membuka diri terhadap masukan dan saran dari masyarakat sekitar untuk tetap menjaga dan meangantisipasi dampak lingkungan. <p>Selalu menjaga hubungan sosial kemasyarakat sehingga keberadaan kandang bisa bersinergi terhadap sosial masyarakat.</p>
8	Warga Desa Kintapura Kecamatan Kintap	Banjir area kebun warga dampak dari kegiatan tambang batu bara PT. Arumin Indonesia Site Asam- Asam	18/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada tanggal 17 September 2025 dilakukan rapat audiensi di Aula DPRKPLH terkait keluhan banjir area kebun warga di Desa Kintapura RT. 02 Kecamatan Kintap. Rapat dihadiri oleh perwakilan Polres Tanah Laut, Polsek Kintap, Danposranmil Kintap, Camat Kintap , perwakilan PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam dan perwakilan warga terdampak. Hasil kesepakatan audiensi sbb : <ol style="list-style-type: none"> 1) Solusi yang harus segera dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir di RT. 2 Desa Kintapura, dengan melakukan normalisasi aliran air dengan membuat jalur air sehingga saat hujan tidak terjadi lagi genangan. 2) Membuka titik titik penyumbatan dan hambatan untuk melancarkan aliran air. 3) Upaya normalisasi aliran air dibantu pihak PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam bersama-sama dengan masyarakat. 4) Pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam bersama-sama masyarakat akan melakukan eksekusi awal dilapangan ➤ Pada tanggal 18 September 2025 pihak perusahaan

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>bersama-sama dengan warga melakukan pembuatan saluran untuk mengalirkan air dari area kebun warga agar banjir tidak terjadi lagi pada saat turun hujan. Namun ada kendala dalam penyelesaian pembuatan saluran. Karena area tanahnya lembek sehingga tidak memungkinkan alat berat untuk beroperasi. Namun sudah ada progress penurunan debit air pada area kebun warga yang biasa mengalami banjir.</p> <p>➤ Pada tanggal 9 Oktober 2025 tim DPRKPLH melakukan monitoring progress ke lokasi didampingi warga, dengan hasil sbb:</p> <p>1) Lokasi rumah Bapak Akhmad Rusyadi berada di Desa Kintapura RT. 02 (Koordinat X 0300247, Y 9571751, Elevasi 10 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada saat peninjauan lokasi, kondisi tanah kering/tidak terjadi banjir. ➤ Pada lokasi terdapat 2 buah rumah, 1 buah pondok dan 1 buah bangunan tempat makan lesehan yang kondisinya sudah rusak. Bangunan-bangunan tersebut terbuat dari kayu. Menurut informasi Bapak A. Rusyadi, rumah tersebut biasanya dipergunakan untuk tamu beristirahat, ketika ada acara kunjungan. ➤ Pada dinding rumah bagian luar terlihat bekas ketinggian air ketika terjadi banjir di area tersebut. ➤ Menurut informasi beliau, area tersebut akan tergenang air/banjir pada saat terjadi hujan karena aliran air terganggu akibat adanya OB tambang. <p>2) Lokasi pembuatan saluran/jalur air (Koordinat X 0300083, Y 9571898, Elevasi 13 m)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada saat peninjauan lokasi, telah dilakukan pembuatan paritan baru oleh PT. Arutmin Indonesia Site Asam-Asam ditembuskan ke paritan yang sudah ada, yang berada di sisi OB tambang dengan arah alirannya hingga ke sungai kintap sejauh ± 3 Km. ➤ Berdasarkan peta citra jarak lokasi rumah Bapak Akhmad Rusyadi ke paritan ± 220 meter. ➤ Berdasarkan hasil pengukuran elevasi menunjukkan bahwa area paritan cenderung relatif sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan area rumah Bapak Rusyadi, sedangkan paritan yang sudah ada sebelumnya kondisinya mengalami pendangkalan akibat sedimentasi, hal ini akan mempengaruhi lancarnya aliran air menuju paritan. ➤ Menurut informasi Bapak Akhmad Rusyadi kegiatan pembuatan paritan dihentikan sementara untuk melihat efektifitas paritan yang sudah dibuat terhadap penurunan debit air pada area yang tergenang. Setelah diamati, menurut beliau memang ada penurunan debit air yang tergenang pada saat terjadi hujan <p>Saran tindak lanjut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agar upaya normalisasi aliran air dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan rapat audiensi. 2. Untuk melancarkan aliran air, agar dilakukan upaya normalisasi paritan yang mengalami pendangkalan.

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Warga Desa Panggung Kecamatan Pelaihari	Area Nilai konservasi Tinggi (NKT) milik PTPN XIII yang berada di lahan milik warga	23/09/2025	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Salah satu warga desa Panggung mengadukan bahwa pada area lahan kebun miliknya telah di pasang papan nama area NKT PTPN, lahan tsb merupakan lahan milik orang tuanya yang dikuasai selama bertahun- tahun. ➢ Disarankan untuk melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan terkait hal tsb ➢ Disarankan untuk melakukan pengecekan legalitas tanah ke BPN
10	Warga Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari	Keluhan dampak bau menyengat dan suara bising Kegiatan peternakan unggas (ayam, bebek, angsa)	19/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal 24 Nopember 2025 dilakukan koordinasi ke kelurahan sarang halang terkait pengaduan warga Warga Kelurahan Sarang Halang untuk bisa ditindaklanjuti di tingkat RT. - Ketua RT berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pemilik usaha dan warga yang melaporkan, namun belum bisa komunikasi dengan pelapor. - Pada tanggal 17 Desember 2025 Lurah Sarang Halang beserta tim, tim DPRKPLH dan Ketua RT setempat melakukan peninjauan ke lokasi. Dengan fakta lapangan sbb: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pada saat peninjauan ke lokasi rumah pelapor, bagian belakang yang bersebelahan dengan area kandang ternak unggas, ada tercium bau dari kotoran ternak. 2. Pada saat peninjauan ke lokasi rumah pemilik kandang ternak unggas, diperoleh hasil pengamatan sbb : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Area kandang untuk budidaya unggas berada di area samping rumah pemilik. Pada sisi disebelah rumah pemilik dengan area budidaya dibatasi oleh kandang kayu dan jala/paranet, sedangkan area sisi yang berbatasan dengan rumah tetangga di batasi oleh tembok beton. ➢ Terdapat beberapa buah bangunan kandang ayam terbuat dari kayu yang menempel pada tembok yang berada pada 2 sisi area, salah satunya adalah tembok milik Ibu Almiatun. ➢ Terdapat kolam kecil tampungan air untuk minum dan mandi bebek ➢ Pada area sekitar kandang terlihat ternak unggas berupa ayam, bebek dan angsa dengan total populasi > 30 ekor. ➢ Tidak ada pengelolaan terhadap kotoran unggas, kotoran hanya dibiarkan terurai alami di sekitar area kandang. ➢ Menurut informasi pemilik, kegiatan budidaya unggas tersebut hanya untuk menyalurkan hobby bukan untuk usaha perdagangan. 3. Akan dilakukan upaya mediasi antar kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama

No	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tgl pengaduan	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Pengaduan Warga Kintap Kecil Kecamatan Kintap via medsos	Keluhan air sungai Kintap keruh dan berlumpur, dugaan pencemaran OB tambang batubara	17/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Pada tanggal 18 Desember 2025 dilakukan verifikasi lapangan bersama- sama dengan TIM DPRKPLH Tala, Tim Labling, Camat Kintap dan perwakilan PT. AI dan PT. DH. - Dilakukan peninjauan ke lokasi sungai kintap, dilakukan pengukuran parameter insitu dan pengambilan sampel air sungai untuk dilakukan pengujian di Labling DPRKPLH - Dilakukan penelusuran aliran sungai hingga kebagian hulu untuk mengetahui sumber lumpur yang menyebabkan air sungai kintap tercemar - Dialiran sungai bagian hulu pada area tambang PT. DH dilakukan pengukuran parameter insitu dan pengambilan sampel air untuk uji di Labling - Hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa sumber pencemaran berupa lumpur yang dialirkan ke aliran sungai yang alirannya hingga ke sungai kintap berasal dari area kegiatan tambang PT. DH. Ditemukan adanya kegiatan pemompaan air void tambang dimasukkan ke aliran sungai sebanyak 2 titik

c. Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana RTH

Di Kabupaten Tanah Laut ini memiliki 2 (dua) Ruang Terbuka Hijau yaitu Ruang terbuka hijau **Kijang Mas permai** dengan luasan sekitar 10,124 Ha dan Ruang Terbuka **Hijau Hasan Basri** dengan luasan sekitar 2,027 Ha.

A. Ruang Terbuka Hijau Kijang Mas Permai

Dengan Luasan area 10,124 Ha RTH. Kijang Mas Permai memiliki banyak beragam flora, sarana prasarana pendukung aktivitas seperti jogging track ,toilet,pendopo, tempat sampah,tempat santai, pos jaga, permainan anak, area fitness outdoor, tempat aktivitas olahraga maupun green house dan pembibitan tanaman, serta composting. Untuk pengelolaan sampahnya, beberapa sudah ada pemilahan, untuk sampah organic seperti daun kering hasil sapuan petugas,akan di tempatkan ke dalam area bak bak composting yang tersebar di beberapa titik untuk di lakukan proses pengomposan. Sedang sampah an-organik, akan di kumpulkan dan diangkut ke TPA. Bakunci Disamping pemilahan dan pengomposan sampah , di RTH. Kijang Mas juga baru selesai dibangun tempat pengomposan,tempat pembibitan dan green house dalam satu area tempat. Kedepannya diharapkan RTH.Kijang Mas dapat mengolah dan mengcover akan kebutuhan pupuk organic nya sendiri.

Dalam beberapa bulan terakhir, dilakukan penanaman pohon yang bibitnya berasal dari perbanyakan tanaman (angsana) oleh petugas kami, pembelian tanaman, bibit tanaman buah dari pihak ketiga seta pemberian bibit tanaman pelindung dari KPH pelaihari . dalam 3 bulan terakhir ini dilakukan penanaman pohon sebanyak 300 (tiga ratus) lebih di area yang masih kosong (tanaman angsana, trembesi, mahoni, tanjung, mangga, pinang, sirsak, tabebuaya dan tanaman buah lainnya).

Sasaran strategis indikator kerja utama Bidang Tata Kota yaitu Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau dengan jumlah 32 Taman kawasan taman dan RTH, yaitu :

B. Ruang Terbuka Hijau Bridjen H. Hasan Basri

RTH. Bridjen H. Hasan Basri memiliki luas area 2.027 Ha ditanami beragam flora, sarana prasarana pendukung aktivitas seperti jogging track ,toilet, tempat sampah,tempat santai, pos jaga, mini soccer, skate board, lapangan basket, lapangan voli, area fitness outdoor, musholla dan beberapa titik tempat composting. Seperti halnya RTH. Kijang Mas Permai, RTH. Bridjen H. Hasan Basri dilakukan pemilahan sampah organik dan an-organik. untuk sampah organik seperti daun kering hasil sapuan petugas,akan di tempatkan ke dalam area bak bak composting yang tersebar di beberapa titik untuk di lakukan proses pengomposan. Sedang sampah an-organik, akan di kumpulkan dan diangkut ke TPA.



PASUKAN SIAP LAKSANAKAN DI BIDANG TATA KOTA

Dalam pengelolaannya di lapangan dibagi dalam **8 (delapan)** Tim yang di koordinir oleh **8 (delapan)** Koordinator yang terdiri dari :

Tim Penebangan: 5 petugas lapangan (3 PPPK dan 2 OUTSORSING)	Tim Angkutan: 6 petugas lapangan (4 PPPK, 2 OUTSORSING)	Tim Potong Rumput : 5 petugas lapangan (5 PPPK)
Tim Median Dan Pedestrian : 7 petugas lapangan (5 PPPK, 2 OUTSORSING)	Tim Taman 1 <i>(RTH. Hasan Basri,taman Kijang Kemana, RTPNol Kilometer,taman Depan Kantor,taman Depan BalaiRuang, Taman Dan Tugu Monumen Tala Membangun, Taman Depan Kantor DPRKPLH :</i> 13 petugas lapangan (6 PPPK, 7 OUTSORSING))	Tim Taman 2 : <i>(Rth. Kijang Mas Dan Pembibitan Tanaman)</i> 15 petugas lapangan (4 PPPK, 11 OUTSORSING)
Tim Taman 3 : <i>Taman Al. Mayor, Taman Klubgati Mabitin Dan Midan, Tugu, taman Depan Pasar, Baitan, taman Miralibin,taman Putang Sipi Dan Kijang Gunung Kantoran,taman Gedung Midan, Baitan)</i> 5 petugas lapangan (5 PPPK.)		Tim Lampu : 11 petugas lapangan (4 PPPK, 7 OUTSORSING)

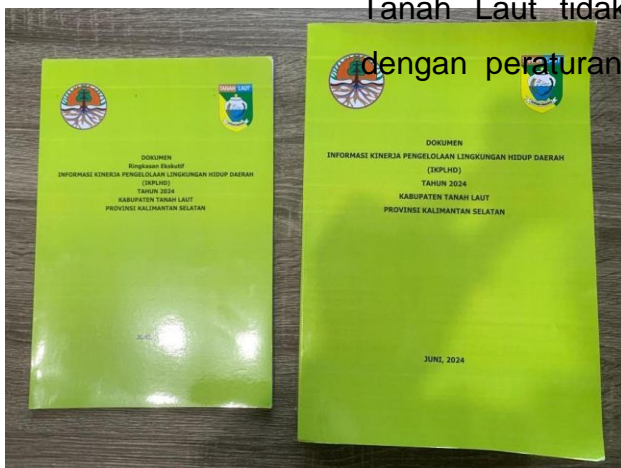


d. Peningkatan Pemanfaatan Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup

1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dasar dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya yang merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut maupun secara nasional. Hal ini karena Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini merupakan dokumen wajib dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di kabupaten/kota sehingga sangat di upayakan untuk dipenuhi. Analisa program atau kegiatan yang dapat mendukung dan mempertajam analisa Dokumen Kajian Lingkungan Hidup ini adalah adanya program dan kegiatan pada SKPD teknis sesuai dengan bidang masing-masing untuk pemenuhan data dari Dokumen Kajian Lingkungan Hidup. Kajian terbaru adalah mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Didalam dokumen tersebut mengacu kepada KLHK, bahwa dikabupaten tanah laut dapat membuat dokumen terkait perlindungan hingga pengelolaan ekosistem gambut. Namun, dari hasil kajian tersebut, pada Kabupaten Tanah Laut tidak menemukan kriteria tanah gambut sesuai

dengan peraturan yang



Jenis Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang utama :

- KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
- RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- Dokumen lingkungan terintegrasi dalam RTRW, RPJMD, dan kebijakan sectoral

Yang terbagi lagi menjadi Kondisi dan isu lingkungan, Analisis daya dukung & daya tampung, Risiko lingkungan & bencana, Alternatif perencanaan, Rekomendasi kebijakan Integrasi & tindak lanjut.

e. Peningkatan Sekolah Sadar Lingkungan Hidup

1. Pelaksanaan sosialisasi sekolah sadar lingkungan hidup

Pengertian Adiwiyata atau biasa disebut Green School adalah satu diantara berbagai program kementerian lingkungan hidup yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan akan kesadaran warga sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2025 yaitu tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah adiwiyata yaitu suatu program untuk dapat mewujudkan sekolah yang peduli serta berbudaya lingkungan. Dalam adiwiyata sendiri memiliki makna sebagai satu tempat yang baik dan ideal yang diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika. Hal ini menjadi dasar manusia untuk menuju terciptanya kesejahteraan hidup dalam menuju pada cita pembangunan berkelanjutan



Sosialisasi Bersama Guru di SMA 1 JORONG



Sosialisasi Bersama Guru&Murid di SDN 2 Bumi Jaya

2. Pembinaan sekolah peduli dan berbudidaya lingkungan hidup

Dalam upaya pembinaan sekolah peduli lingkungan dan demi memperoleh penghargaan adiwiyata DPRKPLH didukung oleh 2 SDM yang terdiri dari Kabid P2KLH, Kasi Peningkatan Kapasitas LH, 1 orang staf pelaksana (Pengelola Lingkungan) dan 1 orang PTT yang bertugas melaksanakan dan memandu kegiatan pembinaan sekolah peduli lingkungan yang ada di Kabupaten Tanah Laut.



3. Penyediaan sarana prasarana kebersihan di sekolah

Tentang Penyediaan sarana prasarana kebersihan di sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih terbilang minim dikarenakan anggaran yang terbatas serta bantuan atau koordinasi dengan dinas setempat kadang kurang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga dengan adanya Sosialisasi/Pembinaan Sekolah Peduli Lingkungan ini diharapkan bisa membantu Penyediaan sarana prasarana kebersihan di sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Laut, bisa berupa: Sapu Lidi/Lantai, Bak Sampah 3 Warna, Mesin Pemotong Rumput, Sabun Cuci Tangan, Bibit Tanaman, Motor 3 Roda, Dsb.



*Serah Terima Bak Sampah 3 Warna Untuk Sekolah
Adiwiyata*



Penanaman Bibit Pohon Bersama di Sekolah

f. Peningkatan Pengelolaan Sampah

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pengelola sampah
 - a) Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta Melakukan pemenuhan sarpras

kebersihan dengan indikator Jumlah SarPras kebersihan yang dipenuhi sesuai standar dengan target 9 Buah Pembelian Kontainer Penampung Sampah, 1 Set Belanja Timbangan TPST Kec. Kurau, 1 Unit Pembelian Alat Berat Excavator, 5 Unit Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 6, 14 Unit Pembelian Kendaraan Bermotor Roda 3, 2 Buah Pembelian Mesin Gibrak Pemilah Pembubur Sampah , Pembuatan TPS3R, Pembuatan Parkir Alat Berat dan Pembuatan Landasan Tempat Sampah di Karang Taruna dengan capaian kinerja 100% juga Melakukan pemeliharaan sarpras kebersihan dengan indikator Jumlah Sarpras yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan target 11 Unit Rehabilitasi TPS, 5 Unit Pemeliharaan Bak Sampah Kontainer, 1 Tahun Pemeliharaan Kolam Lindi , 1 Tahun Pemeliharaan TPA dan 1 Tahun Pemeliharaan Penerangan Lampu TPA dengan capaian kinerja 100%.

Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Sampah Di Kabupaten Tanah Laut

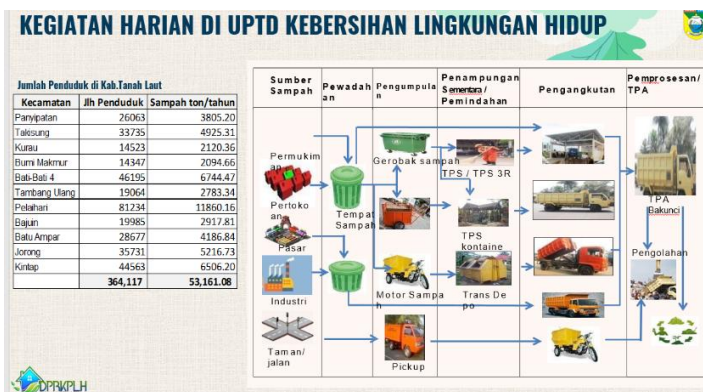
Sarana dan Prasarana	Sampai dgn th 2025
Truk Sampah	9
Truk Excavator	1
Truk Amrol	15
Loader	1
Dozer	1
Bak Kontainer	50
Truk Tinja	1
Tangki Air	1
Truk Dump Pick Up	1
Bak Sampah/TPS	35
TPA	1
Tosa Hercules	18
Traktor Mini	-
Tenaga Lapangan	131

No.	Target	Realisasi	Belum Terealisasi
1	1 unit TPST Kurau	-	1 unit
2	2 unit Halle Sampah	2 unit	-
3	12 unit Tambahan kontainer sampah untuk kecamatan	8 unit	4 unit untuk 4 Kecamatan

2. Pengangkutan sampah yang masuk ke TPA

Persentase sarana prasarana kebersihan sesuai standar dan Persentase SDM kebersihan lingkungan yang berkualitas dilaksanakan melalui Program Pengelolaan

Persampahan dengan kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota di dukung Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala UPT Kebersihan dalam melaksanakan perjanjian kinerja 2025 yang didukung oleh 194 orang SDM yaitu 13 orang PNS, 13 orang PPPK Penuh Waktu, 125 PPPK Paruh Waktu dan 43 orang Tenaga Outsourcing.



3. Peningkatan pengelolaan sampah TPS3R

Untuk mendukung terlaksananya Sasaran RPJMD Nomor 2 (Program Pengelolaan Persampahan) dengan indikator Kinerja Pelayanan Pengelolaan Limbah dan Sampah, dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah dan limbah rumah tangga dengan indikator Jumlah sampah dan limbah masyarakat yang dikelola dengan target 53,993.43 Ton terealisasi 21.986,02 Ton dengan capaian kinerja 40,72%, target pada kinerja ini tidak terealisasi

100% dikarenakan pengelolaan sampah hanya dilakukan di kabupaten kota, ibu kota kecamatan dan sekitarnya ;

- Kinerja Utama Melakukan pengolahan sampah di TPA dengan Jumlah sisa sampah masyarakat yang dikelola di TPA dengan target 15.300 Ton terealisasi 15.568,53 Ton Ton dengan capaian kinerja 101,76% ;
- Kinerja Utama Melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dengan indikator Jumlah sosialisasi kepada pelaku usaha pada 11 Kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100% ;
- Kinerja Utama Melaksanakan data pengolah sampah di masyarakat dengan indikator Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah target Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah terealisasi Jumlah data masyarakat yang melakukan pengolahan sampah pada 11 Kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100% ;
- Kinerja Utama Melakukan aksi kebersihan lingkungan kota dengan indikator Jumlah kawasan kota yang dibersihkan dengan target 11 kecamatan terealisasi 11 kecamatan dengan capaian kinerja 100% ;



Faktor Pendorong/Keberhasilan

- Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana: Fokus pada penyediaan SDM kebersihan lingkungan yang berkualitas serta pemenuhan sarana prasarana kebersihan yang sesuai standar merupakan indikator utama keberhasilan.
- Komitmen Pimpinan dan Manajemen: Adanya komitmen kuat dari pimpinan, termasuk evaluasi rutin terhadap capaian kinerja, supervisi, dan pemberian penghargaan/sanksi untuk mendorong tanggung jawab aparatur.

Faktor Penghambat/Kegagalan

- Rendahnya Kesadaran dan Budaya Buang Sampah Masyarakat: Masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan di lahan kosong atau pinggir jalan, meskipun telah dipasang tanda larangan. Perilaku membuang sampah sembarangan ini menyulitkan petugas karena lokasi pembuangan liar sering bermunculan kembali setelah dibersihkan.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kebersihan: Kurangnya jumlah armada pengangkut sampah (truk/kontainer) yang sesuai standar untuk menjangkau seluruh area, serta keterbatasan fasilitas daur ulang/pengelolaan sampah

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

- Peningkatan Sarana dan Prasarana: Menstandarisasi sarana prasarana kebersihan, termasuk optimalisasi armada pengangkutan sampah dan alat berat di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- Optimalisasi SDM: Peningkatan kualitas SDM kebersihan melalui pelatihan teknis, peningkatan disiplin, dan penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) yang memadai.
- Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle): Mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dengan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat hulu (TPS3R).

Dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan di dukung oleh Sumber daya manusia yang terdiri dari 245 ASN pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup serta di dukung oleh 3 Program dengan Pagu Rp. 5.799.603.489,68 dan terealisasi **Rp. 4.472.952.136,00** atau sebesar **77,12%** .

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	167.250.264,67	136.255.886,00
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.415.306.180,99	4.128.831.570,00
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	217.047.044,02	207.864.680,00
Jumlah		5.799.603.489,68	4.472.952.136,00

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	84,20%	1,009%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar **Rp. 985.000.000,00** dan anggaran belanja sebesar **Rp. 124.912.385.742,23** sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar minus Rp. **123.927.385.742,23**.

Realisasi APBD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2025 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar **Rp. 1.205.890.481,00**. dan belanja sebesar **Rp. 104.981.602.641,00** sehingga terjadi defisit anggaran sebesar **Rp. 103.775.712.160,00**.



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	985.000.000,00	1.205.890.481,00	122,43	856.079.200,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	985.000.000,00	1.205.890.481,00	122,43	856.079.200,00
4.1.02	Retribusi Daerah	985.000.000,00	1.205.890.481,00	122,43	856.079.200,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	350.000.000,00	428.328.480,00	122,38	141.262.200,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	350.000.000,00	428.328.480,00	122,38	141.262.200,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	635.000.000,00	777.562.001,00	122,45	714.817.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	714.817.000,00
4.1.02.02.19	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	535.000.000,00	541.448.000,00	101,21	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	100.000.000,00	236.114.001,00	236,11	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	985.000.000,00	1.205.890.481,00	122,43	856.079.200,00
	JUMLAH PENDAPATAN	985.000.000,00	1.205.890.481,00	122,43	856.079.200,00
5	BELANJA DAERAH	124.912.385.742,23	104.981.602.641,00	84,04	113.933.215.060,00
5.1	BELANJA OPERASI	50.089.766.301,15	42.210.813.678,00	84,27	48.984.155.391,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.123.688.103,00	8.343.060.043,00	75,00	8.102.300.787,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.167.104.269,00	4.437.761.790,00	71,96	4.200.766.845,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.440.451.044,00	2.962.539.547,00	86,11	2.790.519.738,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	431.565.968,00	316.691.248,00	73,38	288.764.398,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	171.110.000,00	135.670.000,00	79,29	160.540.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	222.560.000,00	122.175.000,00	54,90	110.070.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	141.705.000,00	101.424.579,00	71,57	84.635.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	285.469.080,00	198.225.610,00	69,44	175.183.980,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	462.509.349,00	336.942.509,00	72,85	338.230.906,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	748.942,00	45.478,00	6,07	43.162,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	431.523.580,00	239.432.923,00	55,49	229.773.780,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	41.195.841,00	6.153.718,00	14,94	5.751.457,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	47.490.458,00	18.461.178,00	38,87	17.254.424,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	490.775.007,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.956.583.834,00	3.905.298.253,00	78,79	3.866.533.942,00

5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.964.333.834,00	3.155.697.459,00	79,60	3.077.635.466,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	943.000.000,00	700.350.794,00	74,27	788.898.476,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	49.250.000,00	49.250.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	26.600.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.061.078.198,15	18.987.753.635,00	78,91	20.586.854.604,00
5.1.02.01	Belanja Barang	9.094.819.528,45	7.279.080.257,00	80,04	6.218.003.062,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.971.974.596,40	7.191.449.257,00	80,15	6.218.003.062,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.225.756,60	5.247.000,00	84,28	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	116.619.175,45	82.384.000,00	70,64	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.400.404.562,70	9.232.025.203,00	80,98	9.725.177.111,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.691.597.165,00	8.120.828.635,00	83,79	7.996.603.904,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	414.982.308,00	133.492.448,00	32,17	436.928.724,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.550.000,00	2.477.500,00	44,64	3.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	248.120.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	921.590.089,70	806.227.030,00	87,48	849.764.579,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	139.685.000,00	20.315.100,00	14,54	81.641.300,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	227.000.000,00	148.684.490,00	65,50	106.268.604,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.837.183.107,00	1.826.491.355,00	64,38	1.278.242.310,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.671.466.999,00	1.675.550.585,00	62,72	1.189.902.110,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	165.716.108,00	150.940.770,00	91,08	43.764.350,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	44.575.850,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	724.671.000,00	650.156.820,00	89,72	3.365.432.121,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	724.671.000,00	650.156.820,00	89,72	3.365.432.121,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.905.000.000,00	14.880.000.000,00	99,83	20.295.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	14.905.000.000,00	14.880.000.000,00	99,83	20.295.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	14.905.000.000,00	14.880.000.000,00	99,83	20.295.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	50.089.766.301,15	42.210.813.678,00	84,27	48.984.155.391,00
5.2	BELANJA MODAL	74.822.619.441,08	62.770.788.963,00	83,89	64.949.059.669,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.711.284.565,81	8.692.982.531,00	81,16	7.124.377.999,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.699.410.000,00	1.699.000.000,00	99,98	0,00

5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.699.410.000,00	1.699.000.000,00	99,98	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.964.206.818,56	4.371.490.414,00	73,30	2.674.181.500,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.374.796.818,56	3.835.990.410,00	71,37	2.553.354.500,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	589.410.000,00	535.500.004,00	90,85	120.827.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	214.250.181,00	189.866.667,00	88,62	44.475.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	44.475.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	214.250.181,00	189.866.667,00	88,62	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	177.600.000,00	160.284.000,00	90,25	31.250.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	177.600.000,00	160.284.000,00	90,25	31.250.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	326.110.792,80	287.556.450,00	88,18	328.865.999,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	201.322.150,80	185.996.450,00	92,39	119.375.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	124.788.642,00	101.560.000,00	81,39	209.490.999,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	136.774.638,45	127.494.000,00	93,21	37.495.500,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	81.353.676,00	73.194.000,00	89,97	7.840.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	9.660.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	11.020.962,45	9.900.000,00	89,83	19.995.500,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.049.965.427,00	1.721.043.000,00	83,95	3.449.239.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.049.965.427,00	1.721.043.000,00	83,95	1.482.903.500,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	5.684.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.960.652.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	120.227.248,00	114.248.000,00	95,03	389.120.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	108.683.248,00	103.848.000,00	95,55	288.600.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.544.000,00	10.400.000,00	90,09	100.520.500,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	169.750.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	169.750.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.739.460,00	22.000.000,00	96,75	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.739.460,00	22.000.000,00	96,75	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.151.004.831,38	4.564.682.367,00	34,71	6.729.782.859,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	13.151.004.831,38	4.564.682.367,00	34,71	6.729.782.859,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	13.151.004.831,38	4.564.682.367,00	34,71	6.729.782.859,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.938.130.043,89	49.492.589.065,00	97,16	51.068.848.811,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	39.460.140.645,10	38.261.898.976,00	96,96	40.878.774.945,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	39.460.140.645,10	38.261.898.976,00	96,96	40.878.774.945,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.926.913.039,00	10.701.565.089,00	97,94	9.097.683.686,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	9.097.683.686,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.926.913.039,00	10.701.565.089,00	97,94	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	551.076.359,79	529.125.000,00	96,02	992.892.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	551.076.359,79	529.125.000,00	96,02	992.892.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	99.498.180,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	99.498.180,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	22.200.000,00	20.535.000,00	92,50	14.800.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	22.200.000,00	20.535.000,00	92,50	14.800.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	22.200.000,00	20.535.000,00	92,50	14.800.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	74.822.619.441,08	62.770.788.963,00	83,89	64.949.059.669,00
	JUMLAH BELANJA	124.912.385.742,23	104.981.602.641,00	84,04	113.933.215.060,00
	SURPLUS/DEFISIT	(123.927.385.742,23)	(103.775.712.160,00)	83,74	(113.077.135.860,00)

TUJUAN I

Tabel 3.6

Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program					
					Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase		
						Rp	Rp	%		
1.	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	42	98,34	1	Program Pengembangan Perumahan	1.369.120.422,15	1.314.923.000,00	96.04%
		2	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman (Nilai)	54,21	51,32	2	Program Kawasan Permukiman	9.585.270.000,00	9.523.855.000,00	99.36%
						3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	4.977.480.000,00	4.936.090.000,00	99.17%

						4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	53.093.177.751,40	51.568.499.203,00	97.13%
	TOTAL							69.025.048.173,55	67.343.367.203,00	97,56%
2.	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)	503.416,22	Tidak dapat dilakukan perhitungan	1	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	167.250.264,67	136.255.886,00	77.65%
		2	Indeks Kualitas Air (Indeks)	71,27	74,02	2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.415.306.180,99	4.128.831.570,00	81.47%
		3	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	65,17	65,43	3		5.583.741.378,15	4.267.226.770	76,24%
		4	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	71,82	84,42	4	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	217.047.044,02	207.864.680,00	91%
	TOTAL							11.383.344.867,83	8.740.178.906,00	76,78%

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	= (4 / 3) * 10	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	700.000.000,00	856.079.200,00	122,30	545.935.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	700.000.000,00	856.079.200,00	122,30	545.935.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	100.000.000,00	141.262.200,00	141,26	0,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00	141.262.200,00	141,26	0,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	100.000.000,00	141.262.200,00	141,26	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	600.000.000,00	714.817.000,00	119,14	545.935.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000.000,00	714.817.000,00	119,14	545.935.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	100.000.000,00	191.481.000,00	191,48	19.100.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	500.000.000,00	523.336.000,00	104,67	526.835.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	700.000.000,00	856.079.200,00	122,30	545.935.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	700.000.000,00	856.079.200,00	122,30	545.935.000,00
5	BELANJA DAERAH	125.566.122.055,00	113.934.920.060,00	90,74	92.292.603.263,00
5.1	BELANJA OPERASI	54.321.618.307,00	48.985.460.391,00	90,18	37.312.753.325,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.398.012.992,00	8.104.005.787,00	86,23	7.171.899.551,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.001.200.612,00	4.202.471.845,00	84,03	3.695.652.518,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.227.066.544,00	2.790.519.738,00	86,47	2.486.262.041,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.079.066.544,00	2.681.597.338,00	87,09	2.477.362.541,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	148.000.000,00	108.922.400,00	73,60	8.899.500,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	346.905.969,00	288.764.398,00	83,24	259.573.984,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	321.285.969,00	281.075.758,00	87,48	259.573.984,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	25.620.000,00	7.688.640,00	30,01	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	171.110.000,00	162.060.000,00	94,71	166.110.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	171.110.000,00	162.060.000,00	94,71	166.110.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	130.600.000,00	110.070.000,00	84,28	88.590.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	109.000.000,00	100.350.000,00	92,06	88.590.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.600.000,00	9.720.000,00	45,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	110.715.000,00	84.820.000,00	76,61	83.439.850,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	99.695.000,00	81.860.000,00	82,11	82.885.000,00

5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11.020.000,00	2.960.000,00	26,86	554.850,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	217.689.080,00	175.183.980,00	80,47	175.690.920,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	205.289.080,00	169.824.900,00	82,72	175.473.660,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.400.000,00	5.359.080,00	43,22	217.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	405.709.348,00	338.230.906,00	83,37	201.039.979,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	399.509.348,00	338.230.906,00	84,66	201.039.979,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPP	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	168.662,00	43.162,00	25,59	39.847,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	118.662,00	41.099,00	34,64	39.679,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.000,00	2.063,00	4,13	168,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	330.015.501,00	229.773.780,00	69,63	214.591.078,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	312.407.422,00	220.913.402,00	70,71	213.933.866,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	17.608.079,00	8.860.378,00	50,32	657.212,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10.465.841,00	5.751.457,00	54,95	5.078.699,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.765.841,00	5.520.787,00	56,53	5.057.339,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	700.000,00	230.670,00	32,95	21.360,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	30.590.458,00	17.254.424,00	56,40	15.236.120,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	29.189.525,00	16.562.444,00	56,74	15.172.043,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.400.933,00	691.980,00	49,39	64.077,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Per	20.164.209,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Per	11.053.411,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Per	9.110.798,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.361.812.380,00	3.866.533.942,00	88,65	3.476.247.033,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ke	3.477.070.660,00	3.077.635.466,00	88,51	2.759.521.211,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ke	3.267.070.660,00	2.957.516.360,00	90,53	2.749.183.194,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Ke	210.000.000,00	120.119.106,00	57,20	10.338.017,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi K	884.741.720,00	788.898.476,00	89,17	716.725.822,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi K	865.241.720,00	788.898.476,00	91,18	716.725.822,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi K	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimba	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Re	26.600.000,00	26.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Re	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Re	22.800.000,00	22.800.000,00	100,00	0,00

5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemung	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemung	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemung	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.373.605.315,00	20.586.454.604,00	84,46	23.998.353.774,00
5.1.02.01	Belanja Barang	7.589.800.730,00	6.218.003.062,00	81,93	5.467.649.673,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	7.589.800.730,00	6.218.003.062,00	81,93	5.466.399.673,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruks	410.982.953,00	329.307.140,00	80,13	190.200.800,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	435.271.537,00	386.111.300,00	88,71	138.993.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.989.580.651,00	2.329.531.050,00	77,92	2.363.694.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.032.708.737,00	894.776.250,00	86,64	57.187.500,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakara	6.438.000,00	6.300.000,00	97,86	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	19.425.000,00	18.400.000,00	94,72	4.425.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	69.585.900,00	67.414.000,00	96,88	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Labora	85.064.850,00	80.210.000,00	94,29	106.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	144.431.985,00	115.990.000,00	80,31	104.344.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ala	271.183.121,00	214.627.488,00	79,14	369.478.358,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Ke	100.185.994,00	84.003.885,00	83,85	56.329.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ben	59.837.600,00	52.880.000,00	88,37	34.500.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bah	88.894.607,00	70.631.908,00	79,46	76.351.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Per	228.580.194,00	170.129.814,00	74,43	220.707.495,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ala	59.840.384,00	51.675.327,00	86,36	886.716.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Per	191.257.425,00	173.446.000,00	90,69	18.905.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Pe	8.205.120,00	7.392.000,00	90,09	0,00

5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Su	8.214.500,00	7.825.000,00	95,26	1.700.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Ala	48.376.126,00	40.742.000,00	84,22	289.585.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-P	50.337.586,00	44.441.400,00	88,29	18.284.420,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	374.460,00	372.500,00	99,48	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	242.700.000,00	184.350.000,00	75,96	156.300.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	920.019.600,00	774.489.000,00	84,18	261.946.800,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapa	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	6.300.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	89.250.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.619.800,00	22.452.000,00	91,19	15.200.000,00
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	9.612.600,00	8.310.000,00	86,45	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	39.072.000,00	37.195.000,00	95,20	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.959.203.697,00	9.725.177.111,00	88,74	15.807.473.123,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.840.484.749,00	7.996.603.904,00	90,45	15.133.063.632,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mo	62.900.000,00	18.300.000,00	29,09	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekre	24.003.000,00	23.153.000,00	96,46	128.500.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, M	132.000.000,00	102.000.000,00	77,27	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	349.600.000,00	312.207.000,00	89,30	300.026.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana da	1.143.628.800,00	991.596.000,00	86,71	810.750.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.280.000.000,00	4.920.000.000,00	93,18	2.491.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.105.534.242,00	1.051.500.000,00	95,11	417.600.000,00

5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.000.000,00	0,00	0,00	2.874.700.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	150.000.000,00	89.950.000,00	59,97	9.960.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.800.000,00	2.688.000,00	56,00	1.558.134,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	15.000.000,00	8.201.600,00	54,68	2.131.200,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	525.018.707,00	453.797.214,00	86,43	7.989.130.718,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangg	13.000.000,00	8.211.090,00	63,16	26.307.580,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	514.502.952,00	436.928.724,00	84,92	379.985.574,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non AS	460.320.000,00	403.780.824,00	87,72	353.696.214,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi N	24.081.312,00	14.732.400,00	61,18	11.721.771,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	30.101.640,00	18.415.500,00	61,18	14.567.589,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.996.000,00	3.600.000,00	90,09	4.096.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.996.000,00	3.600.000,00	90,09	4.096.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.995.000,00	2.250.000,00	45,05	2.519.200,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	2.519.200,00
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.995.000,00	2.250.000,00	45,05	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.000.000,00	248.120.000,00	82,71	199.109.025,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitekt	300.000.000,00	248.120.000,00	82,71	99.280.065,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsulta	0,00	0,00	0,00	99.828.960,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.038.999.996,00	849.764.579,00	81,79	17.881.992,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-	1.038.999.996,00	849.764.579,00	81,79	17.881.992,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability)	82.225.000,00	81.641.300,00	99,29	51.777.700,00

5.1.02.02.10.0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability)	82.225.000,00	81.641.300,00	99,29	51.777.700,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan	174.000.000,00	106.268.604,00	61,07	19.040.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	144.000.000,00	106.268.604,00	73,80	19.040.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.210.707.919,00	1.277.842.310,00	57,80	1.628.012.783,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.116.348.999,00	1.189.502.110,00	56,21	1.572.943.583,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Da	374.999.999,00	138.145.000,00	36,84	300.541.500,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-P	510.600,00	460.000,00	90,09	650.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	434.450.000,00	396.228.450,00	91,20	360.176.550,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	809.298.000,00	390.906.000,00	48,30	775.505.550,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	24.330.000,00	23.173.410,00	95,25	62.569.633,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	108.120.000,00	22.831.250,00	21,12	46.122.350,00
5.1.02.03.02.0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angk	200.000.000,00	131.668.000,00	65,83	0,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat U	0,00	0,00	0,00	3.725.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	11.100.000,00	7.220.000,00	65,05	1.953.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	2.400.000,00	1.820.000,00	75,83	5.100.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah	5.439.000,00	4.900.000,00	90,09	0,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat	84.360.000,00	13.800.000,00	16,36	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Un	22.291.400,00	19.300.000,00	86,58	10.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Ko	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	4.500.000,00

5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.708.920,00	43.764.350,00	91,73	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bang	47.708.920,00	43.764.350,00	91,73	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Iriga	46.650.000,00	44.575.850,00	95,55	55.069.200,00
5.1.02.03.04.0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jem	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	32.989.200,00
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Be	16.650.000,00	14.605.850,00	87,72	0,00
5.1.02.03.04.0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Penga	0,00	0,00	0,00	22.080.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.613.892.969,00	3.365.432.121,00	93,12	1.095.218.195,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.613.892.969,00	3.365.432.121,00	93,12	1.095.218.195,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.729.647.969,00	2.592.632.121,00	94,98	562.088.195,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	884.245.000,00	772.800.000,00	87,40	533.130.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.550.000.000,00	20.295.000.000,00	98,76	6.142.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.550.000.000,00	20.295.000.000,00	98,76	6.142.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanaka	20.550.000.000,00	20.295.000.000,00	98,76	6.142.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanaka	20.550.000.000,00	20.295.000.000,00	98,76	6.142.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	54.321.618.307,00	48.985.460.391,00	90,18	37.312.753.325,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.550.000.000,00	20.295.000.000,00	98,76	6.142.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanaka	20.550.000.000,00	20.295.000.000,00	98,76	6.142.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanaka	20.550.000.000,00	20.295.000.000,00	98,76	6.142.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	54.321.618.307,00	48.985.460.391,00	90,18	37.312.753.325,00
5.2	BELANJA MODAL	71.244.503.748,00	64.949.459.669,00	91,16	54.979.849.938,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.376.473.159,00	7.124.777.999,00	96,59	1.488.201.508,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00

5.2.02.01.03.0007	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.682.476.939,00	2.674.181.500,00	99,69	532.039.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.560.591.939,00	2.553.354.500,00	99,72	56.879.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpa	536.233.879,00	536.000.000,00	99,96	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda D	0,00	0,00	0,00	56.879.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Ti	47.503.560,00	40.500.000,00	85,26	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.976.854.500,00	1.976.854.500,00	100,00	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermo	121.885.000,00	120.827.000,00	99,13	475.160.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angku	121.885.000,00	120.827.000,00	99,13	11.160.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemot	0,00	0,00	0,00	464.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.167.718,00	44.475.000,00	88,65	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	50.167.718,00	44.475.000,00	88,65	0,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	50.167.718,00	44.475.000,00	88,65	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	35.300.000,00	31.250.000,00	88,53	16.000.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	35.300.000,00	31.250.000,00	88,53	16.000.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	33.300.000,00	29.250.000,00	87,84	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	382.722.055,00	328.865.999,00	85,93	579.460.030,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	131.327.627,00	119.375.000,00	90,90	303.242.030,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan K	21.050.445,00	20.575.000,00	97,74	21.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	110.277.182,00	98.800.000,00	89,59	282.242.030,00

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	251.394.428,00	209.490.999,00	83,33	276.218.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	195.939.641,00	162.394.999,00	82,88	175.448.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	3.354.938,00	3.000.000,00	89,42	18.960.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	36.184.724,00	31.466.000,00	86,96	27.050.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.662.625,00	1.480.000,00	89,02	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Ho	14.252.500,00	11.150.000,00	78,23	54.760.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pe	40.902.945,00	37.495.500,00	91,67	104.269.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	8.712.945,00	7.840.000,00	89,98	86.269.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8.712.945,00	7.840.000,00	89,98	29.600.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	56.669.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.990.000,00	9.660.000,00	96,70	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.990.000,00	9.660.000,00	96,70	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	22.200.000,00	19.995.500,00	90,07	18.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	22.200.000,00	19.995.500,00	90,07	18.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.605.816.685,00	3.449.239.500,00	95,66	14.630.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.552.231.215,00	1.482.903.500,00	95,53	14.630.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	1.310.917.215,00	1.254.438.000,00	95,69	13.550.000,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	241.314.000,00	228.465.500,00	94,68	0,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/	8.880.000,00	5.684.000,00	64,01	0,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	8.880.000,00	5.684.000,00	64,01	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan	2.044.705.470,00	1.960.652.000,00	95,89	0,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Uda	2.044.705.470,00	1.960.652.000,00	95,89	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	407.693.973,00	389.520.500,00	95,54	183.018.478,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	301.655.736,00	288.600.000,00	95,67	144.500.000,00

5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	301.655.736,00	288.600.000,00	95,67	144.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	106.038.237,00	100.920.500,00	95,17	38.518.478,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	100.488.237,00	95.370.500,00	94,91	38.518.478,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	171.392.844,00	169.750.000,00	99,04	57.365.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	171.392.844,00	169.750.000,00	99,04	43.365.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	171.392.844,00	169.750.000,00	99,04	43.365.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.315.863.635,00	6.478.984.109,00	88,56	1.136.305.543,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.315.863.635,00	6.478.984.109,00	88,56	1.136.305.543,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerj	7.315.863.635,00	6.478.984.109,00	88,56	1.136.305.543,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	729.863.635,00	688.553.067,00	94,34	649.842.376,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	23.726.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olah	100.000.000,00	98.784.727,00	98,78	0,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.686.000.000,00	2.996.646.315,00	81,30	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.800.000.000,00	2.695.000.000,00	96,25	462.737.167,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.521.641.954,00	51.319.647.561,00	90,80	52.231.314.392,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45.274.006.154,00	41.232.944.595,00	91,07	44.393.174.844,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	45.274.006.154,00	41.232.944.595,00	91,07	44.393.174.844,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	45.274.006.154,00	41.232.944.595,00	91,07	44.393.174.844,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	10.037.635.800,00	8.994.312.786,00	89,61	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pa	10.037.635.800,00	8.994.312.786,00	89,61	0,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengama	10.037.635.800,00	8.994.312.786,00	89,61	0,00

5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.110.000.000,00	992.892.000,00	89,45	0,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	1.110.000.000,00	992.892.000,00	89,45	0,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	1.110.000.000,00	992.892.000,00	89,45	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	100.000.000,00	99.498.180,00	99,50	7.838.139.548,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	100.000.000,00	99.498.180,00	99,50	7.838.139.548,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	7.838.139.548,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	99.498.180,00	99,50	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.875.000,00	11.250.000,00	81,08	124.028.495,00
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	13.875.000,00	11.250.000,00	81,08	5.455.000,00
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	13.875.000,00	11.250.000,00	81,08	5.455.000,00
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	13.875.000,00	11.250.000,00	81,08	5.455.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	118.573.495,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	118.573.495,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	19.390.000,00
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00	99.183.495,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.650.000,00	14.800.000,00	88,89	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya- Aset Tidak Berwuj	16.650.000,00	14.800.000,00	88,89	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	16.650.000,00	14.800.000,00	88,89	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	16.650.000,00	14.800.000,00	88,89	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	71.244.503.748,00	64.949.459.669,00	91,16	54.979.849.938,00
	JUMLAH BELANJA	125.566.122.055,00	113.934.920.060,00	90,74	92.292.603.263,00
	SURPLUS/DEFISIT	(124.866.122.055,00)	(113.078.840.860,00)	90,56	(91.746.668.263,00)

*Sumber : LRA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Tanah Laut*

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **5 Sasaran 6 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah **109,06%** dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi**.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Peningkatan Kualitas Permukiman & Rumah: Melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penanganan kawasan kumuh melalui pendekatan tematik serta pemanfaatan data yang akurat.
- Penguatan Pelayanan dan Inovasi: Menerapkan inovasi konstruksi dan menyederhanakan layanan pertanahan serta administrasi perumahan.
- Optimalisasi Pengelolaan Lingkungan: Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan prasarana lingkungan untuk menciptakan permukiman yang sehat.
- Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga lokal dalam pengelolaan lingkungan serta sosial ekonomi, guna menjamin keberlanjutan program.
- Peningkatan Kapasitas Birokrasi: Memperkuat koordinasi antar instansi (kabupaten/kota/provinsi), memperbaiki penempatan pegawai sesuai

kompetensi teknis, serta meningkatkan akuntabilitas laporan kinerja (Renstra/LAKIP).

- Implementasi SPM: Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang perumahan dan kawasan permukiman
-

Pelaihari, 19 Februari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kab. Tanah Laut



GUSTI DWI ERLANDI KASUMA, ST.M.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790709 200701 1 022

LAMPIRAN

**DAFTAR CAPAIAN KINERJA SELURUH PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
Kepala Dinas					
1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	54,21	51.32	223,71%
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	42	98.42	220%
2	Meningkatnya kualitas air udara dan lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	503.416,22 TON CO2 EQ	Tidak dapat dilakukan perhitungan	Tidak dapat dilakukan perhitungan
		Indeks Kualitas Air	71,27 Indeks	74.02	103.80%
		Indeks Kualitas Udara	71,82 Indeks	84.42	117.50%
		Indeks Kualitas Lahan	65.17	65.43	100.30%
Sekretaris					
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	100%	78.85	98.56%
4	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
6	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renja Murni, dan Renja Perubahan)	Jumlah dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renja Murni, dan Renja Perubahan)	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
7	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah dokumen (LPPD, LKPJ, LAKIP)	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Merencanakan dan Mengadakan	Prasarana Perkantoran Yang Dipelihara	18 Jenis	18 Jenis	100%

8	(Pemenuhan/Pembelian) Serta Melakukan Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Serta Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran, Kepegawaian Yang Dilaksanakan	2200 Surat	2200 Surat	100%
9	Menyusun Data Kepegawaian, Evaluasi serta Administrasi Kepegawaian (Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pembuatan DUK, Pembuatan Karis / Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran, Kepegawaian Yang Dilaksanakan	57 Orang Pegawai	57 Orang Pegawai	100%
10	Merencanakan dan Mengadakan Penyebarluasan Informasi Pembangun Daerah	Jumlah Pelaksanaan Penyebarluasan Informasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
11	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya Dilayani Secara Tertib	57 ASN	57 ASN	100%
			218 NON ASN	218 NON ASN	100%
12	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah Aset yang Tercatat	4868 Aset yang Tercatat	4868 Aset yang Tercatat	100%
Perencanaan					
13	Menyusun Dokumen Perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	Jumlah Dokumen (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
14	Menyusun Laporan Kinerja SKPD (LPPD, LKPI, LAKIP)	Jumlah Dokumen LPPD, LKPI, LAKIP	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Umum dan Kepegawaian					
15	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	18 Jenis	18 Jenis	100%
		Jumlah dokumen administrasi pelayanan surat menyurat/kearsipan	1957 Surat	1957 Surat	100%
16	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan Gaji berkala, Kenaikan Pangkat Perubahan DUK Pembuatan)	Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian yang dilaksanakan	66 ASN	66 ASN	100%
17	Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	Jumlah pelaksana penyebarluaskan informasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

18	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	50 PNS	50 PNS	100%
			16 PPPK	16 PPPK	100%
			180 NON ASN	180 NON ASN	100%
19	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah Aset yang tercatat	6602 Aset Tercatat	6602 Aset Tercatat	100%
Keuangan					
20	Merencanakan, menyusun dan membayar Gaji dan TPP PNS dan PPPK	Jumlah Pembayaran Gaji dan TPP yang dibayar	12 Bulan	12 Bulan	100%
21	Menyusun Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	19 Laporan	19 Laporan	100%
Kabid Tata Lingkungan					
22	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	100%	2 Dokumen	100%
		Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang taat aturan	100%	100% taat	100%
		Persentase Nilai Baku Mutu Lingkungan Hidup yang terpenuhi	100%	100%	100%
Kabid Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup					
23	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase capaian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%
24	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%
25	Meningkatnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase capaian pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	3 kegiatan	100%
Kabid Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup					
26	Meningkatnya pengelolaan pengaduan di bidang lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100%	10 Pengaduan	100%

27	Meningkatnya pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi dan Peraturan Perundang Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	100 Badan Usaha	100%
28	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan Lingkungan	Persentase sampah terkurangi di masyarakat (Reduksi sampah 5.000 kg)	100%	100%	100%
29	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) 2 Sekolah	100%	100%	100%
30	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	Jumlah bank sampah yang terbina (5 Bank Sampah)	100%	100%	100%
Kabid Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman					
31	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase luasan permukiman yang layak	54.38%	54.38%	100%
32	Meningkatnya Kepemilikan PSU pada Permukiman	Persentase Permukiman yang memiliki PSU Sesuai Standar	1.66%	1.66%	100%
33	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	24.95%	24.95%	100%
34	Menurunnya kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	11.11%	11.11%	100%
Kabid Tata Kota					
35	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota/kawasan perkotaan (RTH)	100%	100%	100%
Kepala UPT Kebersihan					
36	Melakukan Pengolahan Sampah dan Limbah Rumah Tangga	Jumlah Sampah dan limbah Masyarakat yang Dikelola	50,840 Ton	50,840 Ton	100%
37	Melakukan Pengolahan Sampah di TPA	Jumlah Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha	15,300 Ton	15,300 Ton	100%
38	Melakukan Sosialisasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik	Jumlah Sosialisasi Kepada Pelaku Usaha	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%

39	Melaksanakan Data Pengolahan Sampah di Masyarakat	Jumlah Data Masyarakat yang Melakukan Pengolahan Sampah	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
40	Melakukan Aksi Kebersihan Lingkungan Kota	Jumlah Kawasan Kota yang Dibersihkan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100%
41	Melakukan Pemenuhan Sarpras Kebersihan	Jumlah Sarpras Kebersihan yang Dipenuhi Sesuai Standar	100%	100%	100%
42	Melakukan Pemeliharaan Sarpras Kebersihan	Jumlah Sarpras yang Dipelihara dan Dimanfaatkan	100%	100%	100%
Kepala UPT Laboratorium Lingkungan					
43	Menyediakan parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	Jumlah parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	36 Parameter	38 Parameter	100%
44	Melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan sesuai standar	Jumlah pengujian laboratorium sesuai standar	250 LHU	337 LHU	100%
45	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab	Nilai retribusi jasa uji Lab	Rp. 535.000.000	Rp. 540.508.000	100%



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

JL. A. Syukri Komp. Perum. Gagas Pelaihari 70814 Telp (0512) 21552
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. RAHMAT TRIANTO

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

H. RAHMAT TRIANTO

GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, S.T., M.T.
NIP. 19790709 200701 1 0

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	54,21 Nilai
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	42 Persentase
		-	-
2	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	503,42 TON CO2 EQ
		Indeks Kualitas Air	71,27 Indeks
		Indeks Kualitas Udara	71,82 Indeks
		Indeks Kualitas Lahan	65,17 Indeks

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.369.120.422
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	9.585.270.000
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.977.480.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	300.000.000
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	217.047.044
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	167.250.265
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	56.222.571
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	76.572.276
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	156.696.586

12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.345.827.586

TANAH LAUT, 2 SEPTEMBER 2025

Bupati TANAH LAUT

Kepala Dinas



H. RAHMAT TRIANTO



GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, S.T., M.T.
NIP 19790709 200701 1 0



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl.A.Syukri Komplek Gagas Permai Telp.(0512) 21552 Fax.(0512) 21552
P E L A I H A R I

Kode Pos 70814

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ADI RAHMANI

Jabatan : Plt.Sekretaris

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST.M.T

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Plt.SEKRETARIS,

H. ADI RAHMANI

NIP.19720621 199603 1 003

KEPALA DINAS PERKIM DAN LH
KABUPATEN TANAH LAUT,

GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST.M.T
NIP. 19790709 200701 1 022

SIGN I

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**SKPD
TAHUN ANGGARAN**

**: DINAS PERKIM DAN LH KAB.TANAH LAUT
: 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKPD	Nilai SAKIP SKPD	100%
2.	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100%
3	Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	Rp 4,00
1	Merencanakan, menyusun dan membayar gaji dan TPP PNS dan PPPK	Jumlah Pembayaran Gaji dan TPP yang dibayar	12 bulan
2	Menyusun laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	19 Laporan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 11.123.688.103,00
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 5.999.560,00
			Rp 11.129.687.663,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	Rp 4,00
1	Menyusun dokumen perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	Jumlah Dokumen perencanaan (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	6 Dokumen
2	Menyusun laporan kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3 Dokumen

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota -Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9.999.403,17
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.999.753,60
			Rp 16.999.156,77

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	Rp 4,00
1.	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan Prasarana perkantoran yang dipelihara Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	18 Jenis 2200 Surat
2.	Menyusun data kepegawaian , evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Jumlah dokumen administrasi perkantoran,kepegawaian yang dilaksanakan	57 Orang Pegawai
3.	Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	Jumlah pelaksanaan penyebarluasan informasi	2 Kegiatan
4.	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	57 ASN 218 Non ASN
5.	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah aset yang tercatat	4.868 Aset yang tercatat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 347.591.723,50
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 19.941.538,41
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.999.901,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 327.590.000,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 19.987.786,61
		Penyediaan Bahan/Material	Rp 15.984.512,50
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Rp 1.530.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 56.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 9.138.102,75	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Pengadaan Mebel	Rp 24.414.950,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.020.962,45	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 330.130.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 7.706.279.896,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 370.000.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Rp 10.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp 38.487.900,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 20.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.716.108,00	
		Rp 9.338.813.381,22	
JUMLAH KESELURUHAN ANGGARAN			Rp 20.485.500.200,99

Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,


Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST.M.T
NIP. 19790709 200701 1 022

Pelalhari, 2 September 2025
Plt.Sekretaris,


H. ADI RAHMANI
NIP. 19720621 199603 1 003

SIGN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. . A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp(0512)21552-Fax
21552 Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RACHMADANI, A.MD

Jabatan : Plt. Kasubbag Perencanaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : H. ADI RAHMANI

Jabatan : Plt.Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

H. ADI RAHMANI
NIP.19720621 199603 1 003

PIHAK PERTAMA

RACHMADANI, A.MD.
NIP. 19830617 200101 1 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyusun Dokumen Perencanaan SKPD (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	Jumlah Dokumen (RKA, RKAP, DPA, DPAP, RENJA MURNI DAN RENJA PERUBAHAN)	6 Dokumen
2	Menyusun Laporan Kinerja SKPD (LPPD, LKPJ, LAKIP)	Jumlah Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP	3 Dokumen

NO	Program/Kegiatan	SUB KEGIATAN	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH -PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.999.753,60
		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	9.999.403,17
			Rp16.999.156,77


TANAH LAUT, 2 September 2025

Plt. Sekretaris



H. ADI RAHMANI
NIP.19720621 199603 1 003

Plt. Kasubbag Perencanaan



RACHMADANI, A.MD.
NIP. 19830617 200101 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. . A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp(0512)21552-Fax
21552 Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RACHMADANI, A.MD
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : H. ADI RAHMANI
Jabatan : Plt.Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

H. ADI RAHMANI, SP
NIP.19720621 199603 1 003

PIHAK PERTAMA

RACHMADANI, A.Md.
NIP. 19830617 200101 1 012

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Merencanakan dan mengadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara	18 Jenis
		Jumlah dokumen administrasi pelayanan surat menyurat/Kearsipan	1957 Surat
2	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan	Jumlah dokumen administrasi perkantoran, kepegawaian yang dilaksanakan	66 ASN
3	Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah pelaksana penyebarluaskan informasi	2 Kegiatan
4	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib	50 PNS
			16 PPPK
			180 NON ASN
5	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Jumlah aset yang tercatat	6602 Aset Tercatat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 347.591.723.500
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 19.941.538.410
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 24.999.901.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 327.590.000.000
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 19.987.786.610
		Penyediaan Bahan/Material	Rp 15.984.512.500
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 1.530.000.000
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN -Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 56.000.000.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 9.138.102.750
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp 24.414.950.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 11.020.962.450
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 330.130.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 7.706.279.896.000
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 370.000.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 38.487.900.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 20.000.000.000
		Pemeliharaan Mebel	Rp 10.000.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 5.716.108.000
JUMLAH KESELURUHAN ANGGARAN			Rp 9.338.813.381.220

PIHAK KEDUA



H. AJI RAHMANI, SP
NIP.197206211996031003

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK PERTAMA



RACHMADANI, A.Mi
NIP. 198306172001011012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. . A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp(0512)21552-Fax
21552 Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AIDA YATI OLFAH

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : H. ADI RAHMANI

Jabatan : Plt.Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TANAH LAUT, 2 September 2025

PIHAK KEDUA

H. ADI RAHMANI, SP
NIP.19720621 199603 1 003

PIHAK PERTAMA

AIDA YATI OLFAH
NIP 19680620 198803 2 00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan A.Syukri Komplek Gagas Permai Telp.(0512) 21552 Fax.(0512) 21552
PELAHARI

Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KELIK SUSILAWATI H, SP
Jabatan : Kasubbag Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST, MT
Jabatan : Sekretaris Dinas Dinas Perkim dan LH Kab.Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Plt. Sekretaris Dinas Perkim dan
LH Kab.Tanah Laut,

H. Adi Rahmani, SP
NIP. 197206211996031003

Kasubbag Keuangan,

Kelik Susilawati H, SP
NIP. 198009292006042032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : DINAS PERKIM DAN LH KAB. TANAH LAUT
 TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Merencanakan, menyusun dan membayar Gaji dan TPP PNS dan PPPK	Jumlah Pembayaran Gaji dan TPP yang dibayar	12 bulan
2	Menyusun Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan keuangan yang disusun	19 Laporan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 10.203.112.014 Rp 5.999.560
			Rp 10.209.111.574

Pelaihari, 02 September 2025

Plt. Sekretaris Dinas Perkim & LH
Kabupaten Tanah Laut,



H. ADI RAHMANI, SP
NIP. 197206211996031003

Kasubbag Keuangan,



KELIK SUSILAWATI H, SP
NIP. 198009292006042032



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT**

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SENIATI
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : KELIK SUSILAWATI H, S.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kepala Sub Bagian Keuangan

KELIK SUSILAWATI H, S.P
NIP. 19800929 200604 2 032

Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian
Keuangan,

SENIATI
NIP. 19760325 200901 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Uraian Tugas	Jabatan	Indikator	Satuan
1	Menyusun dan mengelola dokumen administrasi perkantoran	PENGELOLA KEUANGAN	Memilah Kwitansi yg sudah di Realisas Bendahara (12 Dokumen). 2. Menerima dan Mencatat spj yg Mau di Bayarkan (12 Dokumen). 3. Memberi Lembar Pada SPJ yang Hendak di Realisasikan (20 Dokumen).	44 Dokumen
2	Melakukan Verifikasi Dokumen dan Laporan Keuangan Untuk Memastikan Kebenara,Keakuratan dan Kelengkapan Dokumen	PENGELOLA KEUANGAN	1. Mem Verifikasi Belanja Modal (15 Dokumen). 2. Mem Verifikasi Belanja Pegawai (20 Dokumen). 3. Mem Verifikasi Barang dan Jasa (15 Dokumen).	50 Dokumen
3	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	PENGELOLA KEUANGAN	Menghadiri Sosialisasi,Rapat dan Kegiatan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Keuangan (12 Kali).	12 Kali

Kasubbag Keuangan

Kelik Susilawati H, SP
NIP. 19800929 200604 2 032

Pelaihari, 2 September 2025

Pengadministrasi Perkantoran

Senlati
NIP. 19760325 200901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ROOSEHAN ERFAN SOFYAN
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian Keuangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : KELIK SUSILAWATI H, S.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Sub Bagian Keuangan

KELIK SUSILAWATI H, S.P
NIP. 19800929 200604 2 032

Pengadministrasi Perkantoran Sub Bagian
Keuangan,

H. ROOSEHAN ERFAN SOFYAN
NIP. 19731203 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Uraian Tugas	Indikator	Satuan
1	Menyusun dan mengelola dokumen administrasi perkantoran	1. Membuat dan Mengarsipkan dokumen Gaji dan TPP ASN dan PPPK (12 Dokumen). 2. Membuat dan Mengarsipkan dokumen Payroll Gaji dan TPP ASN dan PPPK (12 Dokumen). 3. Membuat dan Mengarsipkan dokumen Billing Pajak Gaji ASN dan PPPK (24 Dokumen).	48 Dokumen
2	Melakukan input data dan pengarsipan digital	1. Penginputan Data Payroll di Sistem Payrol Bank Kalsel (12 Dokumen). 2. Penginputan Data Gaji dan TPP di Sistem Web (12 Dokumen). 3. Penginputan Billing Pajak Gaji ASN dan PPPK di Sistem MPN (12 Dokumen).	36 Dokumen
3	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	Mempelajari cara Penginputan Data Belanja Di Sosialita dan Pajak Di Sistem Coretax (12 Kali).	12 Kali

Kasubbag Keuangan

Kelik Susilawati H, SP
NIP. 19800929 200604 2 032

Pelatihari, 02 September 2025

Pengadministrasi Perkantoran

H. Roosehan Erfan Sofyan
NIP. 19731203 199803 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan A.Syukri Komplek Gagas Permai Telp.(0512) 21552 Fax.(0512) 21552
PELAIHARI

Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Setyawan, ST
Jabatan : Kabid Perumahan Rakyat, & Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

**Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,**


Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST, MT
NIP. 19790709 200701 1 022

**Kabid. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman,**



Arif Setyawan, ST
NIP. 19801009 200501 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD
TAHUN ANGGARAN

: DINAS PERKIM DAN LH KAB.TANAH LAUT
: 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase luasan permukiman yang layak	54,38%
	Meningkatnya Kepemilikan PSU pada Permukiman	Persentase Permukiman yang memiliki PSU Sesuai Standar	1,66%
	Meningkatnya rumah layak huni	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	24,95 %
	Menurunnya kawasan kumuh	Persentase luasan kawasan kumuh	11,11%

PROGRAM DAN KEGIATAN


NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>- Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Rp 58.230.422,15
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota <i>- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</i> <i>- Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana</i>	Rp 473.720.000,00 Rp 827.200.000,00
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan <i>- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik</i>	Rp 9.970.000,00
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		<i>- Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP</i>	Rp 35.000.000,00

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 9.530.270.000,00
		- Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 20.000.000,00
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp 4.977.480.000,00
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp 299.999.999,70
		- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp 52.793.177.751,70
			Rp 69.025.048.173,55

Kepala Dinas Perkim dan LH
Kabupaten Tanah Laut,

Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST, MT
NIP. 19790709.200701 1 022

Pelaihari, 2 September 2025
Kabid Perumahan Rakyat &
Kawasan Permukiman


Arif Setyawan, ST
NIP. 19801009 200501 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kota
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Tata Kota,


GUSTI DWI ERZADI KASUMA, ST, MT
NIP. 19790709 200701 1 022


ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas wilayah kota/kawasan perkotaan (RTH)	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota -Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 4.839.273.673,94
			Rp. 4.839.273.673,94

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Dinas,

Kepala Bidang Tata Kota,


GUSTI DWI ERZADI KASUMA, ST, MT
NIP. 19790709 200701 1 002


ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAHYUDIN
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kota
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Bidang Tata Kota

Operator Layanan Operasional,

ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

MAHYUDIN
NIP. 19780721 200801 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Petkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Uraian Tugas	Indikator	Satuan
1	Melakukan pemangkasan pohon dalam kota Pelaihari	Jumlah pemangkasan pohon dalam kota Pelaihari	132 Kegiatan
2	Menyiapkan peralatan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan	Jumlah peralatan yang disiapkan	132 Kegiatan
3	Menyimpan dan merawat peralatan yang digunakan agar tidak cepat rusak	Jumlah peralatan yang terpelihara	132 Kegiatan
4	Membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas	Jumlah laporan pelaksanaan tugas	44 Laporan

Pelaihari, September 2025

Kepala Bidang Tata Kota

ALAM MANI MANI AISYAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

Operator Layanan Operasional

MAHYUDIN
NIP. 19780721 200801 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAMSIAR RAHMAN
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kota
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Tata Kota

ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

Pelaihari, 02 September 2025

Operator Layanan Operasional,

SAMSIAR RAHMAN
NIP. 197710062008011016



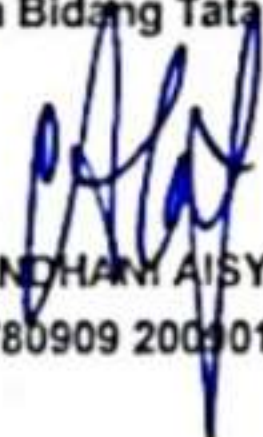
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT


No.	Uraian Tugas	Indikator	Satuan
1	Melaksanakan instruksi / tugas yang diberikan oleh atasan langsung	Jumlah instruksi atasan yang dilaksanakan	200 Kegiatan
2	Melaporkan hasil pekerjaan secara lisan atau tertulis kepada koordinator taman bagaimana kondisi lapangan	jumlah laporan yang dibuat	200 Laporan
3	Melakukan tugas sebagai koordinator taman	Jumlah taman yang terkoordinir	200 Kegiatan
4	Menindaklanjuti arahan perintah dari atasan langsung terhadap pertamanan.	Jumlah kegiatan tindak lanjut arahan atasan yang terlaksana	100 Kegiatan
5	Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis	Jumlah kegiatan pelayanan teknis	500 Kegiatan

Kepala Bidang Tata Kota


ALAM MANDYANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200301 2 001

Pelihar, September 2025

Operator Layanan Operasional


Samsjar Rahman
NIP. 19771006 200801 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZAIN
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kota
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Bidang Tata Kota

ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200001 2 001

Operator Layanan Operasional,

ZAIN
NIP. 19750603 200701 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT


No.	Uraian Tugas	Indikator	Satuan
1	Melaksanakan tugas sebagai koordinator taman	Jumlah taman yang terkoordinir	125 Kegiatan
2	Melakukan monitoring observasi dan kajian teknis kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan	40 Kegiatan
3	Memberikan informasi hasil pekerjaan lapangan kepada atasan langsung	Jumlah informasi hasil pengawasan taman yang terkoordinir	40 Kegiatan
4	Menindaklanjuti arahan perintah dari atasan langsung terhadap pertamanan	Jumlah kegiatan tindak lanjut arahan atasan yang terlaksana	40 Kegiatan
5	Melaksanakan instruksi tugas yang diberikan oleh atasan langsung	Jumlah kegiatan yang dilakukan sesuai instruksi atasan	40 Kegiatan

Kepala Bidang Tata Kota


ALAM MANTIHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

Pelaihari, September 2025

Operator Layanan Operasional


Zain
NIP. 19750603 200701 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JULIE NORMALIA, ST
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kota
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Bidang Tata Kota

Penelaah Teknis Kebijakan,

ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

JULIE NORMALIA, ST
NIP. 19830707 201502 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

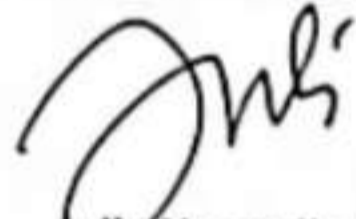
No.	Uraian Tugas	Indikator	Satuan
1	berkoordinasi dengan unit kerja terkait	Jumlah dokumen bahan data Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana yang diterima dan diperiksa	5 Laporan
2	mendukung pelaksanaan rapat/koordinasi teknis	Jumlah dokumen hasil pengklasifikasian bahan dan data Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	5 Laporan
3	melakukan pengarsipan bahan teknis	Jumlah dokumen hasil kajian karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	5 Dokumen
4	menghimpun data dan informasi	Jumlah dokumen konsep penyusunan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	5 Data
5	mengolah dan menganalisis data awal	Jumlah kegiatan diskusi konsep penyusunan Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana dengan pejabat yang berwenang	5 Dokumen
6	melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	Jumlah dokumen Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana hasil perbaikan dari diskusi	20 Laporan

Kepala Bidang Tata Kota


ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

Pelalhari, September 2025

Penelaah Teknis Kebijakan


Julje Normalia, ST
NIP. 19830707 201502 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDURRAHMAN
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kota
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Bidang Tata Kota

Operator Layanan Operasional,

ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19719780909 200901 2 001

ABDURRAHMAN
NIP. 197605072007011014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Uraian Tugas	Indikator	Satuan
1	Melaksanakan tugas sebagai koordinator taman	Jumlah taman yang terkoordinir	125 Kegiatan
2	Melakukan monitoring, observasi dan kajian teknis kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan	35 Kegiatan
3	Memberikan informasi hasil pekerjaan lapangan kepada atasan langsung	Jumlah informasi hasil pengawasan taman yang terkoordinir	35 Kegiatan
4	Menindaklanjuti arahan perintah dari atasan langsung terhadap pertamanan	Jumlah kegiatan tindak lanjut arahan atasan yang terlaksana	35 Kegiatan
5	Melaksanakan intruksi/tugas yang diberikan oleh atasan langsung	Jumlah kegiatan yang dilakukan sesuai instruksi atasan	35 Kegiatan

Pelalhari, Januari 2024

Kepala Bidang Tata Kota

ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

Operator Layanan Operasional

Abdurrahman
NIP. 19760507 200701 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAMBANG ARIYANTO
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kota
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Bidang Tata Kota

Operator Layanan Operasional,

ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

BAMBANG ARIYANTO
NIP. 197907152007011008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Uraian Tugas	Indikator	Satuan
1	Melaksanakan tugas sebagai koordinator taman	Jumlah taman yang terkoordinir	624 Kegiatan
2	Melakukan monitoring, observasi dan kajian teknis kegiatan sesuai dengan kondisi lapangan	Jumlah kegiatan pengawasan yang dilakukan	51 Kegiatan
3	Memberikan informasi hasil pekerjaan lapangan kepada atasan langsung	Jumlah informasi hasil pengawasan taman yang terkoordinir	51 Kegiatan
4	Menindaklanjuti arahan perintah dari atasan langsung terhadap pertamanan	Jumlah kegiatan tindak lanjut arahan atasan yang terlaksana	51 Kegiatan
5	Melaksanakan intruksi/tugas yang diberikan oleh atasan langsung	Jumlah kegiatan yang dilakukan sesuai instruksi atasan	36 Kegiatan

Pelaihari, September 2025

Kepala Bidang Tata Kota

ALAM MANDHANI ALSYIAH, ST
NIP. 19780909 200301 2 001

Operator Layanan Operasional

Bambang Ariyanto
NIP. 19790715 200701 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL BASIT
Jabatan : Operator Layanan Operasional
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kota
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Bidang Tata Kota

Operator Layanan Operasional,

ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

ABDUL BASIT
NIP. 19831030 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP


Jl. A. Syukri (Gagas Permai) Komplek Perkantoran, kode pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT


No.	Uraian Tugas	Indikator	Satuan
1	Melaksanakan Tugas Lain Yang Diinstruksikan Atasan	Jumlah dokumen bahan taman yang dikumpulkan	400 Kegiatan
2	Melaporkan Kegiatan Lapangan Kecamatan Maupun Kota ke Atasan	Jumlah dokumen materi bahan taman	400 Kegiatan
3	Membuat Laporan Mingguan	Jumlah pelayanan kepada taman	48 Laporan
4	Melakukan Koordinasi ke Kecamatan	Jumlah laporan evaluasi hasil kerja	100 Kegiatan
5	Melakukan Tugas Lain Sesuai Fungsi dan Jabatan	Jumlah laporan pelaksanaan tugas	400 Kegiatan

Pelaihari, September 2025

Kepala Bidang Tata Kota


ALAM MANDHANI AISYIAH, ST
NIP. 19780909 200901 2 001

Operator Layanan Operasional


ABDUL BASIT
NIP. 19831030 200901 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan A.Syukri Komplek Gagas Permai

PELAIHARI

Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Mondes, ST, MS
Jabatan : Kabid Tata Lingkungan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,


Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST, MT
NIP. 19790709 200701 1 022


Yanti Mondes, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD
TAHUN ANGGARAN

: DINAS PERKIM DAN LH KAB. TANAH LAUT
: 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersusun	100%
		Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang taat aturan	100%
		Persentase Nilai Baku Mutu Lingkungan Hidup yang terpenuhi	100%

PROGRAM KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - <i>Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota</i>	217.047.044,02
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - <i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	89.252.016,00
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	100.940.081,16

Kepala Dinas


Gusti Dwi Erzandi Kasuma, ST, MT
NIP. 19790709 200701 1 022

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid. Tata Lingkungan


Yanti Mondes, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARTINI FAURINA, A.MD. KL

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YANTI MONDES, ST, MS

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

YANTI MONDES, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

Pihak Pertama,

ARTINI FAURINA, A.MD. KL
NIP. 19940421 202012 2 018

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Dokumen Perizinan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Dokumen Perizinan	1 Dokumen
2	Memantau Dokumen Perizinan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah kegiatan pemantauan Dokumen Perizinan	10 Kali
3	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil pengendalian program kerja	1 Dokumen
4	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan	10 Kali
5	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan berkala yang disusun	10 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	20 Laporan

Kepala Bidang Tata Lingkungan


YANTI MONDES, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

Pelaihari, 02 September 2025
Pengolah Data dan Informasi,


ARTINI FAURINA, A.MD. KL
NIP. 19940421 202012 2 018



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan A.Syukri Komplek Gagas Permai Telp.(0512) 21552 Fax.(0512) 21552
PELAIHARI

Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bashori Ishaq, ST
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yanti Mondes, ST, MS
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Tata Lingkungan,

Yanti Mondes, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli
Pertama

Bashori Ishaq, ST
NIP. 19970722 202421 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD

TAHUN ANGGARAN

: DINAS PERKIM & LH KAB. TANAH LAUT

: 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	KINERJA UTAMA		
1	Melaksanakan pengkajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Jumlah dokumen kajian peraturan/kebijaksanaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	1 Dokumen
2	Mengidentifikasi kelompok sasaran penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	Jumlah kelompok sasaran penyuluhan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	5 Kelompok
3	Menganalisis data pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	Jumlah dokumen analisis pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran	1 Dokumen
4	Melakukan evaluasi terhadap efektifitas Kajian Dokumen AMDAL	Jumlah dokumen evaluasi efektifitas Kajian Dokumen AMDAL	1 Dokumen
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP		
1	Melaksanakan perlindungan sumber daya alam		
2	Melaksanakan pengawetan sumber daya alam		
3	Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Desa dan/atau Kelurahan yang terdaftar dalam Program Kampung Iklim	1 Laporan
4	Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
5	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah dokumen tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	48 Dokumen

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid. Tata Lingkungan,



Yanti Mondes, ST,MS

NIP. 19761204 200604 2 005

Pengendali Dampak Lingkungan Ahi Pertama



Bashori Ishaq, ST

NIP. 19970722 202421 1 008

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 100.940.081,16

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Tata Lingkungan,



Yanti Mondes, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama



Bashori Ishaq, ST
NIP. 19970722 202421 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAI PUJI LESTARI, ST

Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YANTI MONDES, ST, MS

Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

YANTI MONDES, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

Pihak Pertama,

MAI PUJI LESTARI, ST
NIP. 19830502 201502 2 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Verifikasi administrasi perizinan berusaha	Jumlah dokumen lingkungan yang diverifikasi	30 dokumen
2	Evaluasi Dokumen perizinan Berusaha	Jumlah dokumen lingkungan yang dievaluasi	30 dokumen
3	Penyusunan draft Perizinan Berusaha	Jumlah draft persetujuan lingkungan yang disusun	30 dokumen
4	Mengevaluasi Dokumen AMDAL	Jumlah dokumen lingkungan AMDAL yang dievaluasi	30 dokumen
5	evaluasi penilaian administrasi persetujuan teknis	Jumlah dokumen kajian/standar teknis yang dinilai	6 dokumen
6	evaluasi dokumen persetujuan teknis	Jumlah dokumen kajian/standar teknis yang dievaluasi	6 dokumen
7	pembahasan substansi persetujuan teknis	Jumlah pembahasan dokumen kajian/standar teknis	6 kegiatan
8	evaluasi perbaikan dokumen persetujuan teknis	Jumlah pemeriksaan perbaikan dokumen kajian/standar teknis	6 dokumen
9	penyusunan persetujuan teknis	Jumlah persetujuan teknis yang disusun	6 dokumen
10	melakukan perencanaan verifikasi lapangan berdasarkan dokumen pengajuan PB	Jumlah pengajuan berkas dokumen SLO	2 dokumen
11	pemeriksaan kesesuaian kondisi lapangan dengan pengajuan PB/PB	Jumlah berkas dokumen pengajuan SLO yang terverifikasi	2 dokumen
12	verifikasi lapangan SLO (Surat Kelayakan Operasi)	Jumlah verifikasi lapangan SLO	2 kegiatan
13	Penyusunan SLO (Surat Kelayakan Operasi)	Jumlah penyusunan SLO	2 dokumen
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ ATAU IZIN PPLH		
1	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program,	Jumlah dokumen penyiapan bahan dan pelaksanaan	2 Dokumen

	rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kajian Dampak Lingkungan	penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kajian Dampak Lingkungan	
2	Mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, SLO, Audit LH, Analisis resiko LH)	Jumlah dokumen instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis, SLO, Audit LH, Analisis resiko LH)	1 Dokumen
3	Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan dan per undang-undangan	Jumlah dokumen dokumen lingkungan yang dinilai sesuai dengan ketentuan dan per undang-undangan	1 Dokumen
4	Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)	Jumlah dokumen SK tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan)	2 Dokumen
5	Melaksanakan proses perizinan/non perizinan/rekomendasi izin lingkungan	Jumlah dokumen perizinan/non perizinan/rekomendasi izin lingkungan yang diproses	1 Dokumen
6	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kajian Dampak Lingkungan	1 Dokumen
7	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah dokumen tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	48 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 89.252.016,-
		- Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 89.252.016,-

Kepala Bidang Tata Lingkungan,



YANTI MONDES, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

Pelatihari, 02 September 2025
Pengendali Dampak Lingkungan Muda,



MAI PUJI LESTARI, ST
NIP. 19830502 201502 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan A.Syukri Komplek Gagas Permai Telp.(0512) 21552 Fax.(0512) 21552
PELAIHARI

Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meilawati, ST., M.Ling
Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yanti Mondes, ST, MS
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid Tata Lingkungan,

Yanti Mondes, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

Pengendali Dampak Lingkungan Muda

Meilawati, ST.,M.Ling
NIP. 19820528 201001 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD
TAHUN ANGGARAN

: DINAS PERKIM & LH KAB. TANAH LAUT
: 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A	KINERJA UTAMA		
1	Indeks Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen
2	Inventarisasi Sumber Pencemar	Jumlah dokumen inventarisasi	1 Dokumen
3	Pemrosesan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional	Jumlah evaluasi dokumen Pertek	1 Dokumen
4	Pemantauan, Pengumpulan Bahan dan Keterangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Pemantauan, Pengumpulan Bahan dan Keterangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen
5	Kajian Analisis Dampak Lingkungan	Jumlah evaluasi kajian analisis dampak lingkungan	1 Dokumen
B	KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS		
1	Menginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam	Jumlah dokumen inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam	1 Dokumen
2	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM	0 Dokumen
3	Menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	0 Dokumen
4	Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah dokumen penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	3 Dokumen
5	Menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen
6	Menyusun indeks kualitas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen indeks kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen
7	Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten	3 Dokumen
8	Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS	Jumlah dokumen Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS	3 Dokumen
9	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan di bidang tata lingkungan	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan di bidang tata lingkungan	1 Dokumen
10	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah dokumen tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	48 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Rp. 217.047.044,02

Pelaihari, 2 September 2024

Kabid Tata Lingkungan,



Yanti Mondes, ST, MS
NIP. 19761204 200604 2 005

Pengendali Dampak Lingkungan Muda



Meilawati, ST., M.Ling
NIP. 19820528 201001 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri Komplek Gagas Permai, Pelaihari Kode Pos 70814 Telp.(0512) 21552

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ADI RAHMANI, SP

Jabatan : Kabid. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, S.T.,M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Gusti Dwi Erzandi Kasuma, S.T.,M.T.
NIP. 19790709 200701 1 022


H. Adi Rahmani, SP
NIP. 19720621 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Meningkatnya pengelolaan pengaduan di bidang lingkungan hidup	Persentase penyelesaian Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100%
2	Meningkatnya pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, Provinsi dan Peraturan Perundang Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan Lingkungan	Persentase sampah berkurang di masyarakat (Reduksi sampah 5.000 kg)	100%
4	Melakukan pembinaan sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	Jumlah sekolah berwawasan lingkungan (Adiwiyata) 2 Sekolah	100%
5	Melakukan pembinaan pengelolaan bank sampah	- Jumlah bank sampah yang terbina (5 Bank Sampah)	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 76.572.276,11,-
2	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Rp. 156.696.585,98,-
3	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 56.222.570,84,-
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Rp. 46.998.247,81,- Rp. 31.000.000,-

Pihak kedua

Gusti Dwi Erzandi Kasuma, S.T.,M.T.
NIP. 19790709 200701 1 002

Pelaihari, 02 September 2025
Kabid P2KLH,

H. Adi Rahmani, SP
NIP. 19720621 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. A. Syukri Komplek Gagas Permai, Pelaihari Kode Pos 70814 Telp.(0512) 21552

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTIK ISTIANI PRIHATININGTYAS, ST

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADI RAHMANI, SP

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

ADI RAHMANI, SP
NIP. 19720621 199603 1 003

Pihak Pertama,

ANTI K ISTIANI PRIHATININGTYAS, ST
NIP. 19770419 201001 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan (sumber daya manusia; peralatan dan bahan; agenda; biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli	Melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan (sumber daya manusia; peralatan dan bahan; agenda; biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli	50 Dokumen
2	Melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan (reconaisance)	Jumlah dokumen prakunjungan pengawasan (reconaisance)	50 Dokumen
3	Melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang	1 Dokumen
4	Melakukan kegiatan pembuatan daftar pemeriksaan (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang; yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen kegiatan pembuatan daftar pemeriksaan (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang;	50 Dokumen
5.	Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi	dokumen kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan termasuk overlay hotspot)	1 Dokumen

	pengawasan termasuk overlay hotspot)		
6.	Melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya)	Jumlah dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya)	50 Dokumen
7.	Membuat dokumen ringkasan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya)	"Jumlah dokumen ringkasan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya)"	50 Dokumen
8.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3	50 Dokumen
9.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas sedang	50 Dokumen
10.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang	50 Dokumen
11.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas sedang	1 Dokumen

12.	Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat	Jumlah dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat	50 Dokumen
13.	Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat kejadian darurat	Jumlah dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat kejadian darurat	1 Dokumen
14.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas sedang	50 Dokumen
15.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang	50 Dokumen

16.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas sedang	2 Dokumen
17.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap neraca penggunaan air	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap neraca penggunaan air	50 Dokumen
18.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas sedang	50 Dokumen
19.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara (antara lain scrubber, electric precipitator, bag house)	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara (antara lain scrubber, electric precipitator, bag house)	25 Dokumen
20.	Melakukan pengawasan penataan baku emisi sumber bergerak	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan baku emisi sumber bergerak	1 Dokumen
21.	Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah	Jumlah dokumen berita acara pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah	2 Dokumen

	Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate)	Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate)	
22.	Melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampah	Jumlah dokumen berita acara pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampah	2 Dokumen
23.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan	1 Dokumen
24.	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana prasarana pengendalian kerusakan gambut)	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana prasarana pengendalian kerusakan gambut)	20 Dokumen
25.	Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan	1 Dokumen

26.	Melakukan kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan	Jumlah dokumen berita acara kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan	1 Dokumen
27.	Melakukan kegiatan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas sedang	25 Dokumen
28.	Melakukan pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan	Jumlah dokumen berita acara pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan	50 Dokumen
29.	Menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan penutup dalam tim	Jumlah laporan pertemuan penutup dalam tim	50 Laporan
30.	Melaksanakan kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang	50 Dokumen
31.	Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa teguran tertulis	Jumlah dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi administratif berupa teguran tertulis	5 Dokumen
32.	Merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah	Jumlah dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah	1 Dokumen
33.	Merumuskan rekomendasi saksi pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan	Jumlah dokumen sebagai saksi pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan	1 Dokumen
34.	Melaksanakan kegiatan pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penataan usaha dan/atau kegiatan	Jumlah dokumen pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penataan usaha dan/atau kegiatan	30 Dokumen

35.	Melakukan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai peserta	Jumlah laporan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai peserta	1 Laporan
36.	Menyusun laporan rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin	Jumlah dokumen laporan rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin	1 Dokumen
37.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan laporan kejadian tindak pidana pidana lingkungan hidup	Jumlah laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Laporan
38.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara	Jumlah dokumen penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara	1 Dokumen
39.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan pidana lingkungan hidup	Jumlah dokumen surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen
40.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi saksi pidana lingkungan hidup	Jumlah dokumen surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen
41.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan tersangka lingkungan hidup	Jumlah dokumen surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen
42.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi saksi tindak pidana lingkungan hidup	Jumlah dokumen berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen
43.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tersangka pidana lingkungan hidup	Jumlah dokumen berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen

44.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan	Jumlah dokumen berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen
45.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri	Jumlah dokumen surat permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen
46.	melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan resume	Jumlah dokumen pembuatan resume penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen
47.	Melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri	Jumlah dokumen berita acara penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup	1 Dokumen
B	KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNG JAWAB KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI		
1.	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	3 Dokumen
2.	Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan hidup	Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan hidup	1 Dokumen
3.	Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan hukum lingkungan hidup dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan hukum lingkungan hidup dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku	1 Dokumen
4.	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan	Jumlah dokumen data penegakan hukum lingkungan hidup	1 Dokumen

	data penegakan hukum lingkungan hidup		
5.	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	Jumlah dokumen bahan perumusan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	1 Dokumen
6.	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Jumlah dokumen bahan perumusan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan	4 Dokumen
7.	Membina dan mengawasi terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen
8.	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	1 Dokumen
9.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah dokumen tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	20 Dokumen
10.	Melaksanakan evaluasi penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper)	Jumlah dokumen penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper)	6 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		- Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan	Rp. 46.998.247,81

		yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang PPLH	
		- Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Rp. 31.000.000,-

Kepala Bidang Penataan dan
Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup,



ADI RAHMANI, SP
NIP. 19720621 199603 1 003

Pelaihari, 02 September 2025
Pengawas Lingkungan Hidup Muda,



ANTIK ISTIANI PRIHATININGTYAS, ST
NIP. 19770419 201001 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari Kode Pos 70814
Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISSA EKAWATY, S.ST., M.KES

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADI RAHMANI, S.P

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Pihak Kedua,

ADI RAHMANI, S.P
NIP. 19720621 199603 1 003

Pihak Pertama,

LISSA EKAWATY, S.ST., M.KES
NIP. 19771102 200501 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP
KAB. TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama 1	Indikator Kinerja 2	Target 3
A	KINERJA UTAMA		
1	Melakukan fasilitasi Pengelolaan Pengaduan di bidang lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang difasilitasi	10 Dokumen
2	Melakukan verifikasi pengaduan bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen pengaduan lingkungan hidup yang di verifikasi	10 Dokumen
3	Melakukan penerbitan rekomendasi tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup	Jumlah dokumen rekomendasi pengaduan bidang lingkungan hidup yang diterbitkan	10 Dokumen
4	Melakukan monitoring atas hasil tindak lanjut pengaduan	Jumlah kegiatan usaha yang dimonitoring	10 Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 76.572.276,11,-

Kepala Bidang PPKLH,

ADIRAHMANI, S.P
NIP. 19720621 199603 1 003

Pelaihari, 2 September 2025
Pengawas Lingkungan Hidup
Muda

LISSA EKAWATY, S.ST., M.KES
NIP. 19771102 200501 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814
Telp. (0512) 21003 Fax. (0512) 21300

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISSA EKAWATY, S.ST., M.KES

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADI RAHMANI, S.P

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Pihak Kedua,

ADI RAHMANI, S.P
NIP. 19720621 199603 1 003

Pihak Pertama,

LISSA EKAWATY, S.ST., M.KES
NIP. 19771102 200501 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN & LINGKUNGAN HIDUP
KAB. TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama 1	Indikator Kinerja 2	Target 3
A KINERJA UTAMA			
1	Melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan/penanganan pengaduan (Sumber daya manusia, peralatan dan bahan, agenda, biaya, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil , ahli)	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan/penanganan pengaduan (Sumber daya manusia, peralatan dan bahan, agenda, biaya, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil , ahli)	25 Dokumen
2	Melakukan kegiatan pengawasan dengan kompleksitas sedang;	Jumlah Dokumen Berita Acara Pengawasan	12 Berita Acara
3	Melakukan evaluasi laporan rutin pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi laporan rutin pengelolaan lingkungan usaha da./atau kegiatan	12 Dokumen
4	Melaksanakan pengembangan kapasitas pejabat pengawasa Lingkungan Hidup (Diklat, Webinar)	Jumlah Sertipikat	4 Sertipikat
B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP			
1	Memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4 Dokumen Pengaduan
2	Melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan	Jumlah dokumen verifikasi	4 Dokumen

5	Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi	Jumlah rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi	4 Dokumen
6	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Jumlah Kegiatan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	25 Kegiatan
7	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah kegiatan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	120 Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 76.572.726,11,-

Kepala Bidang PPKLH,



ADI RAHMANI, S.P
NIP. 19720621 199603 1 003

Pelaihari, 2 September 2025
Pengawas Lingkungan Hidup
Muda,



LISSA EKAWATY, S.ST., M.KES
NIP. 19771102 200501 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri Komplek Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp/Fax. 0512-21552

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMAJI, A.Md

Jabatan : Pengolah Data dan Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADI RAHMANI, SP

Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

ADI RAHMANI, SP
NIP. 19720621 199603 1 003

Pihak Pertama,

DARMAJI, A.Md
NIP. 19791010 201101 1 003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun Program Kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan lingkungan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah Dokumen program kerja, bahan, dan alat perlengkapan pengelolaan lingkungan	1 Dokumen
2.	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan	40 Kali
3.	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil pengendalian program kerja	1 Dokumen
4.	Memantau lingkungan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah kegiatan pemantauan lingkungan	12 Kali
5.	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan berkala yang disusun	12 Laporan
6.	Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Kegiatan tugas kedinasan lain	12 Laporan

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup


 ADI RAHMANI, SP
 NIP. 19720621 199603 1 003

Pelatihari, 02 September 2025
 Pengolah Data dan Informasi,


 DARMAJI, A.Md
 NIP. 19791010 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri Komplek Gagas Permai Telp. (0512) 21552 Fax. (0512) 21552
PELAIHARI

Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARTIKA LISA, S.Hut, MP

Jabatan : Kabid. Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST, M.T

Jabatan : Kepala Dinas Perkim dan LH Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST., M.T
NIP. 19730709 200701 1 022


KARTIKA LISA, S.Hut, MP
NIP. 19700925 199703 2 008

**PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERKIM DAN LH**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase capaian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%
2.	Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase capaian penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%
3.	Meningkatnya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase capaian pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Rp. 1.042.438.913,99,-
		2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Rp. 44.106.137,-

		3. Kegiatan Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi- Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp. 67.495.116,- Rp. 200.000.000,-
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Dinas Perkim dan LH,

Kabid Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH,


GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, ST., M.T
NIP. 19790709 200701 1 022


KARTIKA LISA, S.Hut, MP
NIP. 19700925 199703 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan A. Syukri Komplek Gagas Permai Pelaihari Kode Pos 70814

Telp. (0512) 21552 Fax (0512) 21552

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Listiani Rafika Hikmah, SKM

Jabatan : Pengawas Lingkungan Hidup Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. Kartika Lisa, S. Hut, MP

Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran & Perusakan LH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Pihak Kedua

Hj. Kartika Lisa, S. Hut, MP
NIP.19700925 199703 2 008

Pihak Pertama

Listiani Rafika Hikmah, SKM
NIP.19821005 200903 2 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

**SKPD
TAHUN ANGGARAN
SUB.KEG**

**: DINAS PERKIM & LH KAB. TANAH LAUT
: 2025
: Sinkronisasi, koordinasi dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah,
Air, Udara dan Laut**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A KINERJA UTAMA			
1	Melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan (reconaisance)	Jumlah dokumen prakunjungan pengawasan (reconaisance)	10 Dokumen
2	Menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan pendahuluan	Jumlah dokumen berita acara menatalaksanakan mendokumentasikan pertemuan pendahuluan	10 Dokumen
3	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 untuk kegiatan pada penggunaan B3	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3	10 Dokumen
4	Melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat	Jumlah dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat	10 Dokumen
5	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang	10 Dokumen
6	Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara	10 Dokumen
7	Melakukan pengawasan penataan baku mutu emisi sumber bergerak	Jumlah dokumen berita acara pengawasan penataan baku mutu emisi sumber bergerak	10 Dokumen
8	Melakukan pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan	Jumlah dokumen berita acara pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan	10 Dokumen
B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR PEMANTAUAN LINGKUNGAN			
9	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran	Jumlah dokumen penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran	2 Dokumen
10	Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemantauan lingkungan	Jumlah dokumen pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemantauan lingkungan	6 Dokumen
11	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemantauan lingkungan	Jumlah dokumen data pemantauan lingkungan	4 Dokumen
12	Melaksanakan pemantauan kualitas air	Jumlah dokumen pemantauan kualitas air	2 Dokumen
13	Melaksanaan pemantauan kualitas udara (ISPU)	Jumlah dokumen pemantauan kualitas udara	2 Dokumen
14	Melaksanaan pemantauan kualitas udara (Passive Sampler)	Jumlah dokumen pemantauan kualitas udara	2 Dokumen
15	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemantauan Lingkungan	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemantauan Lingkungan	11 Dokumen
16	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah dokumen tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	12 Dokumen

Pelaihari, 2 September 2025

**Kabid. Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan LH,**



**Kartika Lisa, S.Hut, MP
NIP. 19731128 199803 1 008**

**Pengawas Lingkungan
Hidup Muda**



**Listiani Rafika Hikmah, S.KM
NIP. 19821005 200903 2 016**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHANRAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan A. Syukri Komplek Gagas Permai Telp. (0512) 21552 Fax (0512) 21552

PELAIHARI

Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saptaning Zulaekhah, ST

Jabatan : Pengendali Dampak Lingkungan Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hj. Kartika Lisa, S.Hut,MP

Jabatan : Kabid Pengendalian Pencemaran & Perusakan LH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Pihak Kedua

Hj. Kartika Lisa, S.Hut,MP
NIP.19700925 199703 2 008

Pihak Pertama

Saptaning Zulaekhah, ST
NIP.19790701 201001 2 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

SKPD : DINAS PERKIM & LH KAB. TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN : 2025
SUB KEGIATAN : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A KINERJA UTAMA			
1	Menyusun program kegiatan pembinaan kelompok sasaran	Jumlah dokumen hasil penyusunan program kegiatan pembinaan kelompok sasaran	1 dokumen
2	Menyusun materi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen materi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 dokumen
3	Melakukan pembahasan teknis perizinan lingkungan	Jumlah dokumen hasil pembahasan teknis perizinan lingkungan	2 Dokumen
4	Melakukan verifikasi lapangan perizinan lingkungan	Jumlah dokumen hasil verifikasi lingkungan	1 dokumen
5	Melakukan kegiatan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan	Jumlah dokumen pengambilan contoh uji kualitas lingkungan	2 Dokumen
6	Melakukan kegiatan pengujian/ pengukuran parameter lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengujian/ pengukuran parameter lingkungan	2 Dokumen
7	Melakukan evaluasi dokumen perizinan lingkungan;	Jumlah dokumen hasil evaluasi dokumen perizinan lingkungan	1 Dokumen
8	Mengidentifikasi kelompok sasaran pembinaan	Jumlah dokumen hasil identifikasi kelompok sasaran pembinaan	2 Dokumen
9	Menyampaikan materi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah dokumen materi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	2 dokumen
B KINERJA TAMBAHAN SUB KOORDINATOR PENCEMARAN LINGKUNGAN			
1	Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat	Jumlah dokumen persiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran sub kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	1 Dokumen
2	Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencemaran lingkungan	Jumlah dokumen persiapan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pencemaran lingkungan	1 Dokumen
3	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	Jumlah dokumen tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya	25 dokumen

Pelaihari, 2 September 2025

Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH,



Kartika Lisa, S.Hut,MP
 NIP. 19731128 199803 1 008

Pengendali Dampak Lingkungan Muda



Saptaning Zulaekhah, ST
 NIP. 19790701 201001 2 016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINIKA ARDINA RAHMAN, ST.,M.Ling

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. KARTIKA LISA, S.Hut.,MP

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

KARTIKA LISA, S.Hut.,MP
NIP. 19700925 199703 2 008

Pihak Pertama,

RINIKA ARDINA RAHMAN, ST.,M.Ling
NIP. 19920713 201903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama 1	Indikator Kinerja 2	Target 3
1	Menghimpun data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang dihimpun	1 Dokumen
2	Mengolah dan menganalisis data awal	Jumlah data awal yang diolah dan dianalisis	1 Dokumen
3	Menyiapkan dokumen pendukung teknis	Jumlah dokumen teknis yang disiapkan	1 Dokumen
4	Melakukan penggandaan dan distribusi bahan	Jumlah bahan yang digandakan dan didistribusikan	1 Dokumen
5	Melakukan pengarsipan bahan teknis	Jumlah bahan teknis yang diarsipkan	1 Dokumen
6	Mendukung pelaksanaan rapat/koordinasi teknis	Jumlah rapat/koordinasi teknis yang didukung pelaksanaannya	2 kali
7	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	Jumlah tugas lain yang dilaksanakan berdasarkan perintah atasan	20 kali

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup



KARTIKA LISA, S.Hut.,MP
NIP. 19700925 199703 2 008

Pelaihari, 02 September 2025
Penelaah Teknis Kebijakan,



RINIKA ARDINA RAHMAN, ST.,M.Ling
NIP. 19920713 201903 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKRIANI, S.ST

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. KARTIKA LISA, S.Hut.,MP

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

KARTIKA LISA, S.Hut.,MP
NIP. 19700925 199703 2 008

Pihak Pertama,

SUKRIANI, S.ST
NIP. 19760408 199603 2 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menghimpun data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang dihimpun	1 Dokumen
2	Mengolah dan menganalisis data awal	Jumlah data awal yang diolah dan dianalisis	1 Dokumen
3	Menyiapkan dokumen pendukung teknis	Jumlah dokumen teknis yang disiapkan	1 Dokumen
4	Melakukan penggandaan dan distribusi bahan	Jumlah bahan yang digandakan dan didistribusikan	1 Dokumen
5	Melakukan pengarsipan bahan teknis	Jumlah bahan teknis yang diarsipkan	1 Dokumen
6	Mendukung pelaksanaan rapat/koordinasi teknis	Jumlah rapat/koordinasi teknis yang didukung pelaksanaannya	2 kali
7	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	Jumlah tugas lain yang dilaksanakan berdasarkan perintah atasan	20 kali

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup



KARTIKA LISA, S.Hut.,MP
NIP. 19700925 199703 2 008

Pelaihari, 02 September 2025
Penelaah Teknis Kebijakan,



SUKRIANI, S.ST
NIP. 19760408 199603 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A.Syukri Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRZA RIFANI,SKM

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. KARTIKA LISA, S.Hut.,MP

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

KARTIKA LISA, S.Hut.,MP
NIP. 19700925 199703 2 008

Pihak Pertama,

IRZA RIFANI, SKM
NIP. 19860922 200903 1 004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menghimpun data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang dihimpun	1 Dokumen
2	Mengolah dan menganalisis data awal	Jumlah data awal yang diolah dan dianalisis	1 Dokumen
3	Menyiapkan dokumen pendukung teknis	Jumlah dokumen teknis yang disiapkan	1 Dokumen
4	Melakukan penggandaan dan distribusi bahan	Jumlah bahan yang digandakan dan didistribusikan	1 Dokumen
5	Melakukan pengarsipan bahan teknis	Jumlah bahan teknis yang diarsipkan	1 Dokumen
6	Mendukung pelaksanaan rapat/koordinasi teknis	Jumlah rapat/koordinasi teknis yang didukung pelaksanaannya	2 kali
7	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan	Jumlah tugas lain yang dilaksanakan berdasarkan perintah atasan	20 kali

Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup



KARTIKA LISA, S.Hut.,MP
NIP. 19700925 199703 2 008

Pelaihari, 02 September 2025
Penelaah Teknis Kebijakan,



IRZA RIFANI, SKM
NIP. 19860922 200903 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai, Pelaihari 70814. Telp (0512) 21552
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MERAH BOGA YUSWANTORO BANGSAWAN, ST. KL

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, S.T., M.T

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 September 2025

Pihak Kedua,

GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, S.T., M.T
NIP. 19790709 200701 1 022

Pihak Pertama,

MERAH BOGA YB, ST. KL
NIP. 19870117 200903 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Menyediakan parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	Jumlah parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025	36 Parameter
2	Melaksanakan pengujian laboratorium lingkungan sesuai standar	Jumlah pengujian laboratorium sesuai standar	250 LHU
3	Melakukan penarikan retribusi jasa uji Lab.	Nilai retribusi jasa uji Lab.	Rp. 535.000.000

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
		- Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 4,128,761,130.00
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 15,904,452.82
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 9,985,071.00
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD	Rp. 20,625,000.00

		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 47,998,789.00
		- Pengadaan Mebel	Rp. 72,908,995.80
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 38,295,000.00
		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 6.950.000,00

Pelaihari, 02 September 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab. Tanah Laut

Kepala UPT Laboratorium

GUSTI DWI ERZANDI KASUMA, S.T., M.T
NIP. 19790709 200701 1 022

MERAH BOGA YB, ST. KL
NIP. 19870117 200903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai, Pelaihari 70814. Telp (0512) 21552
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILA ALFISAH, A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MERAH BOGA YB, ST. KL

Jabatan : Kepala UPT Laboratorium Lingkungan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 September 2025

Pihak Pertama,

LAILA ALFISAH, A.Md
NIP. 198112272005012009

Pihak Kedua,

MERAH BOGA YB, ST. KL
NIP. 198701172009031002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Melakukan Pengelolaan Penatausahaan UPT Laboratorium Lingkungan	Jumlah Pengelolaan Penatausahaan Laboratorium yang sesuai SOP	2 Jenis
2	Melakukan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium Lingkungan yang dipelihara dan dimanfaatkan	2 Jenis

Pelaihari, 2 September 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


MERAH BOGA YB, ST. KL
NIP. 198701172009031002


LAILA ALFISAH, A.Md
NIP. 198112272005012009



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS
PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. . A. Syukri Komp. Perum. Gagas Permai Pelaihari 70814 Telp(0512)21552-Fax 21552
Email : lingkunganhiduptala@gmail.com

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 031 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR UTAMA**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025 - 2029**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa dalam rangka menyusun pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2025-2029;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut Tahun tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Indikator Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029.

KEDUA :Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2025-2029. sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :Indikator Kinerja Utama ini menjadi acuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029.

KEEMPAT :Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Kelima :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
pada tanggal : 12 Agustus 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025**

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas;
e. pembinaan UPTD Dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
g. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- h. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan menetapkan perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- j. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman;
- k. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata kota;
- l. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata lingkungan;
- m. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- n. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- o. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi memberikan perizinan/non perizinan/rekomendasi teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang

No.	Kinerja Utama / Outcome / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Data
1	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	1	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2	$\frac{\text{Energi} \times \text{IPPU} \times \text{Pertanian} \times \text{Kehutanan} \times \text{Limbah}}{100\%}$	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		3	$(0,7127 \text{ IKA}) + (0,7182 \text{ IKU}) + (0,6517 \text{ IKL}) = 70,16$	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kab. Tanah Laut,



GUSTADWI ERZANDI KASUMA, ST.M.T

Pembina (IV/a)

NIP. 19790709 200701 1 022

RENCANA AKSI
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Anggaran	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4		Sumber Anggaran
											Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Internal Perangkat Daerah	Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kepuasan Pegawai pada Layanan Internal Perangkat Daerah		100	20.242.530.181	5.007.442.601	25%	5.007.442.591	25%	5.007.442.592	25%	5.220.202.397	25%	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase	100			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		100	20.242.530.181	5.007.442.601	25%	5.007.442.591	25%	5.007.442.592	25%	5.220.202.397	25%	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	16.999.157	4.249.793	25%	4.249.788	25%	4.249.788	25%	4.249.788	25%	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*)		6	9.999.403	2.499.853,00	1	2.499.850,00	1	2.499.850,00	2	2.499.850,00	2	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	6.999.754	1.749.940,00	0	1.749.938,00	1	1.749.938,00	1	1.749.938,00	1	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	11.129.687.664	2.782.421.916	25%	2.782.421.916	25%	2.782.421.916	25%	2.782.421.916	25%	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	58	11.123.688.104	2.780.922.026,00	58	2.780.922.026,00	58	2.780.922.026,00	58	2.780.922.026,00	58	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5	5.999.560	1.499.890,00	1	1.499.890,00	1	1.499.890,00	1	1.499.890,00	2	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	65.138.103	-	0%	-	0%	-	0%	65.138.103	100%	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	9.138.103	-	0	-	0	-	0	9.138.103,00	2	

						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	56.000.000	-	5	-	5	-	5	56.000.000,00	5	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	557.655.441	102.508.435	25%	102.508.434	25%	102.508.435	25%	250.130.137	25%	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	19.987.787	4.996.946,00	1	4.996.947,00	0	4.996.947,00	0	4.996.947,00	0	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	147.621.702	-	1	-	1	-	2	147.621.702,00	2	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	19.941.538	4.985.384,00	1	4.985.384,00	0	4.985.385,00	0	4.985.385,00	0	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	24.999.901	6.249.976,00	1	6.249.975,00	1	6.249.975,00	1	6.249.975,00	0	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.530.000	382.500,00	0	382.500,00	0	382.500,00	0	382.500,00	1	
						Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	15.984.513	3.996.129,00	0	3.996.128,00	0	3.996.128,00	1	3.996.128,00	0	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	327.590.000	81.897.500,00	100	81.897.500,00	100	81.897.500,00	200	81.897.500,00	200	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				35.435.912	8.858.981	25%	8.858.977	25%	8.858.977	25%	8.858.977	25%	

						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	24.414.950	6.103.739,00	2	6.103.737,00	2	6.103.737,00	2	6.103.737,00	3	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	11.020.962	2.755.242,00	0	2.755.240,00	0	2.755.240,00	1	2.755.240,00	0	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persen	100	8.036.409.896	2.009.102.474	25%	2.009.102.474	25%	2.009.102.474	25%	2.009.102.474	25%	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	330.130.000	82.532.500,00	2	82.532.500,00	2	82.532.500,00	4	82.532.500,00	4	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7.706.279.896	1.926.569.974,00	2	1.926.569.974,00	2	1.926.569.974,00	4	1.926.569.974,00	4	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	401.204.008	100.301.002	25%	100.301.002	25%	100.301.002	25%	100.301.002	25%	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	38.487.900	9.621.975,00	0	9.621.975,00	1	9.621.975,00	0	9.621.975,00	0	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	327.000.000	81.750.000,00	4	81.750.000,00	4	81.750.000,00	4	81.750.000,00	6	
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	16	10.000.000	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	2.500.000,00	4	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	38	20.000.000	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	38	

						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.716.108	1.429.027,00	0	1.429.027,00	0	1.429.027,00	0	1.429.027,00	1	
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	54,21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni			24,95	1.371.765.422	-	0%	-	0%	-	0%	1.371.765.422	100%	
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase	42			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persen	100	58.265.422	-	0%	-	0%	-	0%	58.265.422	100%	
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	58.265.422	-	0	-	0	-	0	58.265.422,00	1	
						Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.303.500.000	-	0%	-	0%	-	0%	1.303.500.000	100%	
						Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	20	473.720.000	-	0	-	0	-	0	473.720.000,00	20	
						Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	23	829.780.000	-	0	-	0	-	0	829.780.000,00	23	
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				10.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	10.000.000	100%	

						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	10.000.000	-	0	-	0	-	0	10.000.000,00	1		
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	54,21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni			24,95	9.585.300.000	13.750.000	25%	13.750.000	25%	13.750.000	25%	9.544.050.000	25%		
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase	42			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persen	100	35.000.000	8.750.000	25%	8.750.000	25%	8.750.000	25%	8.750.000	25%		
						Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1	35.000.000	8.750.000,00	0	8.750.000,00	0	8.750.000,00	0	8.750.000,00	0	8.750.000,00	1
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	24,95 Persen	0	9.550.300.000	5.000.000	25%	5.000.000	25%	5.000.000	25%	9.535.300.000	25%		
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	365	9.530.300.000	-	0	-	0	-	0	9.530.300.000,00	365		
						Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen	1	20.000.000	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	1
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	54,21	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Persentase Luasan Kawasan Kumuh			11,11	4.977.500.000	-	0%	-	0%	-	0%	4.977.500.000	100%		

		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase	42		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	4.977.500.000	-	0%	-	0%	-	0%	4.977.500.000	100%
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	181	4.977.500.000	-	0	-	0	-	0	4.977.500.000,00	181
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	54,21	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Permukiman yang memiliki PSU Sesuai Standar		1,66	53.293.278.698	13.323.319.674	25%	13.323.319.674	25%	13.323.319.675	25%	13.323.319.675	25%	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase	42		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian pelaksanaan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Persen	100	53.293.278.698	13.323.319.674	25%	13.323.319.674	25%	13.323.319.675	25%	13.323.319.675	25%
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	3	300.000.000	75.000.000,00	0	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1
						Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	7	52.993.278.698	13.248.319.674,00	0	13.248.319.674,00	3	13.248.319.675,00	3	13.248.319.675,00	1
Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	503,416	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Program Perencanaan yang Termanfaatkan Sesuai Standar		100	126.957.098	-	0%	-	0%	-	0%	126.957.098	100%	

		Indeks Kualitas Air	Indeks	71,27		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air	Poin	71,27	126.957.098	-	0%	-	0%	-	0%	126.957.098	100%	
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,82		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	2	126.957.098	-	0	-	0	-	0	126.957.098,00	2	
	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	503,416	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Nilai Baku Mutu Lingkungan Hidup Yang Terpenuhi		100	1.457.380.248	321.978.763	25%	321.978.762	25%	321.978.763	25%	491.443.960	25%	
		Indeks Kualitas Air	Indeks	71,27			Penurunan Emisi GRK Tahunan		48,553	1.457.380.248	321.978.763	25%	321.978.762	25%	321.978.763	25%	491.443.960	25%	
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,82		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup Kabupaten Tanah Laut	1	1	1.144.888.995	260.737.228	25%	260.737.228	25%	260.737.229	25%	362.677.310	25%	
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,17		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	2	1.042.948.914	260.737.228,00	0	260.737.228,00	0	260.737.229,00	1	260.737.229,00	1	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	101.940.081	-	0	-	0	-	1	101.940.081,00	1	

						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	44.966.137	11.241.535	25%	11.241.534	25%	11.241.534	25%	11.241.534	25%
						Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	44.966.137	11.241.535,00	0	11.241.534,00	0	11.241.534,00	0	11.241.534,00	1
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				267.525.116	50.000.000	25%	50.000.000	25%	50.000.000	25%	117.525.116	25%
						Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	1	200.000.000	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	0	50.000.000,00	1
						Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	67.525.116	-	0	-	0	-	0	67.525.116,00	1
Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	503,416		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase RTH Dalam Kondisi Baik		100	4.539.273.674	1.134.818.418	25%	1.134.818.418	25%	1.134.818.419	25%	1.134.818.419	25%
	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,27			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase kawasan taman yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Persen	100	4.539.273.674	1.134.818.418	25%	1.134.818.418	25%	1.134.818.419	25%	1.134.818.419	25%

		Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,82		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	5	4.539.273.674	1.134.818.418,00	0	1.134.818.418,00	0	1.134.818.419,00	0	1.134.818.419,00	5	
	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	503,416	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Aturan		100	167.315.631	-	0%	-	0%	-	0%	167.315.631	100%	
		Indeks Kualitas Air	Indeks	71,27		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut		1	1	167.315.631	-	0%	-	0%	-	0%	167.315.631	100%
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,82		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Doku men	1	89.252.383	-	0	-	0	-	0	89.252.383,00	1	
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,17		Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	3	31.000.000	-	0	-	1	-	1	31.000.000,00	1	

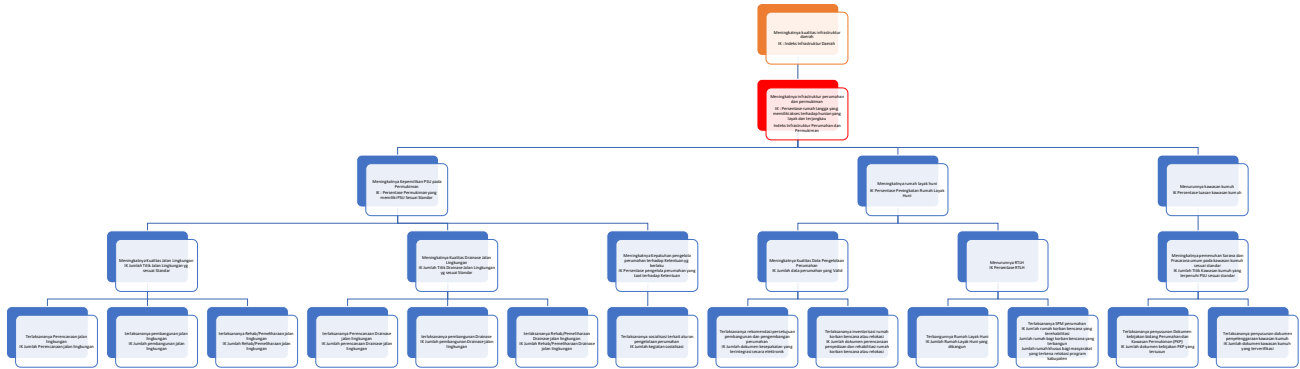
						Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	100	47.063.248	-	0	-	0	-	0	47.063.248,00	100
Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	503,416	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah Satuan Pendidikan yang Nilai Adiwiyatanya Tercapai			2	57.277.571	14.319.393	25%	14.319.393	25%	14.319.393	25%	14.319.392	25%
	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,27		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota		1	1	57.277.571	14.319.393	25%	14.319.393	25%	14.319.393	25%	14.319.392	25%
	Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,82		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		2	57.277.571	14.319.393,00	0	14.319.393,00	0	14.319.393,00	1	14.319.392,00	1
Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	503,416	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Aturan			100	76.572.276	-	0%	-	0%	-	0%	76.572.276	100%
	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,27		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Fasilitas Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		1	1	76.572.276	-	0%	-	0%	-	0%	76.572.276	100%

		Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,82		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	10	76.572.276	-	0	-	0	-	0	76.572.276,00	10
	Meningkatnya Kualitas Air Udara dan Lahan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	503,416	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Sampah Terkelola		40	157.056.586	-	0%	-	0%	-	0%	157.056.586	100%
		Indeks Kualitas Air	Indeks	71,27		Pengelolaan Sampah	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah	1	1	157.056.586	-	0%	-	0%	-	0%	157.056.586	100%
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,82		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	157.056.586	-	0	-	0	-	0	157.056.586,00	5
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.660.795.909	901.645.770	25%	901.645.768	25%	901.645.768	25%	955.858.603	25%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	1	54.212.835	-	0%	-	0%	-	0%	54.212.835	100%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	46.215.903	-	0	-	0	-	0	46.215.903,00	8
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	7.996.932	-	0	-	0	-	0	7.996.932,00	3
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	6.583.074	1.645.770	25%	1.645.768	25%	1.645.768	25%	1.645.768	25%
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	6.583.074	1.645.770,00	0	1.645.768,00	0	1.645.768,00	0	1.645.768,00	1

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	1	3.600.000.000	900.000.000	25%	900.000.000	25%	900.000.000	25%	900.000.000	25%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	27	2.500.000.000	625.000.000,00	0	625.000.000,00	0	625.000.000,00	0	625.000.000,00	27		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	4	1.100.000.000	275.000.000,00	0	275.000.000,00	0	275.000.000,00	2	275.000.000,00	2		
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				20.733.244.959	5.025.844.899	25%	5.025.844.900	25%	5.025.844.900	25%	5.655.710.260	25%		
					Pengelolaan Sampah	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah	1	1	20.733.244.959	5.025.844.899	25%	5.025.844.900	25%	5.025.844.900	25%	5.655.710.260	25%		
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	78.789.000	-	0	-	0	-	0	78.789.000,00	1		
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	1	17.375.762.347	4.343.940.586,00	0	4.343.940.587,00	0	4.343.940.587,00	0	4.343.940.587,00	1		
					Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	11	551.076.360	-	0	-	0	-	0	551.076.360,00	1		

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	40.459.500	10.114.875,00	0	10.114.875,00	0	10.114.875,00	1	10.114.875,00	1
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	13	6.950.000	1.737.500,00	5	1.737.500,00	5	1.737.500,00	2	1.737.500,00	1
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				4.128.761.130	1.032.190.282	25%	1.032.190.282	25%	1.032.190.283	25%	1.032.190.283	25%
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				4.128.761.130	1.032.190.282	25%	1.032.190.282	25%	1.032.190.283	25%	1.032.190.283	25%
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	5	4.128.761.130	1.032.190.282,00	0	1.032.190.282,00	2	1.032.190.283,00	2	1.032.190.283,00	1





CASCADE KINERJA DPRKPRH KAB. TANAH LAUT

TULAN RPJMD	Meningkatkan Pemertahanan Ekonomi Masyarakat Indikator : Perubahan Ekonomi dan GRN Ratio											
SASARAN RPJMD	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebahagiaan Daerah Tersebut Menjadi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana											
TULAN SKPD	Meningkatkan pemertahanan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan INDIKATOR 1 : Persentase Pemertahanan Intensitas Emisi GRK INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah											
SASARAN SKPD	Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Laut INDIKATOR 1 : Pemertahanan Emisi GRK Kumulatif INDIKATOR 2 : Indeks Kualitas Air INDIKATOR 3 : Indeks Kualitas Udara INDIKATOR 4 : Indeks Kualitas Laut											
PROGRAM	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap GRK Lingkungan Dan Pengelolaan Air Dan Pengelolaan Sampah Limbah (PPLS)	Program Pemertahanan Pengawasan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Pencapaian Batu Mutu Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Data GRK	Meningkatnya Kualitas Data GRK	Meningkatnya Kualitas Data GRK	Meningkatnya Ketatan Terhadap Kegiatan Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Ketatan Terhadap Kegiatan Perindustrian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya Kualitas Data GRK	Meningkatnya Seberapa Seder Lingkungan Hidup	Meningkatnya Seberapa Seder Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pemertahanan Pemertahanan dan Kebijakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya pengelolaan sampah
INDIKATOR	Persentase Nilai Batu Mutu Lingkungan Hidup Yang Terpenuhi	Persentase Data GRK yang Valid	Persentase Data GRK yang Valid	Persentase Data GRK yang Valid	Persentase Publik Uraian dan/atau Kegiatan yang Terakutur	Persentase Pengawasan Dampak Lingkungan yang di Tidak Lanjut	Persentase Data GRK yang Valid	Jumlah Sajian Perilaku yg baik dalam kegiatan Tersebut	Jumlah Sajian Perilaku yg baik dalam kegiatan Tersebut	Persentase Program Pemertahanan yang memertahkan Sesuai Standar	Persentase RTH dalam Kondisi Baik	Persentase sampah terkelola
BEGITIAN	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Iden Lingkungan Dan Iden Ppjh Diartikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Iden Lingkungan Dan Iden Ppjh Diartikan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Pencemaran Dan/Antar Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengawasan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengawasan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Perindusan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sampah
SASARAN BEGITIAN	Terdapatnya Hasil Uj Kualitas Lingkungan Hidup Sesuai Standar	1.Terkaitnya Pemertahanan data GRK 2.Meningkatnya Kualitas Kampong Proklam	Terkaitnya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Terkaitnya Perluasan Informasi Lingkungan Hidup	1.Meningkatnya Jumlah Publik uraian dan/atau Kegiatan yang memiliki Iden PPLH 2.Terdapatnya Pejabat Program Lingkungan Hidup yang Komplet 3.Meningkatnya Tidak Lanjut Pelaporan dan Pengawasan	1.Meningkatnya Jumlah Publik uraian dan/atau Kegiatan yang memiliki Iden PPLH 2.Terdapatnya Pejabat Program Lingkungan Hidup yang Komplet 3.Meningkatnya Tidak Lanjut Pelaporan dan Pengawasan	Meningkatnya Pelayanan Laboratorium Lingkungan yang Sesuai Standar	Terkaitnya sosialisasi Sekolah Seder Lingkungan Hidup	Terkaitnya sosialisasi Sekolah Seder Lingkungan Hidup	1.Terdapatnya Rencana Perindusan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH) 2.Terkaitnya Tidak Lanjut Dokumen Pemertahanan	1.Meningkatnya Luasan RTH 2.Terkaitnya RTH	1.Meningkatnya kualitas sarana pengelolan sampah 2.Meningkatnya jumlah sampah yang masuk ke TPA 3.Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah (MS)
INDIKATOR	Jumlah Dokumen Uj Kualitas Lingkungan Hidup Diaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.Jumlah Data yang diperbaharui 2.Jumlah Kampong Proklam yang mengaktualisasikan kearah kategori	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Laporan / Kegiatan Terkait Penyebaran Informasi	1.Jumlah Rekomendasi Kecepatan PPLH 2.Jumlah Pejabat Program Lingkungan Hidup yang Komplet 3.Persentase Tidak Lanjut pelaporan dan pengawasan	1.Jumlah Rekomendasi Kecepatan PPLH 2.Jumlah Pejabat Program Lingkungan Hidup yang Komplet 3.Persentase Tidak Lanjut pelaporan dan pengawasan	Persentase Pengawasan Dampak Lingkungan yang di Tidak Lanjut	Persentase peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	1.Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengkomisi RPLH Kabupaten 2.Jumlah Laporan Tidak Lanjut	1.Luasan RTH yg dikelola 2.Jumlah RTH yang Terkultiva	1.Persentase sarana pengelolan sampah dalam kondisi baik 2.Jumlah sampah yang masuk ke TPA 3.Jumlah sampah yang dikurangi
SUB INDIKATOR	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup Diaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, Dan Laut	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi 2.Pelaksanaan rehabilitasi	Pembinaan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1.Fasilitas Pemertahanan Ketertarikan dan Kelembagaan Iden Lingkungan dan/atau Iden PPLH 2.Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 3.Pengawasan Perilaku Berusaha atau Perseorangan Pemerintah terkait Perseorangan Lingkungan yang Diartikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perindusan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.Fasilitas Pemertahanan Ketertarikan dan Kelembagaan Iden Lingkungan dan/atau Iden PPLH 2.Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 3.Pengawasan Perilaku Berusaha atau Perseorangan Pemerintah terkait Perseorangan Lingkungan yang Diartikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perindusan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Pengawasan permasalahan Pemertahanan dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pembinaan Kinerja Masyarakat/Tembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Instansi Dalam Pemertahanan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengendalian Pelaksanaan RPLH Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Hayati
OUTPUT	Jumlah Dokumen Uj Kualitas Lingkungan Hidup Diaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Diaksanakan	1.jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan 2.jumlah area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Diaksanakan	1.Jumlah Rekomendasi dan/atau Perseorangan Teknik, Perseorangan Lingkungan, dan Surat Ketetapan Operasi yang Diartikan 2.Jumlah PPLH yang ditugaskan kecapatannya 3.Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1.Jumlah Rekomendasi dan/atau Perseorangan Teknik, Perseorangan Lingkungan, dan Surat Ketetapan Operasi yang Diartikan 2.Jumlah PPLH yang ditugaskan kecapatannya 3.Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Jumlah pengelolan permasalahan Pemertahanan dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/Manganti	Jumlah pengelolan yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah pengelolan yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Jumlah Masyarakat/Dumbaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Instansi yang Ditindaklanjuti dalam rangka PPLH	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengkomisi RPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Hayati yang Dikelola

CASCADING KINERJA DPRKPLH KAB. TANAH LAUT

TUJUAN RPJMD	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Indikator : Pertumbuhan Ekonomi dan Gini Ratio		
SASARAN RPJMD	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Indeks Infrastruktur Daerah		
TUJUAN SKPD	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas Indeks Infrastruktur		
SASARAN SKPD	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman INDIKATOR 1 : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau INDIKATOR 2 : Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman		
PROGRAM	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Program Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Kepemilikan PSU pada Permukiman	Meningkatnya rumah layak huni	Menurunnya kawasan kumuh
INDIKATOR	Persentase Permukiman yang memiliki PSU Sesuai Standar	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	Persentase luasan kawasan kumuh
KEGIATAN	Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	1.Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota
SASARAN KEGIATAN	1.Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan 2.Meningkatnya Kualitas Drainase Jalan Lingkungan 3.Meningkatnya Kepatuhan pengelola perumahan terhadap ketentuan yg berlaku	1.Meningkatnya Kualitas Data Pengelolaan Perumahan 2.Menurunnya RTLH	Meningkatnya pemenuhan Sarana dan Prasarana umum pada kawasan kumuh sesuai standar
INDIKATOR	1.Jumlah Titik Jalan Lingkungan yang sesuai Standar 2.Jumlah Titik Drainase Jalan Lingkungan yang sesuai Standar 3.Persentase pengelola perumahan yang taat terhadap Ketentuan	1.Jumlah data perumahan yang Valid 2.Persentase RTLH	Jumlah Titik Kawasan kumuh yang terpenuhi PSU sesuai standar
SUB KEGIATAN	1.Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 2.Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP 2.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
OUTPUT	1.Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 2.Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1.Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang 2.Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 2.Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814
Telepon (0512) 22384 Pos-el inspektortanahlaut@gmail.com
Laman <https://inspektorat.tanahlautkab.go.id>

Pelaihari, 29 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/216/LHE AKIP /Insp/ 2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Tanah Laut

di

Pelaihari

Dengan ini kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan uraian
sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

2. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja Tahun 2025;
- b. Pengukuran Kinerja Tahun 2025;
- c. Pelaporan Kinerja Tahun 2024;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :

- a. Renstra SKPD tahun 2024-2026 dan Rancangan Renstra tahun 2025-2029;
- b. Renja SKPD tahun 2025;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2024 dan 2025 ;
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
- e. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- f. *Cascading*;
- g. Pohon Kinerja;
- h. Laporan Kinerja tahun 2024;
- i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Pelaksanaan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 800.1.11.1/312/Insp/2025 tanggal 28 Juli 2025. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
2	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0 – 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut menunjukkan nilai sebesar 75,45 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”.

Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang di nilai	Bobot	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2024	Nilai Evaluasi AKIP di Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30	24,60	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	24,00	21,60
c. Pelaporan Kinerja	15	12,00	11,25
d. Evaluasi Internal	25	18,25	18,00
Nilai Hasil Evaluasi		78,85	75,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

5. Catatan Hasil evaluasi

Catatan atas hasil evaluasi akuntabilitas pada Dinas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **24,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut telah menyusun perencanaan kinerja secara memadai. Dokumen perencanaan kinerja disusun dengan baik dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu:

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tidak tepat waktu karena batas akhir pengumpulan Tanggal 11 April 2025 sedangkan DPRKPLH belum **upload** sesuai Tanggal batas akhir pengumpulan.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja sebagian telah memenuhi standar yang baik, namun masih terdapat capaian hasil yang belum maksimal sesuai dengan ukuran kinerja yang SMART yaitu berdasarkan Keputusan Jendral Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Nomor SK 129 Tahun 2024 Tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 -2029 pada sasaran meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan kenyamanan lingkungan dengan uraian perbandingan sebagai berikut:

NO	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capain 2024	Target 2025
1	Meningkatkan Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	43,19	40,68	94,17%	54,38
		Indeks Kualitas air	58,57	53,57	91,38%	71,27
		Indeks kualitas udara ambient	92,05	95,84	104,12%	71,82
		Indeks kualitas tutupan lahan	41,78	44,27	105,96%	65,12
2		Nilai Sakip	85	78,88	92,8	80

b. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,60** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Pada komponen pengukuran kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut belum dilakukan melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala karena belum membuat rencana aksi;
- 2) Pemantauan pada kinerja bawahan oleh Pimpinan telah memanfaatkan teknologi dengan menggunakan E-kinerja namun pada implementasi dalam penilaian SKP bulanan, umpan balik (*feedback*) dari pimpinan hanya berupa simbol “jempol” belum dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya. Hal ini membuat hasil pemantauan kinerja belum sepenuhnya tergambar;
- 3) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja pada Perubahan dokumen perencanaan yaitu perubahan Rencana Kerja (Renja) belum sepenuhnya berdasarkan analisis capaian kinerja pertriwulan.

c. Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **11,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut telah membuat Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Tahun 2024 telah dipublikasikan melalui *website* PPID dan esr menpan.

Pada komponen pelaporan kinerja, terdapat catatan sebagai berikut :

- 1) Laporan kinerja telah disusun, namun laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan kualitas pencapaian kinerja dimana laporan pencapaian kinerja tahun 2024 tidak disusun secara berkala dengan dibuatkan rencana aksi atas pencapaian kinerja.

- 2) Laporan kinerja telah disusun, namun belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya. Hal ini terlihat pada Laporan Kinerja tahun 2024 indikator nilai SAKIP realisasi 78,85 nilai, namun pada target PK tahun 2025 sebesar 80 nilai.

d. Evaluasi Internal

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pemenuhan rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun lalu, dan pemanfaatan atas evaluasi kinerja internal dalam meningkatkan capaian *output* dan capaian *outcome*. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **18,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja internal tahun lalu telah seluruhnya ditindaklanjuti, Namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan capaian *output* dan *outcome* kinerja perangkat daerah, hal ini ditunjukkan dengan target kinerja tahun 2025 yang tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

6. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja agar dipublikasikan tepat waktu;
- 2) Melakukan perbaikan dan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan Hasil evaluasi kinerja berkala (rapat pertriwulan) agar menjadi salah satu pertimbangan dalam perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Agar membuat Rencana Aksi yang menyajikan strategi yang akan dicapai setiap triwulan untuk indikator kinerja yang telah di tetapkan;
- 2) Agar dilakukan pemantauan atas pengukuran Capaian Kinerja yang memuat analisis capaian kinerjanya. Misal atasan langsung memberikan feedbacknya berupa narasi pada SKP;

- 3) Agar Semua program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan pengurangan/pergeseran/penambahan anggaran yang masuk perubahan renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev per triwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Agar membuat rencana aksi atas pencapaian kinerja memperhatikan capaian kinerja berkala oleh masing-masing pengampu Perjanjian Kinerja (PK);
- 2) Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

d. Evaluasi Internal

- 1) Agar segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi tahun 2025.;
- 2) Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2025 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pada .aplikasi Simpun.

7. Tindak lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga mempertimbangkan atas tindak lanjut hasil rekomendasi yang telah diberikan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.



Plt. Inspektur,

Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta
3. Arsip

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
KABUPATEN TANAH LAUT Tahun 2024

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Unit/ Satker	
			Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24,60
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	A	5,40
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,20
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	BB	12,00
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		21,60
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,80
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	B	6,30
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	B	10,50
3	PELAPORAN KINERJA	15,00		11,25
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	BB	2,40
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	BB	3,60
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	B	5,25
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		18,00
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	B	3,50
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	CC	4,50

4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	BB	10,00
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA				75,45
KESIMPULAN				BB
INTERPRESTASI				Sangat Baik



Pit. In. Inspektur,

H. Riva Mahrani, ST, CGCAE

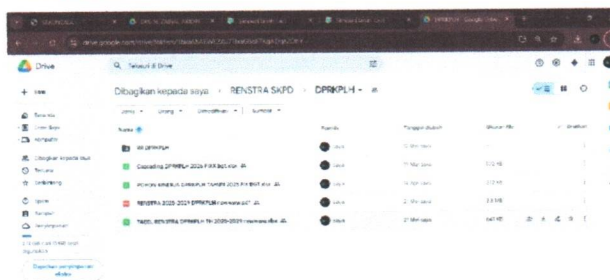
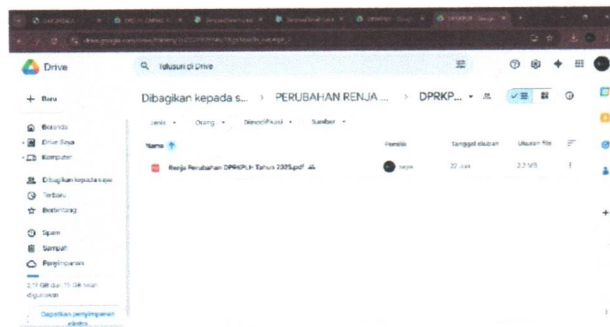
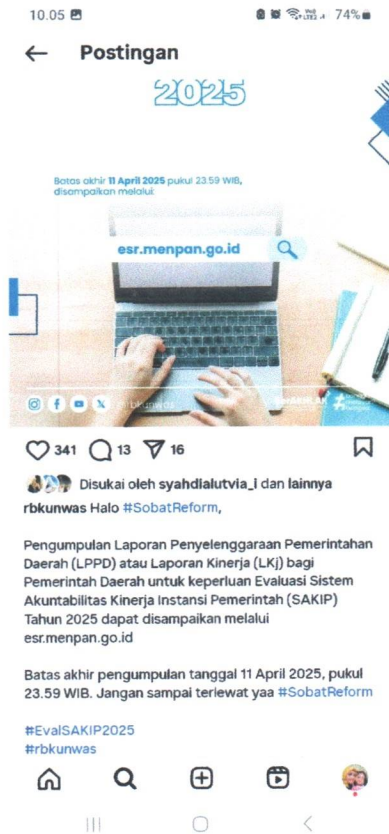
Perbina (IV/a)

NIP. 19770223 200604 2 009

Dokumen yang menjadi perhatian:

a. Perencanaan Kinerja

1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tidak tepat waktu



2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sebagian belum dapat dicapai (achievable) menantang,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : DINAS PERKIM & LH KAB. TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	54,38
		Indeks Kualitas Air	71,27
		Indeks Kualitas Udara	71,82
		Indeks Kualitas Lahan	65,12
		Nilai Sakip	80

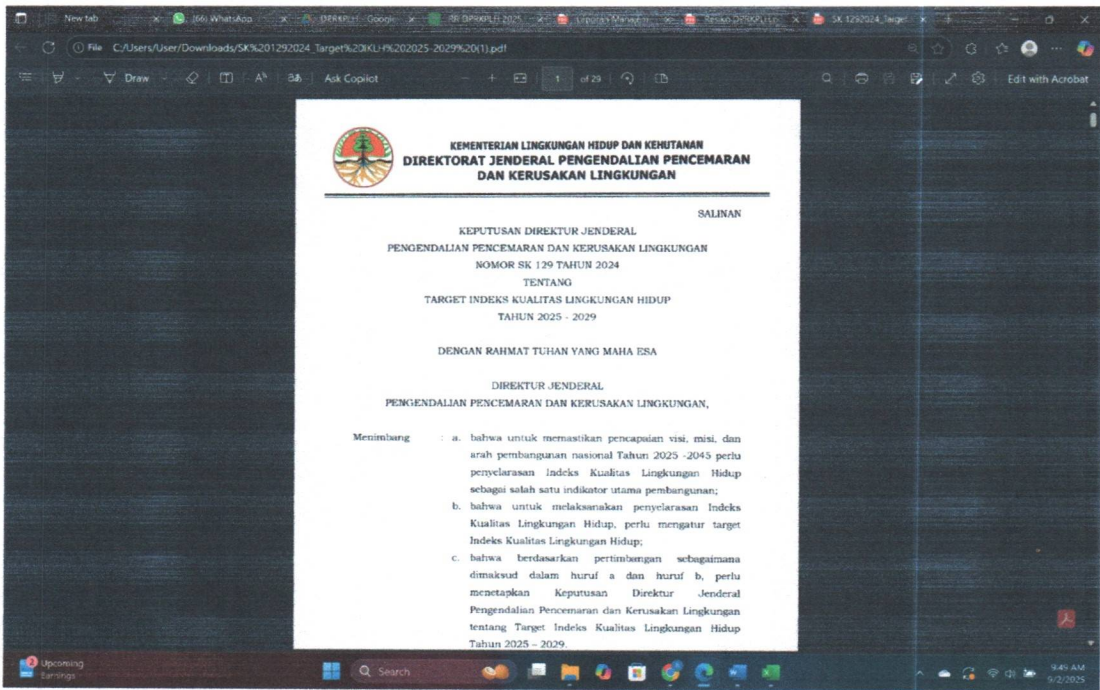
Capaian 2024

NO	Sasaran Strategis	No	Indikator	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	54,38	49,60%	64,71%
		2	Indeks Kualitas Air	71,27	53,27	74,76%
		3	Indeks Kualitas Udara	71,82	52,84	73,58%
		4	Indeks Kualitas Lahan	65,12	64,27	98,86%
		5	Nilai Sakip	80	79,88	100%

Tabel Perbandingan Kinerja Kepala Dinas 2011 dengan Capaian Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun					Target	Realisasi	Capaian
			2016	2017	2018	2019	2020			
1	Meningkatkan Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman						54,38	49,60%	64,71%

LAKU DINAS PERKIM & LH Kab. Tanah Laut 2024



Kategori	Sub-kategori	2025					2026					2027					2028					2029				
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max					
PROVINSI SUMATERA UTARA	1. Kabupaten Sintang	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00				
	2. Kabupaten Seruyan	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	3. Kabupaten Kutai Barat	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	4. Kabupaten Kutai Timur	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	5. Kabupaten Kutai Selatan	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	6. Kabupaten Kutai Tengah	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	7. Kabupaten Kutai Utara	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	8. Kabupaten Mahakam Ulu	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	9. Kabupaten Mahakam Hilir	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	10. Kabupaten Paser	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	11. Kabupaten Paser Utara	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	12. Kota Balikpapan	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	13. Kota Samarinda	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
PROVINSI SUMATERA BARAT	1. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	2. Kabupaten Padang Lawas Utara	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	3. Kabupaten Padang Lawas Tengah	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	4. Kabupaten Padang Lawas Selatan	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	5. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	6. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	7. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	8. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	9. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	10. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	11. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	12. Kabupaten Padang Pariaman	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			
	13. Kota Padang	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00			

b. Pengukuran Kinerja Rencana Aksi

RENCANA KINERJA
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
Kabupaten 2024

No	Kategori Kinerja	Indikator	Target	2023		2024		Catatan
				Realisasi	Target	Realisasi	Target	
1	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Kelembagaan	Kelembagaan	100%	100%	100%	100%	100%	

penilaian SKP bulanan, umpan balik (feedback) dari pimpinan

1	NAMA	Drs ZAINAL ABIDIN	1	NAMA	Drs. H DAHNIAL KIFLI, MAP
2	NIP	196410131986031012	2	NIP	196404251987031012
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Muda / IV/c	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina Utama Madya / IV/d
4	JABATAN	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	4	JABATAN	Sekretaris Daerah
5	UNIT KERJA	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
UTAMA						
1	Meningkatnya kualitas kebersihan keindahan dan kenyamanan lingkungan	penghargaan kebersihan	diraihnya adipura dan adwiyata	Penerima Layanan	1 kegiatan berdasarkan https://drive.google.com/drive/folders/1jzkskcnMDPmngfutaIRUHXQDGhXo?usp=sharing	Pimpinan:
		indeks kualitas air	100%	Penerima Layanan	1 kegiatan berdasarkan https://drive.google.com/drive/folders/1jzkskcnMDPmngfutaIRUHXQDGhXo?usp=sharing	Pimpinan:
		indeks kualitas udara ambien	100%	Penerima Layanan	1 kegiatan berdasarkan https://drive.google.com/drive/folders/1jzkskcnMDPmngfutaIRUHXQDGhXo?usp=sharing	Pimpinan:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK
----	---------------------	----------------------------	--------	------------	------------------------------------	-------------

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Renja Perubahan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Tanah Laut
 Nama Perangkat Daerah: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target dan Satuan	Besaran Pagu	Pola Kegiatan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp20.242.530.180,76		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.999.156,77		
1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Pelaharan, Pelaharan, Pelaharan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	9.999.403,17	Fotocopy dan Perijinan Dokumen DPA, Dokumen DPAP, Dokumen Renja Ilumi, Dokumen Renja Perubahan, Dokumen RKA, Dokumen RKAP	
2	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tanah Laut, Pelaharan, Pelaharan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	6.999.753,60	Fotocopy dan Perijinan Dokumen Lajip, Dokumen LKPI, Dokumen LPPD	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.129.687.664,00		
3	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tanah Laut, Pelaharan, Pelaharan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan	11.123.688,104,00	Pembayaran Gaji dan TPP ASN	
4	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Tanah Laut, Pelaharan, Pelaharan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5.999.560,00	Belanja Photocopy dan Perijinan Laporan Keuangan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada						

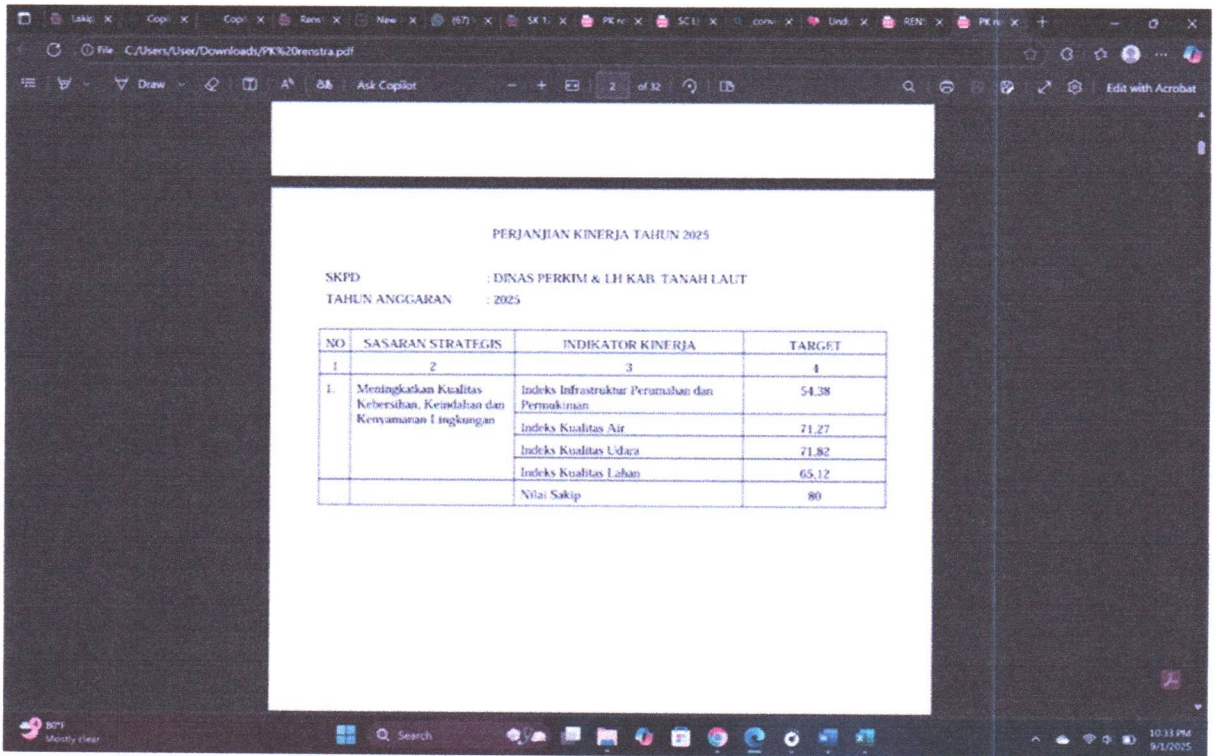
Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024

b. Renja SKPD;
 c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 d. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 e. Perjanjian Kinerja (PK);
 f. Cascading;
 g. Pohon Kinerja;
 h. Laporan Kinerja;
 i. Dokumen lain yang mendukung.

4. Hasil evaluasi

Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 78,85 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

2



Plt. Inspektur,



Hj. Riva Mahrani, ST, CGCAE
Pembina (IV/a)
NIP. 19770223 200604 2 009